PROSPEKTUS PMHMETD V PT BAKRIE & BROTHERS Tbk TAHUN 2026

PROSPEKTUS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	27 Februari 2026	Tanggal Distribusi HMETD	13 Juli 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	30 Juni 2026	Tanggal Pencatatan HMETD	14 Juli 2026
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (*Cum*) di:		Tanggal dimulainya Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	14 Juli 2026
		Tanggal berakhirnya Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	27 Juli 2026
• Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juli 2026	Tanggal Terakhir Pemesanan Saham Tambahan	27 Juli 2026
• Pasar Tunai	10 Juli 2026	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	29 Juli 2026
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (*Ex*) di:		Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	30 Juli 2026
• Pasar Reguler dan Negosiasi	9 Juli 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tambahan Saham	31 Juli 2026
• Pasar Tunai	13 Juli 2026	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	31 Juli 2026
Tanggal Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD (*Recording Date*)	10 Juli 2026		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BAKRIE & BROTHERS TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Bakrie & Brothers Tbk

BIDANG USAHA

Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. Konsultasi, jasa, industri, konstruksi, manufaktur dan infrastruktur serta perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

KANTOR

Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telephone: +62-21-2991-2222
Facsimile: +62-21-2991-2333
Website: https://bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU V ("selanjutnya disebut PMHMETD V")

Perseroan menawarkan sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp4.765.751.471.134 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat Rupiah) yang berasal dari portepel akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 27 (dua puluh tujuh) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB mempunyai 14 (empat belas) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang diterbitkan untuk PMHMETD V ini mewakili sebanyak 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD V.

Port Fraser International Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.857.777.917 saham atau sebesar 22,41% yang akan memperoleh sebanyak 20.148.477.438 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 004/PORT/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Port Fraser International Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada PT Bakrie Capital Indonesia ("BCI") yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Port Fraser International Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

Fountain City Investment Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.445.133.000 saham atau sebesar 22,17% yang akan memperoleh sebanyak 19.934.513.407 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 005/FCIL/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Fountain City Investment Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada BCI yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Fountain City Investment Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

BCI sebagai pihak yang akan menerima sebanyak 40.082.990.845 HMETD dari Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD tersebut berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2026 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 2.124.398.514.785 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah). BCI memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang diterima, dengan adanya bukti kecukupan dana berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka BCI selaku Pembeli Siaga Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Siaga Penawaran Umum Terbatas V PT Bakrie & Brothers Tbk No. 70 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, yang juga didukung dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga tertanggal 26 Juni 2026, telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan porsi sebanyak-banyaknya 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham dengan harga pelaksanaan yang sama yaitu Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.641.352.956.349 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah). BCI memiliki dana yang cukup selaku pembeli siaga, dengan adanya bukti kecukupan dana berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

HMETD dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 27 Juli 2026 tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KESULITAN MENCARI MITRA STRATEGIS DAN IMPLEMENTASI RENCANA KERJA SAMA DENGAN MITRA TERSEBUT DALAM PENGEMBANGAN BISNIS. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) SEBANYAK-BANYAKNYA 34,15% SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD V

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD V INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

PT Bakrie & Brothers Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 044/BNBR/CS-OJK/III/26 perihal Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan efek Terlebih Dahulu V (PMHMETD V) PT Bakrie & Brothers Tbk. kepada OJK di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 33/2015"), serta Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPM").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD V ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD V ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Dalam penyusunan prospektus ini PT Danatama Makmur Sekuritas selaku konsultan keuangan telah memberikan persetujuan tertulis tertanggal 22 Mei 2026 mengenai pencantuman nama dalam prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD V ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang dan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau HMETD, maka Prospektus beserta dengan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan PMHMETD V tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan pelanggaran terhadap, Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku di negara tempat pihak tersebut menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan PMHMETD V ini atau Undang-undang dan/atau Peraturan negara lain yang berlaku terhadap pihak di luar Indonesia tersebut.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**

DEFINISI **3**

RINGKASAN **8**

I. PENAWARAN UMUM 21

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD V 28

III. PERNYATAAN UTANG 40

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 55

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 62
1. UMUM 62
2. KONDISI PEREKONOMIAN 62
3. KEUANGAN 63
4. SEGMEN OPERASI 75
5. KEBIJAKAN PEMERINTAH 76
6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN 76
7. LIABILITAS 76
8. INVESTASI BARANG MODAL 77
9. DAMPAK SELISIH KURS 77
10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI 78

VI. FAKTOR RISIKO 79

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN 82

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 83
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 83
2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR 84
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 84
4. TATA KELOLA 90
5. SUMBER DAYA MANUSIA 92
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 95
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN 95
8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 96
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 104
10. HARTA KEKAYAAN INTELEKTUAL 106
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 106
12. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 119
14. PEMASARAN 120
15. PROSPEK USAHA 121
16. PERSAINGAN USAHA 121
17. STRATEGI USAHA 124

IX. EKUITAS 125

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 127

XI. PERPAJAKAN 128

XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA 130

XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	133
XIV.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	135
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD	140

DEFINISI

Afiliasi	:	Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau - istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami ---atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau --istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan Komisaris, atau Pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anak Perusahaan/Entitas Anak	:	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.
Anggaran Dasar	:	anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.
BAE	:	Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berperan mengelola administrasi saham di pasar sekunder untuk kepentingan emiten, dimana dalam PMHMETD V Perseroan adalah PT EDI Indonesia.
BEI atau Bursa	:	PT Bursa Efek Indonesia, yang merupakan hasil merger dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek (surat berharga) dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	:	Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun dan diadministrasikan oleh BAE Perseroan.
Dilusi	:	Penurunan persentase kepemilikan saham pemegang saham lama akibat bertambahnya jumlah saham yang beredar, di mana pemegang saham

		lama tidak ikut serta dalam pembelian saham baru yang diterbitkan, dalam hal ini saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD V Perseroan.
Dirjen	:	Direktorat Jenderal.
Efektif	:	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UUP2SK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
e-RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik.
e-RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara elektronik.
Hari Bursa	:	Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.
Harga Pelaksanaan	:	Harga pelaksanaan sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) per saham dalam rangka PMHMETD, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan kuasa dan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Februari 2026, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal.
HMETD	:	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
KAP	:	Kantor Akuntan Publik.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. KSEI mencatat dan mendistribusikan HMETD ke dalam sub-rekening efek investor yang berhak (berdasarkan *recording date*) secara otomatis, serta mengatur perdagangan HMETD dan penyelesaian transaksi pelaksanaan (*exercise*) HMETD dan pendistribusian saham baru ke portofolio investor setelah mereka melakukan pembayaran.
Masyarakat	:	Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
Menkum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya disebut Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
Menteri ESDM	:	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam-LK), adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Pembeli Siaga	:	Pihak yang akan mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD V Perseroan, dalam hal ini adalah BCI, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Siaga Penawaran Umum Terbatas V PT Bakrie & Brothers Tbk No. 70 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Pemegang Saham	:	orang, perusahaan, atau lembaga yang memiliki saham suatu perusahaan.
Pemegang Saham Utama	:	Pihak yang memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 20% atau 25% saham atau hak suara pada suatu perusahaan. Dalam hal PMHMETD V pihak-pihak tersebut adalah Port Fraser International Ltd. dan Fountain City Investment Ltd.
Pemilik Manfaat Akhir (UBO)	:	Orang perseorangan yang benar-benar memiliki, mengendalikan, atau menerima manfaat akhir dari rekening/transaksi nasabah, serta memiliki wewenang mengangkat/memberhentikan pengurus korporasi. Pemilik manfaat akhir Perseroan adalah Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Penitipan Kolektif	:	Jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
Penyelenggara e-RUPS	:	KSEI yang memberikan fasilitas pemberian kuasa secara elektronik kepada Pemegang Saham untuk hadir dalam e-RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan.
Peraturan BEI No. I-E	:	Peraturan BEI No. I-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tanggal 12 Desember 2025.
Periode Perdagangan	:	Rentang waktu di mana transaksi pembelian atau penjualan aset keuangan (efek/HMETD) dapat dilakukan dalam sesi perdagangan resmi yang ditetapkan oleh Bursa Efek, dalam hal ini periode perdagangan PMHMETD V Perseroan yang berlangsung dari tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026.
Pernyataan Pendaftaran	:	Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Bakrie & Brothers Tbk., suatu Perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 35 - 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl.H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Perusahaan Asosiasi	:	Perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan secara langsung ke dalam sejumlah perusahaan dengan nilai penyertaan lebih dari 20% dan kurang dari 50% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
PMHMETD	:	Penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 32/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 33/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 14/2019	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 45/2024	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK 40/2025	:	Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Prospektus	:	Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
PT	:	Perseroan Terbatas.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	:	Saham yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka (emiten) yang menambah jumlah saham beredar dan/atau permodalan. Saham baru ini berasal dari penambahan modal (PMHMETD/Non-HMETD), kapitalisasi saldo laba, atau konversi efek lainnya.
Saham Tambahan	:	Saham Baru yang dipesan lebih oleh pemegang saham lama di luar porsi Saham Baru yang telah dilaksanakannya dari HMETD nya.
SKS	:	Surat Kolektif Saham.
Tanggal Efektif	:	saat di mana peraturan tersebut mulai berlaku mengikat secara hukum, memiliki kekuatan hukum tetap, dan wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang diatur di dalamnya.
Tbk atau Perusahaan Terbuka	:	Terbuka, adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
TBN	:	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
TDP	:	Tanda Daftar Perusahaan.
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan UU No. 1/2026.
UU No. 1/2026	:	Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
UP2SK	:	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4.
UUPM	:	Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

BMI	:	PT Bakrie Metal Industries
BIIN	:	PT Bakrie Indo Infrastructure
VKTR	:	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
KJU	:	PT Kreasindo Jaya Utama
MSI	:	PT Modula Sustainability Indonesia
GSO	:	Golden Sand Oasis Ltd
BPI	:	PT Bakrie Pipe Industries
BCONS	:	PT Bakrie Construction
SAE	:	PT Suluh Ardhi Engineering
BPIL	:	PT Bakrie Pipeline Indonesia
BG	:	PT Bakrie Gas
BGU	:	PT Bakrie Gasindo Utama
BJE	:	PT Bakrie Java Energy
EDP	:	PT Energas Daya Pratama
BP	:	PT Bakrie Power
BIN	:	PT Bangun Infrastruktur Nusantara
BOGI	:	PT Bakrie Oil & Gas Infrastructure
BTELCO	:	PT Bakrie Telco Infrastructure
BTI	:	PT Bakrie Toll Indonesia
BPORT	:	PT Bakrie Port Indonesia
BMT	:	PT Bakrie Mina Tirta
MKN	:	PT Multi Kontrol Nusantara
BA	:	PT Bakrie Autoparts
VSI	:	PT VKTR Sakti Industries
SEI	:	PT Sarana Ekomobilitas Indonesia
SEAPI	:	PT South East Asia Pipe Industries
BMC	:	PT Braja Mukti Cakra
BUMM	:	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa
BKM	:	PT Bakrie Komponen Mobilitas
BDE	:	PT Bakrie Darmakarya Energi
KTP	:	PT Kuala Tanjung Power
HSE	:	PT Helio Synar Energi
BET	:	PT Bakrie Energi Transisi
GMN	:	PT Graha Multimedia Nusantara
CTW	:	PT Cipta Wisesa
STN	:	PT Starbit Technology Nusantara
SEN	:	PT System Energi Nusantara
MTD	:	PT Modula Tiga Dimensi
CCT	:	PT Cimanggis Cibitung Tollways

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci di dalam Prospektus ini. Informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendahuluan

Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan nama ”N.V. Bakrie & Brothers” berdasarkan Akta No. 55, tanggal 13 Maret 1951, yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.8/81/6 tanggal 25 Agustus 1951. Dalam perkembangannya, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan ekspansi usaha untuk memperluas jangkauan kegiatan bisnisnya sekaligus melakukan pengembangan atas jaringan investasinya. Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 35-37, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.

Akta Pendirian Perseroan yang berisikan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62, tanggal 27 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0065149 Tanggal 27 Februari 2026, dan telah didaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0044252.AH.01.11.TAHUN 2026 Tanggal 27 Februari 2026 (“**Akta No. 62/2026”)**.

Selaras dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan usaha utama, antara lain (i) aktivitas perusahaan holding, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis; dan

b) Kegiatan usaha penunjang, antara lain (i) industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, (ii) industri pengecoran besi dan baja, (iii) industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, (iv) industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (v) pembangkit tenaga listrik, (vi) distribusi gas alam dan buatan, (vii) konstruksi bangunan sipil jalan, (viii) konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass, (ix) jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil, (x) perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berkaitan dengan itu, (xi) perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, (xii) perdagangan besar berbagai macam material bangunan, (xiii) aktivitas jalan tol, (xiv) aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, (xv) kawasan industri, (xvi) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (xvii) pertambangan gas alam, (xviii) aktivitas desain alat transportasi dan permesinan, (xix) industri pencetakan 3D printing, dan (xx) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perusahaan holding, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis seperti pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, mengatur pembelian dan penjualan bisnis, termasuk praktik profesional dan kegiatan broker hak paten yang dilakukan pada level unit usaha Perseroan.

Sejumlah aktivitas *(corporate actions)* Perseroan berkaitan dengan pencatatan sahamnya di Bursa yang telah dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	28 Agustus 1989	2.850.000	2.850.000
Pencatatan atas saham para pendiri dalam bentuk Company Listing	9 Maret 1990	16.150.000	19.000.000
Private Placement I	27 November 1991	978.969	19.978.969

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Private Placement II	10 Januari 1992	1.031	19.980.000
HMETD I	4 Juni 1993	1.080.000	21.060.000
Saham Bonus I	22 Juni 1994	31.590.000	52.650.000
HMETD II	14 Juli 1994	189.540.000	242.190.000
Pemecahan Saham (*Stock Split*)	7 Agustus 1995	242.190.000	484.380.000
Saham Bonus II	17 Januari 1997	1.453.140.000	1.937.520.000
Penambahan Modal Non HMETD	31 Oktober 2001	36.812.880.000	38.750.400.000
Penggabungan Saham I	17 Maret 2005	-31.000.320.000	7.750.080.000
HMETD III	6 Mei 2005	19.220.198.400	26.970.278.400
Penggabungan Saham II	6 Maret 2008	-13.485.139.200	13.485.139.200
HMETD IV & Waran Seri I	24 Maret 2008	80.236.578.240	93.721.717.440
Saham Ditempatkan & Disetor Penuh*)	1 April 2011	88	93.721.717.528
Penambahan Modal Non HMETD I**)	15 Desember 2016	3.300.000.000	97.021.717.528
Penambahan Modal Non HMETD II**)	31 Maret 2017	16.458.094.820	113.479.812.348
Penambahan Modal Non HMETD III**)	12 September 2017	55.751.960	113.535.564.308
Penambahan Modal Non HMETD IV**)	3 April 2018	7.624.865.069	121.160.429.377
Penambahan Modal Non HMETD V**)	21 Mei 2018	623	121.160.430.000
Penggabungan Saham III	31 Mei 2018	-109.044.386.000	12.116.043.000
Penambahan Modal Non HMETD VI**)	12 Desember 2018	8.655.934.000	20.771.977.000
Penambahan Modal Non HMETD VII**)	27 Februari 2019	91.076.480	20.863.053.480
Penambahan Modal Non HMETD VIII**)	29 Maret 2021	297.811.781	21.160.865.261
Penambahan Modal Non HMETD IX**)	22 Desember 2022	923.618.948	22.084.484.209
Penambahan Modal Non HMETD X**)	29 November 2023	99.527.840.300	121.612.324.509
Penambahan Modal Non HMETD XI**)	8 Desember 2023	38.445.133.000	160.057.457.509
Penambahan Modal Non HMETD XII**)	10 Desember 2024	13.359.375.000	173.416.832.509

Keterangan:
*) Dari total Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 4.719.798.720, jumlah waran yang dikonversi menjadi saham sampai dengan berakhirnya periode pelaksanaan waran tanggal 1 April 2011 adalah sebanyak 88 lembar.
**) Merupakan konversi dari beberapa Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp**23.567.563 juta**. Sementara itu, total kewajiban dan ekuitas Perseroan masing-masing tercatat sebesar Rp**18.895.899 juta** dan Rp**4.671.664 juta**. Nilai Aset tersebut merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan dalam menunjang penciptaan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) per tanggal 31 Mei 2026, adalah sebagai berikut:

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar				
Seri A (Nominal Rp5.687)	**A**	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	**B**	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	**C**	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	**D**	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	**E**	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Jumlah Modal Dasar		**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
Saham Seri A				
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Jumlah Saham Seri A		**19.375.800**	**110.186.762.400**	
Saham Seri B				
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21
Jumlah Saham Seri B		**368.128.800**	**293.030.524.800**	
Saham Seri C				
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.383.920	3,89
Jumlah Saham Seri C		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**	
Saham Seri D				
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33
Jumlah Saham Seri D		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**	
Saham Seri E				
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17
Levoca Enterprise Lte	E	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14
Jumlah Saham Seri E		**159.988.282.300**	**1.919.859.387.600**	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**173.416.832.509**	**4.764.177.722.771**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**490.196.869.141**	**5.882.362.429.953**	**-**

PMHMETD V

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD V kepada para Pemegang Saham dengan menawarkan sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp4.765.751.471.134 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat Rupiah). Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini dikeluarkan dari saham portepel yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang saham Perseroan yang memegang 27 (dua puluh tujuh) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB mempunyai 14 (empat belas) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang diterbitkan untuk PMHMETD V ini mewakili sebanyak 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD V.

Port Fraser International Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.857.777.917 saham atau sebesar 22,41% yang akan memperoleh sebanyak 20.148.477.438 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 004/PORT/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Port Fraser International Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada PT Bakrie Capital Indonesia ("BCI") yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Port Fraser International Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

Fountain City Investment Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.445.133.000 saham atau sebesar 22,17% yang akan memperoleh sebanyak 19.934.513.407 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 005/FCIL/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Fountain City Investment Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada BCI yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Fountain City Investment Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

BCI sebagai pihak yang akan menerima sebanyak 40.082.990.845 HMETD dari Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD tersebut berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2026 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 2.124.398.514.785 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah). BCI memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang diterima, dengan adanya bukti kecukupan dana berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih

besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka BCI selaku Pembeli Siaga Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Siaga Penawaran Umum Terbatas V PT Bakrie & Brothers Tbk No. 70 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, yang juga didukung dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga tertanggal 26 Juni 2026, telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan porsi sebanyak-banyaknya 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham dengan harga pelaksanaan yang sama yaitu Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.641.352.956.349 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah).

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD V dan sesudah PMHMETD V dengan asumsi Pemegang Saham Utama yaitu Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd tidak ikut ambil bagian dan mengalihkan kepada BCI sebagai pihak yang menerima dan melaksanakan HMETD, sedangkan pemegang saham lainnya mengambil seluruh saham dalam PMHMETD V dengan menggunakan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026:

Keterangan	Sebelum PMHMETD V				Sesudah PMHMETD V		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp5.687)	**A**	19.375.200	110.186.762.400	0,00	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	**B**	368.128.800	293.030.524.800	0,06	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	**C**	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	**D**	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	**E**	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Jumlah Modal Dasar		**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**	**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
Saham Seri A							
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Jumlah Saham Seri A		**19.375.200**	**110.186.762.400**		**19.375.200**	**110.186.762.400**	
Saham Seri B							
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21	368.128.800	293.030.524.800	0,14
Jumlah Saham Seri B		**368.128.800**	**293.030.524.800**		**368.128.800**	**293.030.524.800**	
Saham Seri C							
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29	2.230.423.800	506.306.202.600	0,85
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.378.920	3,89	6.754.243.960	1.533.213.378.920	2,56
Jumlah Saham Seri C		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**	
Saham Seri D							
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33	4.039.155.449	399.876.389.451	1,53
Jumlah Saham Seri D		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**	
Saham Seri E							
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41	38.857.777.917	466.293.335.004	14,76
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17	38.445.133.000	461.341.596.000	14,60
Levoca Enterprise Lte	E	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78	36.290.653.137	435.487.837.644	13,78
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76	17.795.138.888	213.541.666.656	6,76
PT Biofuel Indo Sumatra	E	-	-	-	1.156.516.044	13.878.192.528	0,44
R.A. Sri Dharmayanti	E	-	-	-	6.856.370	82.276.440	0,00
Armansyah Yamin	E	-	-	-	2.082.784	24.993.408	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14	77.270.972.393	927.251.668.716	29,34
PT Bakrie Capital Indonesia	E	-	-	-	40.082.990.845	480.995.890.140	15,22
Jumlah Saham Seri E		**159.988.282.300**	**1.919.859.387.600**		**249.908.121.378**	**2.998.897.456.536**	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**173.416.832.509**	**4.764.177.722.771**	**100,00**	**263.336.671.587**	**5.843.215.791.707**	**100,00**

Saham dalam Portepel	**490.196.869.141**	**5.882.362.429.953**		**400.277.030.063**	**4.803.324.361.017**

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD V dengan kondisi seluruh pemegang saham tidak ikut ambil bagian dalam PMHMETD V dan asumsi BCI akan melaksanakan HMETD dari pengalihan Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd serta berperan menjadi Pembeli Siaga untuk seluruh sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham dalam PMHMETD V dengan menggunakan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026:

Keterangan	Sebelum PMHMETD V				Sesudah PMHMETD V		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp5.687)	**A**	19.375.200	110.186.762.400	0,00	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	**B**	368.128.800	293.030.524.800	0,06	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	**C**	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	**D**	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	**E**	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Jumlah Modal Dasar		**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**	**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
Saham Seri A							
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Jumlah Saham Seri A		**19.375.200**	**110.186.762.400**		**19.375.200**	**110.186.762.400**	
Saham Seri B							
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21	368.128.800	293.030.524.800	0,14
Jumlah Saham Seri B		**368.128.800**	**293.030.524.800**		**368.128.800**	**293.030.524.800**	
Saham Seri C							
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29	2.230.423.800	506.306.202.600	0,85
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.378.920	3,89	6.754.243.960	1.533.213.378.920	2,56
Jumlah Saham Seri C		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**	
Saham Seri D							
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33	4.039.155.449	399.876.389.451	1,53
Jumlah Saham Seri D		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**	
Saham Seri E							
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41	38.857.777.917	466.293.335.004	14,76
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17	38.445.133.000	461.341.596.000	14,60
Levoca Enterpirese Lte	E	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78	23.898.722.798	286.784.673.576	9,08
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76	11.718.750.000	140.625.000.000	4,45
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14	47.067.898.585	564.814.783.020	17,87
PT Bakrie Capital Indonesia	E	-	-	-	89.919.839.078	1.079.038.068.936	34,15
Jumlah Saham Seri E		**159.988.282.300**	**1.919.859.387.600**		**249.908.121.378**	**2.998.897.456.536**	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**173.416.832.509**	**4.764.177.722.771**	**100,00**	**263.336.671.587**	**5.843.215.791.707**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**490.196.869.141**	**5.882.362.429.953**		**400.277.030.063**	**4.803.324.361.017**	

Penggunaan Dana Dari Hasil PMHMETD V

Dana hasil PMHMETD V ini, setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp4.362.417.779.559 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada BTI, anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya akan menggunakan dana tersebut dengan perincian:

a. sebesar Rp3.662.417.779.559 (tiga triliun enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan digunakan oleh BTI, anak perusahaan Perseroan, untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman kepada Hartman International Pte. Ltd. berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 14 November 2025 antara BTI dengan Hartman International Pte Ltd; dan

b. sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh BTI, anak perusahaan Perseroan, untuk pembayaran seluruh pinjaman kepada PT Bank Nationalnobu Tbk berdasarkan Akta *Facility Agreement* No. 21 tanggal 19 November 2025 yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat antara BTI dan PT Bank Nationalnobu Tbk.

2. Sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk setoran modal kepada BCONS, anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan BCONS untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dalam proyek yang akan dikerjakan BCONS yaitu Proyek Pertamina Hulu Rokan: North Dumai Development ("PHR NDD").

3. Sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk setoran modal kepada CCT, anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan CCT untuk kebutuhan pematangan lahan yang merupakan bagian dari persiapan infrastruktur dasar berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.04 tertanggal 7 Juli 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IX Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.6 tertanggal 11 Mei 2021 dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol).

4. Sedangkan sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya gaji, sewa kantor dan biaya operasional lainnya antara lain mencakup pembelian peralatan kantor (kertas, tinta printer dan alat tulis), langganan daya & jasa (biaya internet, langganan software/ aplikasi bulanan dan air minum galon) dan jamuan & transportasi (biaya konsumsi saat rapat dan transportasi lokal untuk karyawan).

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD V ini maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PMHMETD V dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Pemegang saham dan/atau calon investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Pemegang saham dan/atau calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali No. 00115/2.0902/AU.1/10/1792-4/1/VI/2026 pada tanggal 26 Juni 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Total Aset Lancar	4.418.147	3.629.104
Total Aset Tidak Lancar	19.149.416	3.200.385
TOTAL ASET	**23.567.563**	**6.829.489**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.596.001	2.150.564

Total Liabilitas Jangka Panjang	15.299.898	767.259
Total Liabilitas	**18.895.899**	**2.917.823**
Ekuitas Neto	**4.671.664**	**3.911.666**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**23.567.563**	**6.829.489**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
LABA RUGI		
Pendapatan Neto	3.742.973	3.869.905
Beban Pokok Pendapatan	2.998.589	3.000.428
Laba Bruto	**744.384**	**869.477**
Total Beban Usaha	627.521	586.605
Laba Usaha	**116.863**	**282.872**
Penghasilan Lain-lain - Neto	401.969	106.358
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	518.832	389.230
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(16.089)	(53.182)
LABA NETO	**502.743**	**336.048**
Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Dikurangi Pajak	**7.253**	**6.459**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	**509.996**	**342.507**

RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(107.567)	865
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(5.342.897)	(1.323.353)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	5.518.798	624.434
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**68.334**	**(698.054)**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING ATAS KAS DAN SETARA KAS	**91**	**815**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**168.225**	**865.464**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**236.650**	**168.225**

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Neto	(3,28)	2,94
Laba Usaha	(58,69)	(18,79)
Laba Bersih	49,60	27,07
Total Aset	245,09	(3,83)
Total Liabilitas	547,60	(34,30)
Total Ekuitas	19,43	47,02

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Usaha (%)		
Laba Usaha / Pendapatan Neto	3,12	7,31
Laba Neto / Pendapatan Neto	13,43	8,68
Laba Usaha / Total Ekuitas	2,50	7,23
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE)	10,76	8,59
Laba Usaha / Total Aset	0,50	4,14
Laba Neto / Total Aset (ROA)	2,13	4,92
Rasio Keuangan (x)		
Total Liabilitas / Total Aset	0,80	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas	4,05	0,75
Pendapatan Neto / Total Aset	0,16	0,57
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	1,23	1,69
EBITDA / Total Pembayaran Utang (Debt Service Coverage Ratio (DSCR))	0,41	0,59
Laba Sebelum Bunga & Pajak / Beban Bunga (*Interest Coverage Ratio* (ICR))	2,76	7,99

Berikut merupakan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan yang memiliki rasio keuangan dipersyaratkan:

No	Peminjam	Kreditur	Perjanjian Pinjaman	Rasio Keuangan yang disyaratkan	Pemenuhan Perseroan dan Entitas Anak atas Rasio-rasio keuangan
1	CCT	Sindikasi Bank Konvensional (BNI, Mandiri, BRI, BPD Papua, BPD Kalteng, BPD Maluku & Maluku Utara) Bank Syariah (BSI)	Akta Perjanjian Pembiayaan Sindikasi No. 5 tertanggal 20 November 2025 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Sindikasi No. 6 tertanggal 20 November 2025	Ekuitas selalu positif Debt to Equity Ratio (DER) maks 6,25X Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 100%	CCT telah memenuhi persyaratan dengan ekuitas positif, DER 4,2x dan DSCR 150%.
2	BPI dan SEAPI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	fasilitas kredit Term Loan (Pseudo R/C – CO menurun) dengan maksimum plafon Rp330,0 miliar	- Current Ratio min 1:1 - DER maks 2:1 - DSCR min 1:1 - Rasio Modal Kerja Bersih min 1.4 kali	BPI dan SEAPI telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 3,7:1, DER 0,7:1, DSCR 1,3:1, dan Rasio Modal Kerja Bersih 5,5 kali.
3	BPI	PT Bank MNC International Tbk.	Perjanjian Pinjaman No 168 Tanggal 12 Desember 2025 - Pinjaman Rekening Koran Rp 40,0 miliar - SKBDN, L/C, T/R Rp 43,0 miliar - Pinjaman Tetap Rp 75,0 miliar - Pinjaman Investasi Rp 40,4 miliar	- DER ≤ 3 x - Loan to Ebitda Ratio ≤ 3,5 x - DSCR ≥ 1,5 x - Interest Coverage Ratio ≥ 1,5 x	BPI telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,6x, Loan to EBITDA ratio 0,5x, DSCR 1,51x dan Interest Coverage Ratio 2,9x
4	BPI	PT Bank Nationalnobu Tbk.	fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) I dengan maksimum plafond Rp200,0 miliar	Menjaga *Current Ratio* minimal 100%. Menjaga *Debt Equity Ratio* maksimal 4x. Menjaga *Debt*	BPI telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 373%, DER 0,6x dan DSCR 1,51x.

No	Peminjam	Kreditur	Perjanjian Pinjaman	Rasio Keuangan yang disyaratkan	Pemenuhan Perseroan dan Entitas Anak atas Rasio-rasio keuangan
			fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan maksimum plafon Rp50,0 miliar	*Service Coverage Ratio* minimal 1.1x.	
5	VKTR	PT Bank Central Asia Tbk	Rekening Koran (R/K) & Fasilitas Kredit Multi	Current Ratio min. 1x	VKTR telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 2,32x.
6	VKTR	PT Bank MNC International Tbk.	Perjanjian Pinjaman untuk fasilitas kredit modal kerja pperasional	• Equity Ratio ≤3x • Loan to EBITDA Ratio ≤5x • DSCR ≥1,5x • Interest Coverage Ratio ≥1,5x	VKTR telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,4x, Loan to EBITDA ratio 1,4x. Rasio keuangan DSCR dan ICR VKTR adalah sebesar 0,6x dan 1,2x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, VKTR selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari VKTR di Bank adalah Lancar. Dengan demikian, VKTR tidak secara serta-merta dinyatakan cidera janji sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
7	BMI	PT Bank MNC International Tbk.	Fasilitas Kredit dalam bentuk Pinjaman Tetap dan/atau Bank Garansi	• Debt to Equity Ratio maksimal 3x • Loan to Ebitda maksimum 3.5 x • Interest Coverage Ratio minimal 1,5x • Debt Service Coverage Ratio minimal 1,5x	BMI telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,7x, Loan to EBITDA 1,0x, Interest Coverage Ratio 1,5x. Rasio keuangan DSCR BMI adalah sebesar 0,4x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, BMI selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari BMI di Bank adalah Lancar. Dengan demikian, BMI tidak secara serta-merta dinyatakan cidera janji sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
8	MKN	PT Bank MNC International Tbk.	Fasilitas Pinjaman Kredit Jangka Pendek Fasilitas Pinjaman Investasi (jangka Panjang)	• Debt to Equity Ratio ≤ 3 x • Loan to Ebitda Ratio ≤ 3,5 x • DSCR ≥ 1,5 • Interest Coverage Ratio ≥ 1,5 x	MKN telah memenuhi persyaratan dengan DER 3,0x, Loan to EBITDA 2,4x, dan Interest Coverage Ratio 4,6x. Rasio keuangan DSCR MKN adalah sebesar 0,4x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, MKN selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari MKN di Bank adalah Lancar. Dengan demikian, MKN tidak secara serta-merta dinyatakan cidera janji berdasarkan perjanjian ini.

No	Peminjam	Kreditur	Perjanjian Pinjaman	Rasio Keuangan yang disyaratkan	Pemenuhan Perseroan dan Entitas Anak atas Rasio-rasio keuangan
9	BMC	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Fasilitas Kredit Investasi (KI)	• Current Ratio minimal 1,0 kali • Debt to equity Ratio maksimal 2,1 kali dan • Debt Service coverage Ratio minimal 100%	BMC telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 2,1x, DER 0,5x dan DSCR 462%
12	Golden Sands Oasis Ltd (Perseroan, BPI, BMI, VKTR)	Indies Special Opportunities III & IV Ltd, Watiga Trust Ltd	Facility Agreement	DER < 1,00x Net Worth or equity, IDR 2 Tn	BPI, BMI, VKTR telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,6x; 0,7x; dan 0,4x Perseroan telah memenuhi persyaratan dengan Equity Rp4,6 Triliun

Faktor Risiko

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko kesulitan mencari mitra strategis dan implementasi rencana kerja sama dengan mitra tersebut dalam pengembangan bisnis.

B. RISIKO RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko penurunan jumlah pesanan dari pelanggan
2. Risiko persaingan usaha
3. Risiko fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku
4. Risiko pelanggaran regulasi dan/atau pencemaran lingkungan hidup
5. Risiko atas perubahan rencana penggunaan dana dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil PMHMETD V

C. RISIKO UMUM

1. Risiko krisis ekonomi secara global
2. Risiko politik dan keamanan di Indonesia
3. Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing
4. Risiko perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
5. Risiko konflik atau ketegangan sosial

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI

1. Risiko harga saham Perseroan yang mengalami fluktuasi
2. Risiko likuiditas saham Perseroan
3. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Tabel berikut merupakan informasi ringkas mengenai Anak Perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama Entitas	Domisili	Bidang Usaha	Tahun Pendirian/ Tahun Beroperasi	Persentase Kepemilikan (%)
KEPEMILIKAN SECARA LANGSUNG					
1.	PT Bakrie Metal Industries (BMI)	Bekasi	Pabrikasi baja bergelombang dan "*multiplate*"	1982	99,99

No.	Nama Entitas	Domisili	Bidang Usaha	Tahun Pendirian/ Tahun Beroperasi	Persentase Kepemilikan (%)
2.	PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99
3.	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR)	Jakarta	Kendaraan listrik dan usaha lainnya terkait kendaraan listrik	2007	24,41
4.	PT Kreasindo Jaya Utama (KJU)	Jakarta	Perdagangan	2009	99,99
5.	PT Modula Sustainability Indonesia (MSI)	Jakarta	Jasa konstruksi	2022	60,00
6.	Golden Sand Oasis Ltd (GSO)	British Virgin Islands	Investasi	2024	100,00
	KEPEMILIKAN SECARA TIDAK LANGSUNG				
	Melalui BMI				
1.	PT Bakrie Pipe Industries (BPI)	Jakarta	Pabrikasi pipa baja	1979	99,99
2.	PT Bakrie Construction (BCons)	Jakarta	Konstruksi baja	1986	98,23
3.	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR)	Jakarta	Kendaraan listrik dan usaha lainnya terkait kendaraan listrik	2007	14,23
4.	PT Suluh Ardhi Engineering (SAE)	Jakarta	Konstruksi bangunan sipil	2008	70,00
5.	PT Bakrie Pipeline Indonesia (BPLI)	Jakarta	Konstruksi bangunan sipil	2024	60,00
	Melalui BIIN				
1.	PT Bakrie Gas (BG)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,50
2.	PT Bakrie Gasindo Utama (BGU)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,50
3.	PT Bakrie Java Energy (BJE)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,99
4.	PT Energas Daya Pratama (EDP)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,50
5.	PT Bakrie Power (BP)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	1994	99,99
6.	PT Bangun Infrastruktur Nusantara (BIN)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99
7.	PT Bakrie Oil & Gas Infrastructure (BOGI)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99
8.	PT Bakrie Telco Infrastructure (BTelco)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,50
9.	PT Bakrie Toll Indonesia (BTI)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99
10.	PT Bakrie Port Indonesia (BPort)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,50
11.	PT Bakrie Mina Tirta (BMT)	Jakarta	Perdagangan umum	2017	70,00
12.	PT Multi Kontrol Nusantara (MKN)	Jakarta	Jasa informasi teknologi, telekomunikasi, sistem integrasi, multimedia dan jaringan	1984	99,93
	Melalui VKTR				
1.	PT Bakrie Autoparts (BA)	Bekasi	Pabrikasi besi cor dan komponen otomotif	1976	99,99
2.	PT VKTR Sakti Industries (VSI)	Magelang	Industri karoseri kendaraan bermotor	2023	60,00

No.	Nama Entitas	Domisili	Bidang Usaha	Tahun Pendirian/ Tahun Beroperasi	Persentase Kepemilikan (%)
3.	PT Sarana Ekomobilitas Indonesia (SEI)	Jakarta	Perdagangan besar suku cadang kendaraan bermotor	2023	99,00
Melalui BPI					
1.	PT South East Asia Pipe Industries (SEAPI)	Jakarta	Pabrikasi pipa baja	2001	99,86
2.	PT Bakrie Pipeline Indonesia (BPLI)	Jakarta	Konstruksi bangunan sipil	2024	20,00
Melalui BA					
1.	PT Braja Mukti Cakra (BMC)	Bekasi	Industri suku cadang kendaraan bermotor	1986	50,00
2.	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM)	Tangerang	Industri suku cadang kendaraan bermotor	1986	99,90
3.	PT Bakrie Komponen Mobilitas (BKM)	Bekasi	Industri suku cadang kendaraan bermotor	2024	99,90
Melalui BP					
1.	PT Bakrie Darmakarya Energi (BDE)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2011	98,00
2.	PT Kuala Tanjung Power (KTP)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2010	99,00
3.	PT Helio Synar Energi (HSE)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2021	99,75
4.	PT Bakrie Energi Transisi (BET)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2023	99,00
Melalui BIN					
1.	PT Bakrie Mina Tirta (BMT)	Jakarta	Perdagangan umum	2017	30,00
Melalui BTI					
1.	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	Bekasi	Pembangunan dan pengelolaan jalan tol	2008	99,99
Melalui MKN					
1.	PT Graha Multimedia Nusantara (GMN)	Jakarta	Jasa internet dan TV kabel	2007	99,96
2.	PT Cipta Wisesa (CTW)	Jakarta	Perdagangan umum	2013	99,00
3.	PT Starbit Technology Nusantara (STN)	Jakarta	Informasi teknologi, infrastruktur dan jasa	2007	75,00
Melalui CTW					
1.	PT System Energi Nusantara (SEN)	Jakarta	Perdagangan umum	2008	99,00
Melalui MSI					
1.	PT Modula Tiga Dimensi (MTD)	Jakarta	Jasa konstruksi	2022	80,00

Kebijakan Dividen

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan

dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan hukum yang berlaku serta kebutuhan dan rencana bisnis Perseroan, Perseroan dapat membagi dividen tunai kepada seluruh pemegang saham setiap tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain. Dengan tidak mengurangi hak Perseroan untuk menentukan lain, saat ini kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Net Profit After Income Tax	Dividen Payout Ratio
Rp 0 hingga 250 miliar	5 – 10%
Di atas Rp 250 miliar	11 – 15%

Masing-masing perusahaan terbuka, entitas anak/unit usaha dan perusahaan terasosiasi menjalankan kebijakan dividen secara independen.

Keterangan secara terperinci mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat di dalam Bab X di Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD V, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPS tanggal 27 Februari 2026 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD V dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) Saham Biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 61/2026. Hasil RUPS tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web BEI pada tanggal 2 Maret 2026, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Oleh karena itu, Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD V kepada para Pemegang Saham dengan menawarkan sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp4.765.751.471.134 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat Rupiah). Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V tersebut dikeluarkan dari saham portepel yang akan dicatatkan di BEI.

Setiap pemegang saham Perseroan yang memegang 27 (dua puluh tujuh) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB mempunyai 14 (empat belas) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang diterbitkan untuk PMHMETD V ini mewakili sebanyak 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD V.

Sebelum PMHMETD V ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	28 Agustus 1989	2.850.000	2.850.000
Pencatatan atas saham para pendiri dalam bentuk Company Listing	9 Maret 1990	16.150.000	19.000.000
Private Placement I	27 November 1991	978.969	19.978.969
Private Placement II	10 Januari 1992	1.031	19.980.000
HMETD I	4 Juni 1993	1.080.000	21.060.000
Saham Bonus I	22 Juni 1994	31.590.000	52.650.000
HMETD II	14 Juli 1994	189.540.000	242.190.000
Pemecahan Saham (*Stock Split*)	7 Agustus 1995	242.190.000	484.380.000
Saham Bonus II	17 Januari 1997	1.453.140.000	1.937.520.000
Penambahan Modal Non HMETD	31 Oktober 2001	36.812.880.000	38.750.400.000
Penggabungan Saham I	17 Maret 2005	-31.000.320.000	7.750.080.000
HMETD III	6 Mei 2005	19.220.198.400	26.970.278.400
Penggabungan Saham II	6 Maret 2008	-13.485.139.200	13.485.139.200
HMETD IV & Waran Seri I	24 Maret 2008	80.236.578.240	93.721.717.440
Saham Ditempatkan & Disetor Penuh*)	1 April 2011	88	93.721.717.528
Penambahan Modal Non HMETD I**)	15 Desember 2016	3.300.000.000	97.021.717.528
Penambahan Modal Non HMETD II**)	31 Maret 2017	16.458.094.820	113.479.812.348
Penambahan Modal Non HMETD III**)	12 September 2017	55.751.960	113.535.564.308
Penambahan Modal Non HMETD IV**)	3 April 2018	7.624.865.069	121.160.429.377
Penambahan Modal Non HMETD V**)	21 Mei 2018	623	121.160.430.000
Penggabungan Saham III	31 Mei 2018	-109.044.386.000	12.116.043.000

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penambahan Modal Non HMETD VI**)	12 Desember 2018	8.655.934.000	20.771.977.000
Penambahan Modal Non HMETD VII**)	27 Februari 2019	91.076.480	20.863.053.480
Penambahan Modal Non HMETD VIII**)	29 Maret 2021	297.811.781	21.160.865.261
Penambahan Modal Non HMETD IX**)	22 Desember 2022	923.618.948	22.084.484.209
Penambahan Modal Non HMETD X**)	29 November 2023	99.527.840.300	121.612.324.509
Penambahan Modal Non HMETD XI**)	8 Desember 2023	38.445.133.000	160.057.457.509
Penambahan Modal Non HMETD XII**)	10 Desember 2024	13.359.375.000	173.416.832.509

Keterangan:
*) Dari total Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 4.719.798.720, jumlah waran yang dikonversi menjadi saham sampai dengan berakhirnya periode pelaksanaan waran tanggal 1 April 2011 adalah sebanyak 88 lembar.
**) Merupakan konversi dari beberapa Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang didapat dari PT EDI Indonesia selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar				
Seri A (Nominal Rp5.687)	**A**	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	**B**	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	**C**	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	**D**	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	**E**	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Jumlah Modal Dasar		**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
Saham Seri A				
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Jumlah Saham Seri A		**19.375.800**	**110.186.762.400**	
Saham Seri B				
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21
Jumlah Saham Seri B		**368.128.800**	**293.030.524.800**	
Saham Seri C				
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.383.920	3,89
Jumlah Saham Seri C		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**	
Saham Seri D				
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33
Jumlah Saham Seri D		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**	
Saham Seri E				
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17
Levoca Enterprise Lte	E	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14
Jumlah Saham Seri E		**159.988.282.300**	**1.919.859.387.600**	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**173.416.832.509**	**4.764.177.722.771**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**490.196.869.141**	**5.882.362.429.953**	**-**

PMHMETD V

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V yaitu sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham yang berasal dari portepel atau mewakili 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD V, dengan Harga Pelaksanaan Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp4.765.751.471.134 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat Rupiah). Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V tersebut dikeluarkan dari saham portepel yang akan dicatatkan di BEI.

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD V ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 melalui BEI serta di luar Bursa, sesuai dengan POJK 32/2015 dan POJK 14/2019. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Port Fraser International Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.857.777.917 saham atau sebesar 22,41% yang akan memperoleh sebanyak 20.148.477.438 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 004/PORT/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Port Fraser International Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada PT Bakrie Capital Indonesia ("BCI") yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Port Fraser International Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

Fountain City Investment Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.445.133.000 saham atau sebesar 22,17% yang akan memperoleh sebanyak 19.934.513.407 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 005/FCIL/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Fountain City Investment Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada BCI yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Fountain City Investment Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

BCI sebagai pihak yang akan menerima sebanyak 40.082.990.845 HMETD dari Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD tersebut berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2026 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.124.398.514.785 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah). BCI memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang diterima, dengan adanya bukti kecukupan dana berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka BCI selaku Pembeli Siaga Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Siaga Penawaran Umum Terbatas V PT Bakrie & Brothers Tbk No. 70 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, yang juga didukung dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga tertanggal 26 Juni 2026, telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan porsi sebanyak-banyaknya 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham dengan harga pelaksanaan yang sama yaitu Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.641.352.956.349 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah). BCI memiliki dana yang cukup selaku pembeli siaga, dengan adanya bukti kecukupan dana berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

Mengingat bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD V adalah sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) saham, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) setelah pelaksanaan PMHMETD V.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD V dan sesudah PMHMETD V dengan asumsi Pemegang Saham Utama yaitu Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd tidak ikut ambil bagian dan mengalihkan kepada BCI sebagai pihak yang menerima dan melaksanakan HMETD, sedangkan pemegang saham lainnya mengambil seluruh saham dalam PMHMETD V dengan menggunakan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026:

Keterangan	Sebelum PMHMETD V				Sesudah PMHMETD V		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp5.687)	**A**	19.375.200	110.186.762.400	0,00	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	**B**	368.128.800	293.030.524.800	0,06	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	**C**	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	**D**	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	**E**	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Jumlah Modal Dasar		**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**	**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
Saham Seri A							
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Jumlah Saham Seri A		**19.375.200**	**110.186.762.400**		**19.375.200**	**110.186.762.400**	
Saham Seri B							
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21	368.128.800	293.030.524.800	0,14
Jumlah Saham Seri B		**368.128.800**	**293.030.524.800**		**368.128.800**	**293.030.524.800**	
Saham Seri C							
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29	2.230.423.800	506.306.202.600	0,85
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.378.920	3,89	6.754.243.960	1.533.213.378.920	2,56
Jumlah Saham Seri C		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**	
Saham Seri D							
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33	4.039.155.449	399.876.389.451	1,53
Jumlah Saham Seri D		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**	
Saham Seri E							
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41	38.857.777.917	466.293.335.004	14,76
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17	38.445.133.000	461.341.596.000	14,60
Levoca Enterpirese Lte	E	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78	36.290.653.137	435.487.837.644	13,78
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76	17.795.138.888	213.541.666.656	6,76
PT Biofuel Indo Sumatra	E	-	-	-	1.156.516.044	13.878.192.528	0,44
R.A. Sri Dharmayanti	E	-	-	-	6.856.370	82.276.440	0,00
Armansyah Yamin	E	-	-	-	2.082.784	24.993.408	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14	77.270.972.393	927.251.668.716	29,34
PT Bakrie Capital Indonesia	E	-	-	-	40.082.990.845	480.995.890.140	15,22
Jumlah Saham Seri E		**159.988.282.300**	**1.919.859.387.600**		**249.908.121.378**	**2.998.897.456.536**	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**173.416.832.509**	**4.764.177.722.771**	**100,00**	**263.336.671.587**	**5.843.215.791.707**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**490.196.869.141**	**5.882.362.429.953**		**400.277.030.063**	**4.803.324.361.017**	

***)** *Port Fraser International Ltd berdasarkan Surat Pernyataan No. 004/PORT/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 dan Fountain City Investment Ltd berdasarkan Surat Pernyataan No. 005/FCIL/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 menyatakan bahwa mereka selaku PSU Perseroan tidak akan melaksanakan HMETD nya dan mengalihkan kepada BCI tanpa ditawarkan terlebih dahulu kepada Masyarakat.*

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD V dengan kondisi seluruh pemegang saham tidak ikut ambil bagian dalam PMHMETD V dan asumsi BCI akan melaksanakan HMETD dari pengalihan Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd serta berperan menjadi Pembeli Siaga untuk seluruh sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham dalam PMHMETD V dengan menggunakan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026:

Keterangan	Sebelum PMHMETD V				Sesudah PMHMETD V		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar							
Seri A (Nominal Rp5.687)	**A**	19.375.200	110.186.762.400	0,00	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	**B**	368.128.800	293.030.524.800	0,06	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	**C**	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	**D**	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	**E**	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Jumlah Modal Dasar		**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**	**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	**100,00**
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:							
Saham Seri A							
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Jumlah Saham Seri A		**19.375.200**	**110.186.762.400**		**19.375.200**	**110.186.762.400**	
Saham Seri B							
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21	368.128.800	293.030.524.800	0,14
Jumlah Saham Seri B		**368.128.800**	**293.030.524.800**		**368.128.800**	**293.030.524.800**	
Saham Seri C							
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29	2.230.423.800	506.306.202.600	0,85
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.378.920	3,89	6.754.243.960	1.533.213.378.920	2,56
Jumlah Saham Seri C		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**	
Saham Seri D							
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33	4.039.155.449	399.876.389.451	1,53
Jumlah Saham Seri D		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**	
Saham Seri E							
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41	38.857.777.917	466.293.335.004	14,76
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17	38.445.133.000	461.341.596.000	14,60
Levoca Enterpirese Lte	E	9.219.385.798	110.632.629.576	5,32	9.219.385.798	110.632.629.576	3,50
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76	11.718.750.000	140.625.000.000	4,45
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14	47.067.898.585	564.814.783.020	17,87
PT Bakrie Capital Indonesia	E	-	-	-	89.919.839.078	1.079.038.068.936	34,15
Jumlah Saham Seri E		**159.988.282.300**	**1.919.859.387.600**		**249.908.121.378**	**2.998.897.456.536**	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**173.416.832.509**	**4.764.177.722.771**	**100,00**	**263.336.671.587**	**5.843.215.791.707**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**490.196.869.141**	**5.882.362.429.953**		**400.277.030.063**	**4.803.324.361.017**	

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikian HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD dan Distribusi HMETD

Para pemegang saham yang berhak atas HMETD adalah pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dengan kondisi dimana seluruh pemegang saham Perseroan yang sahamnya sudah berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. HMETD dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026.

2. Pengalihan dan perdagangan HMETD

Para Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui perantara pedagang efek/ pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI dengan Akta Jual Beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Untuk HMETD yang tidak terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI, pemilik HMETD dapat mengalihkan HMETD yang dimilikinya dengan melakukan transaksi jual beli antara pemilik HMETD dengan pembeli HMETD melalui BAE, dan dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
- Akta Jual Beli;
- Fotokopi bukti jati diri penjual dan pembeli; dan
- SBHMETD asli yang telah diisi dan ditandatangani penjual pada pernyataan penjualan HMETD dan pembeli pada permohonan registrasi.

Segala biaya yang timbul dalam rangka perdagangan HMETD tersebut menjadi beban Pemegang HMETD atau Calon Pemegang HMETD.

3. Bentuk HMETD

Karena seluruh pemegang saham Perseroan sudah berbentuk *scripless*, maka HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elektronik dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian di KSEI.

4. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan dibawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

Diasumsikan harga pasar per satu saham = Rpa

Harga saham PMHMETD V = Rpr

Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD V = A

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V = R

$$\text{Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD} = \frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)}$$

$$= RpX$$

Harga HMETD per Saham = RpX – Rpr

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00096/BEI/12-2022 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia.

5. Penggunaan HMETD

HMETD yang diterbitkan digunakan bagi Pemegang yang Berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan, HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan dan HMETD hanya dapat diperjualbelikan dengan cara dititipkan secara kolektif kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Kinerja saham Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir

	Jun'25	Jul'25	Agt'25	Sep'25	Okt'25	Nov'25	Des'25	Jan'26	Feb'26	Mar'26	Apr'26	Mei'26
Harga Tertinggi (Rp)	30	30	44	61	55	57	127	264	216	236	240	224
Harga Terendah (Rp)	26	25	26	31	40	38	62	102	92	107	101	118
Total Volume Perdagangan (dalam miliar)	5,56	6,29	25,02	91,52	35,16	64,24	370,19	937,66	1.410,71	4.626,33	8.107,56	4.017,04

Informasi mengenai penghentian perdagangan saham Perseroan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir di Bursa Efek

Saham Perseroan dihentikan perdagangannya untuk sementara oleh BEI pada tanggal 12 Desember 2025 dikarenakan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor. Perdagangan saham perseroan kembali dibuka mulai sesi I tanggal 15 Desember 2025.

Selanjutnya, Saham Perseroan kembali dihentikan perdagangannya untuk sementara oleh BEI pada tanggal 16 Desember 2025 dikarenakan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Perdagangan saham perseroan kembali dibuka mulai sesi I tanggal 30 Desember 2025.

Sebagai tindak lanjut dari penghentian sementara perdagangan saham Perseroan tersebut, Perseroan melakukan Public Expose Insidentil pada tanggal 17 Desember 2025 di mana Manajemen Perseroan melakukan paparan kinerja dan strategis bisnis, situasi terkini terkait pergerakan saham Perseroan dan implementasi keuangan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat

Saham Treasuri

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki saham treasuri.

Persetujuan untuk melakukan PMHMETD V

Untuk melakukan PMHMETD ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS tanggal 27 Februari 2026 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2026.

Berdasarkan Surat Bank Mayapada No. 083/EXT/CB-BMI/II/26 tanggal 26 Februari 2026 perihal Surat Menyetujui Permohonan Persetujuan dan Pencabutan Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Bakrie & Brothers Tbk, Perseroan telah menerima persetujuan tertulis dan pencabutan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD V yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Bank Nobu No. 0153/EXT/CL/KP-JLN/III/2026 tanggal 5 Maret 2026 perihal Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) PT Bakrie & Brothers Tbk selaku Corporate Guarantor atas Fasilitas Kredit PT Bakrie Toll Indonesia, BTI telah memperoleh persetujuan tertulis terkait dengan pelaksanaan PUT V yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Selain pihak-pihak yang berwenang tersebut di atas, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan lain terkait dengan rencana PMHMETD V.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif yang dapat dikonversikan menjadi saham, selain dari yang ditawarkan dalam PMHMETD V.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD V

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD V (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi PMHMETD V) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp4.362.417.779.559 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada BTI, anak perusahaan Persero**an ("Rencana Penggunaan Dana I**"), yang selanjutnya akan menggunakan dana tersebut dengan perincian sebagai berikut:

    a. Sebesar Rp3.662.417.779.559 (tiga triliun enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan digunakan oleh BTI, anak perusahaan Perseroan, untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman kepada Hartman International Pte. Ltd. ("**Hartman**") segera setelah penerimaan dana PMHMETD V. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 14 November 2025 antara BTI dengan Hartman ("**Perjanjian Fasilitas BTI – Hartman**"), berikut rincian mengenai ketentuan pinjaman:

Kreditur	:	Hartman
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nama fasilitas	:	*Facility Agreement* tanggal 14 November 2025
Nilai fasilitas	:	Rp4.816.000.000.000
Jumlah fasilitas yang telah dicairkan	:	Rp3.662.417.779.559 (per tanggal 31 Desember 2025, dan tidak ada perubahaan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan)
Jumlah yang akan dibayarkan	:	Rp3.662.417.779.559
Sisa pinjaman	:	Rp0
Suku bunga	:	17% per tahun (untuk pembayaran bunga pinjaman akan menggunakan sumber kas internal)
Jatuh tempo	:	Tiga tahun sejak tanggal utilisasi pertama atas pinjaman ini, yakni tanggal ketika seluruh syarat pendahuluan telah dipenuhi, dikecualikan, dan/atau ditangguhkan oleh Hartman ("**Jatuh Tempo**")
Penggunaan pinjaman	:	Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk tujuan pembelian: a. 35% dari saham CCT yang telah ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan *fully diluted basis* dari PT Waskita Toll Road; dan b. 55% dari saham CCT yang telah ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan *fully diluted* basis dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Riwayat utang	:	Perjanjian Fasilitas tanggal 14 November 2025 antara BTI dengan Hartman

Prosedur atau persyaratan pelunasan	:	BTI dapat melakukan pembayaran atas pinjaman dengan cara sebagai berikut: a. mengalihkan piutang milik BTI terhadap pihak ketiga kepada Hartman; b. mengalihkan aset bergerak dan/atau aset tetap milik BTI kepada Hartman; c. melakukan konversi atas pinjaman menjadi saham dalam BTI; atau d. dengan cara lain sepanjang cara pembayaran yang akan ditetapkan disetujui sepenuhnya secara tertulis oleh para pihak. Pelunasan dipercepat wajib dilakukan dalam hal: a. BTI wajib membayar kembali pinjaman beserta bunga dalam mata uang yang sama dengan mata uang pinjaman yang diterima BTI. b. BTI menjamin untuk membayar kembali pinjaman beserta bunga selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu Jatuh Tempo. c. Pembayaran pinjaman dan bunga serta setiap jumlah lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini wajib dibayar oleh BTI kepada kreditur melalui rekening bank kreditur yang ditentukan kemudian. d. BTI berhak atas kebijakannya sendiri untuk melakukan pelunasan dipercepat setiap saat baik secara penuh maupun sebagian dengan tetep tunduk sepenuhnya pada ketentuan *make-whole*.
Denda	:	Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat atas pinjaman, baik seluruhnya maupun sebagian yang dilaksanakan sebelum lewatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif perjanjian, maka akan dikenakan *make-whole*. Adapun besaran *make-whole* tersebut adalah sejumlah seluruh bunga yang seharusnya terutang dan/atau dibayarkan atas pinjaman (atau bagian pinjaman tersebut) sampai dengan bulan ke-12 sejak tanggal efektif. BTI memiliki kecukupan dana untuk pembayaran denda tersebut yang berasal dari kas internal BTI.
Status Jaminan Setelah Pelunasan	:	Pada tanggal pelunasan, gadai sebagai jaminan yang diberikan oleh BTI, akan dilepaskan dan dibebaskan sepenuhnya dan perjanjian gadai terkait (beserta seluruh surat kuasa dan pemberian wewenang yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai) akan berakhir secara otomatis dan tidak lagi

		mempunyai kekuatan dan akibat hukum lebih lanjut. Penerima gadai wajib secepatnya menandatangani dan menyampaikan kepada pemberi gadai dokumen yang membuktikan pelepasan dan pembebasan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atas gadai, menghapus pencatatan gadai atas saham yang digadaikan dari daftar pemegang saham, termasuk pemberitahuan pelepasan penuh, dab mengembalikan seluruh dokumen asli yang berkaitan dengan gadai termasuk sertifikat saham terkait.

BTI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Hartman sehubungan dengan pembayaran seluruh pokok pinjaman berdasarkan Surat No. 005/BOD/BTI/IV/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Prepayment Notification of Hartman Facility.

Adapun, BTI akan membayarkan beban bunga Perjanjian Fasilitas BTI – Hartman dengan menggunakan kas internal Perseroan.

b. Sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh BTI, anak perusahaan Perseroan, untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2025 kepada PT Bank Nationalnobu Tbk ("**Bank Nobu**") segera setelah penerimaan dana PMHMETD V. Berdasarkan Akta *Facility Agreement* No. 21 tanggal 19 November 2025 yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat antara BTI dan Bank Nobu ("**Perjanjian Fasilitas BTI – Bank Nobu**"), berikut rincian mengenai ketentuan pinjaman:

Kreditur	:	Bank Nobu
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nama fasilitas	:	Akta *Facility Agreement* No. 21 tanggal 19 November 2025
Nilai pinjaman	:	Rp700.000.000.000 (per tanggal 31 Desember 2025, dan tidak ada perubahaan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan)
Jumlah dan fasilitas yang akan dibayarkan	:	Rp700.000.000.000
Sisa saldo utang setelah pembayaran pinjaman	:	Rp0
Suku bunga	:	7% per tahun dan apabila dilunasi akan dikenakan tambahan sebesar 3% per tahun yang dihitung sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal pembayaran (untuk pembayaran bunga pinjaman akan menggunakan sumber kas internal)
Jatuh tempo	:	Satu tahun sejak tanggal penarikan ("**Tanggal Jatuh Tempo Awal**") atau dua tahun sejak tanggal penarikan apabila BTI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada agen yang disampaikan paling lambat 30 hari sebelum Tanggal Jatuh Tempo Awal ("**Pemberitahuan Perpanjangan**") dengan tunduk pada:

		a. BTI telah membayar biaya perpanjangan perjanjian fasilitas; b. BTI telah menyerahkan valuasi tanah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05100 yang berlokasi di Jalan Terusan Hang Lekir IV No 31-33, Grogol Selatan, Kebayoran Lama; dan c. pengisian kembali rekening cadangan BTI oleh BTI hingga paling sedikit sebesar saldo minimum rekening cadangan BTI, yaitu dana yang setara dengan jumlah pembayaran bunga yang dijadwalkan berikutnya untuk periode 12 bulan sehubungan dengan pinjaman ini ("**Saldo Minimum Rekening Cadangan BTI**"), selambat-lambatnya pada tanggal Pemberitahuan Perpanjangan.
Penggunaan pinjaman	:	Fasilitas pinjaman digunakan untuk: a. pembayaran sebagian dari harga pembelian atas pengambilalihan saham atas 35% dari saham CCT yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road dan 55% saham CCT yang dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berdasarkan dokumen pengambialihan dan pelunasan pinjaman pemegang saham eksisting yang masih terutang oleh CCT kepada PT Waskita Toll Road dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan/atau b. pembayaran biaya, ongkos, dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen pembiayaan, termasuk pendanaan rekening cadangan BTI guna memenuhi Saldo Minimum Rekening Cadangan BTI yang mencakup pembayaran bunga sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal pembayaran bunga yang jatuh 12 bulan setelah tanggal penarikan.
Riwayat utang	:	Akta *Facility Agreement* No. 21 tanggal 19 November 2025 yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat antara BTI dan Bank Nobu
Prosedur atau persyaratan pelunasan	:	**a. Pelunasan pinjaman** BTI wajib melunasi pinjaman secara penuh pada tanggal pelunasan akhir. **b. Pelunasan premi** Apabila partisipasi pemberi pinjaman dalam suatu pinjaman dilunasi atau dilunasi dipercepat, maka BTI wajib:

		(i) memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada agen paling lambat 5 hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana dapat disetujui oleh kreditur mayoritas) untuk melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh pinjaman pada tanggal pembayaran bunga yang berlaku; dan (ii) berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga serta wajib membayar *redemption premium* sebesar 3% per tahun yang dihitung sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal pembayaran.
Denda	:	a. Jumlah *Make-Whole* Pertama Apabila pinjaman dilunasi atau dibayar lebih awal sebelum hari terakhir 24 Mei 2026 , maka BTI wajib membayar sejumlah tambahan yang dihitung berdasarkan formula berikut yaitu Jumlah agregat pinjaman (termasuk bunga yang seharusnya telah terakru pada tanggal pembayaran bunga) dikurang jumlah agregat pinjaman yang dilunasi atau dibayar lebih awal beserta setiap bunga yang telah terakhir dan masih terutang pada tanggal pembayaran. b. Jumlah *Make-Whole* Kedua Apabila pinjaman dilunasi atau dibayar lebih awal setelah tanggal 24 Mei 2026 namun sebelum 24 November 2026, BTI wajib membayar sejumlah tambahan yang dihitung berdasarkan formula berikut yaitu maka BTI wajib membayar sejumlah tambahan yang dihitung berdasarkan formula berikut yaitu Jumlah agregat pinjaman (termasuk bunga yang seharusnya telah terakru pada tanggal pembayaran bunga) dikurang jumlah agregat pinjaman yang dilunasi atau dibayar lebih awal beserta setiap bunga yang telah terakhir dan masih terutang pada tanggal pembayaran. BTI memiliki kecukupan dana untuk pembayaran denda tersebut yang berasal dari kas internal BTI.

Status Jaminan Setelah Pelunasan	:	Dalam hal pinjaman telah dinyatakan lunas oleh agen jaminan, maka seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini akan dilepaskan tanpa hak regres terhadap dan tanpa pernyataan atau jaminan apa pun, atas seluruh hak masing-masing berdasarkan setiap dokumen transaksi.

BTI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Nobu sehubungan dengan pembayaran seluruh pokok pinjaman berdasarkan Surat No. 006/BOD-BTI/IV/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Pemberitahuan Rencana Pelunasan Fasilitas Bank Nobu.

Adapun, BTI akan membayarkan beban bunga Perjanjian Fasilitas BTI – Bank Nobu dengan menggunakan kas internal Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana I di atas, dana hasil PMHMETD V akan segera disalurkan Perseroan kepada BTI setelah Perseroan menerima dana PMHMETD V atau selambat-lambatnya bulan Agustus 2026 dalam bentuk pinjaman yang jumlahnya sesuai dengan besarnya pembayaran BTI kepada Hartman dan Bank Nobu. BTI akan melakukan pembayaran kepada Hartman dan Bank Nobu segera setelah dana dari hasil PMHMETD V Perseroan diterima BTI atau selambat-lambatnya bulan Agustus 2026. BTI merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 99% ("**Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI**").

BTI melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman Hartman dan Bank Nobu menggunakan dana PMHMETD V melalui Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI dengan pertimbangan untuk mengurangi beban keuangan dan juga menjaga rasio pinjaman terhadap ekuitas Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 6 April 2026 sehubungan dengan Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI yang akan digunakan oleh BTI untuk pembayaran pinjaman kepada Hartman dan Bank Nobu.

Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 April 2026 antara Perseroan dengan BTI.

Perseroan dan BTI telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 April 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

Kreditur	:	Perseroan
Tingkat suku bunga pinjaman	:	2,50% per tahun
Jatuh tempo pinjaman	:	12 bulan
Jaminan yang diberikan BTI atas pinjaman Perseroan	:	Untuk menjamin seluruh kewajiban pembayaran pinjaman dan bunga, BTI bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan Perseroan kemudian.
Ketentuan Material	:	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada BTI dalam jumlah Rp4.343.750.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja BTI atau afiliasinya.

Apabila BTI telah melakukan pelunasan pinjaman di atas kepada Perseroan, maka Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan kembali oleh Perseroan untuk pengembangan usaha kedepannya sehubungan dengan proyek jalan tol yang baru.

2. Sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk setoran modal kepada BCONS, anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan BCONS untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dalam proyek yang akan dikerjakan BCONS yaitu Proyek Pertamina Hulu Rokan: North Dumai Development ("PHR NDD"), yang akan diberikan melalui penyetoran modal dari Perseroan kepada BCONS ("**Rencana Penggunaan Dana II**").

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana II, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bakrie & Brothers Tbk tanggal 6 April 2026.

3. Sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk setoran modal kepada CCT, anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan CCT untuk kebutuhan pematangan lahan yang merupakan bagian dari persiapan infrastruktur dasar berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.04 tertanggal 7 Juli 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IX Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.6 tertanggal 11 Mei 2021 dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) ("**Rencana Penggunaan Dana III**").
4. Sedangkan sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya gaji, sewa kantor dan biaya operasional lainnya antara lain mencakup pembelian peralatan kantor (kertas, tinta printer dan alat tulis), langganan daya & jasa (biaya internet, langganan software/ aplikasi bulanan dan air minum galon) dan jamuan & transportasi (biaya konsumsi saat rapat dan transportasi lokal untuk karyawan) ("**Rencana Penggunaan Dana IV**").

Untuk selanjutnya Rencana Penggunaan Dana I, Rencana Penggunaan Dana II, Rencana Penggunaan Dana III, dan Rencana Penggunaan Dana IV secara bersama-sama disebut sebagai "**Rencana Penggunaan Dana**".

Rencana Penggunaan Dana I

Rencana Penggunaan Dana I termasuk dalam level 3 pengunaan dana bagi Perseroan berdasarkan Pasal 9 POJK 40/2025.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana I, Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI merupakan (a) suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan (b) suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 (yang mana nilainya melebihi 50% ekuitas Perseroan, yakni 92,98% terhadap ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025). Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 dalam hal transaksi afiliasi memenuhi ketentuan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d POJK 17/2020 mengingat Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI merupakan transaksi antara perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) dengan perusahaan terkendali (dalam hal ini BTI) yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99%. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK 17/2020, sehubungan dengan Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI, Perseroan hanya wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut serta dokumen pendukungnya kepada OJK 2020 paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi Pemberian Pinjaman Perseroan-BTI.

Terkait dengan Perjanjian Fasilitas BTI – Hartman, nilai perjanjian fasilitas tersebut melebihi 50% ekuitas Perseroan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 Perseroan telah melakukan (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud; (b) mengumumkan keterbukaan informasi tertanggal 8 September 2025 kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui rencana penerimaan pinjaman; dan (c) terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 10 September 2025 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakrie & Brothers Tbk No. 19 tanggal 10 September 2025 karena nilai dari rencana penerimaan pinjaman melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d.1. POJK 17/2020.

Sesuai keterangan Perseroan, terkait rencana perolehan pinjaman oleh BTI untuk membiayai pengambilalihan CCT, Perseroan telah (a) menggunakan penilai sebagaimana dibuktikan dengan informasi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 3 September 2025 dan 31 Juli 2025 dan Laporan Penilai No. 00113/2.0162-00/BS/10/0153/1/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 serta Laporan Pendapat Kewajaran No. 00115/2.0162-00/BS/10/0153/1/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025, (b) mengumumkan Keterbukaan Informasi pada tanggal 3 September 2025 dan 31 Juli 2025, serta (c) telah memperoleh persetujuan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 2025 berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 19 tanggal 10 September 2025 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Namun, sehubungan dengan realisasi transaksi dan dalam kaitannya dengan pengungkapan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 8 September 2025, kami memahami terdapat ketidaksesuaian terkait dengan pihak yang memberikan pinjaman. Sesuai keterangan Perseroan, pada awalnya Perseroan memulai proses *fund raising* untuk mendukung transaksi pengambilalihan CCT kepada beberapa calon investor dan pemberi pinjaman, termasuk diantaranya ADH Jackpot SPV Limited dan Hartman yang menunjukkan ketertarikan untuk melakukan investasi dengan Perseroan. ADH Jackpot SPV Limited menunjukkan minat yang lebih konkret terhadap rencana investasi pada CCT dimana Perseroan menjalani proses negosiasi secara intensif dengan ADH Jackpot SPV Limited. Dengan demikian, Perseroan memfokuskan proses diskusi dan *due diligence* dengan ADH Jackpot SPV Limited sebagai calon sumber pendanaan utama.

Dalam perkembangannya, ADH Jackpot SPV Limited tidak dapat memenuhi komitmennya untuk dapat memberikan pinjaman kepada BTI dan menarik diri dari pemberian pinjaman kepada BTI tersebut. Sesuai keterangan Perseroan, mundurnya ADH Jackpot SPV Limited disebabkan oleh proses *due diligence* yang mengalami keterlambatan dari jadwal yang sebelumnya ditentukan karena adanya pengaruh kondisi sosial dan keamanan di Indonesia pada periode akhir Agustus hingga awal September 2025, termasuk kerusuhan di Jakarta dan adanya *travel advisory/restriction* yang menghambat kunjungan tim ADH Jackpot SPV Limited ke Indonesia dan persetujuan internal ADH Jackpot SPV Limited yang tidak dapat diperoleh. Adapun, ADH Jackpot SPV Limited kemudian mengumumkan penghentian rencana untuk melakukan pembiayaan dengan Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2025.

Berdasarkan, keputusan ADH Jackpot SPV Limited yang membatalkan dan menarik diri dari proses tersebut, Perseroan segera melakukan pencarian alternatif sumber pendanaan lainnya dengan melakukan pendekatan kepada alternatif sumber pendanaan sebelumnya, termasuk salah satunya adalah Hartman dan Perseroan juga mengajukan permohonan perpanjangan atas Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) tertanggal 23 Juli 2025 untuk mengubah tanggal penyelesaian menjadi 28 November 2025 berdasarkan Amandemen ke-II PPJB tertanggal 14 November 2025.

Pada tanggal 7 November 2025, Perseroan menerima term sheet penawaran dari Hartman. Berdasarkan term sheet pendanaan tersebut, pemberian pinjaman oleh Hartman memiliki ketentuan pinjaman yang lebih menguntungkan bagi BTI dibandingkan dengan ketentuan pemberian pinjaman dari ADH Jackpot SPV Limited yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 3 September 2025 dan 31 Juli 2025 dan yang telah disetujui RUPS serta merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan untuk dapat menyelesaikan transaksi pengambilalihan CCT.

Realisasi atas rencana transaksi secara substansi masih sesuai dengan substansi yang dimintakan persetujuannya kepada para pemegang saham dalam RUPSLB tertanggal 10 September 2025. Hal ini dikarenakan (a) pemberi pinjaman tetap bukan suatu pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, BTI, maupun CCT sesuai dengan keterangan Perseroan dan (b) pinjaman tersebut digunakan dalam kaitannya dengan pengambilalihan CCT (yang juga dimintakan persetujuannya dalam agenda berbeda dalam RUPSLB tertanggal 10 September 2025).

Selain itu, tindakan Direksi Perseroan atau BTI ini diambil untuk memenuhi kewajibannya sebagai Direksi yang melakukan pengurusan untuk, dan demi, kepentingan (*fiduciary duty*) Perseroan dan BTI sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) UUPT, dengan mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya ketidaksesuaian terkait pemberi pinjaman dan konsekuensi apabila pengambilalihan CCT batal, maka tindakan Direksi Perseroan atau BTI yang terpaksa mengganti pemberi pinjaman guna menghindari konsekuensi yang dapat merugikan Perseroan atau BTI baik secara ekonomi maupun reputasi.

Rencana Penggunaan Dana II

Rencana Penggunaan Dana II termasuk dalam level 2 pengunaan dana bagi Perseroan berdasarkan Pasal 9 POJK 40/2025.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana II, terkait pemberian modal kerja proyek BCONS yang akan diberikan melalui penyetoran modal dari Perseroan kepada BCONS ("**Setoran Modal Perseroan-BCONS**") selambat-lambatnya Desember 2026, dana hasil penyetoran modal kepada BCONS akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dalam proyek yang akan dikerjakan BCONS yaitu Proyek Pertamina Hulu Rokan: North Dumai Development ("PHR NDD"), dengan kebutuhan modal kerja sebesar Rp 200 miliar yang rencananya akan digunakan selambat-lambatnya dalam 12 bulan sejak Setoran Modal Perseroan-BCONS diterima. BCONS telah memperoleh pengumuman sebagai peserta tender dengan penawaran terbaik dari Pertamina

Hulu Rokan sehubungan dengan tender Proyek PHR NDD melalui surat No. EVAL-13 REV:2 Oktober 2024 tertanggal 16 April 2026, dimana pemberian Award atas proyek PHR NDD akan ditargetkan di bulan Juli 2026. Adapun modal kerja proyek tersebut antara lain seperti pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya akomodasi dan biaya lain-lain terkait proyek. Komponen biaya lain-lain tersebut antara lain meliputi:
1.Mobilisasi dan demobilisasi personel serta peralatan proyek;
2.Sewa fasilitas dan sarana pendukung proyek;
3.Transportasi dan logistik proyek;
4.Perizinan dan administrasi proyek;
5.Utilitas dan kebutuhan operasional lapangan;
6.Kebutuhan HSE (Health, Safety, and Environment);
7.Biaya pendukung proyek lainnya yang diperlukan selama masa pelaksanaan proyek.
Biaya-biaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek konstruksi dan EPC guna memastikan proyek dapat dilaksanakan sesuai jadwal, spesifikasi teknis, serta standar keselamatan yang dipersyaratkan.

Setoran Modal Perseroan-BCONS merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan karena tidak terdapat dampak yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Namun demikian, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) POJK 42/2020 mengingat Setoran Modal Perseroan-BCONS merupakan transaksi antara perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) dengan perusahaan terkendali (dalam hal ini BCONS) yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99%. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) POJK 42/2020, sehubungan dengan Setoran Modal Perseroan-BCONS, Perseroan hanya wajib untuk melaporkan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi Setoran Modal Perseroan-BCONS.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana II yang akan diberikan melalui Setoran Modal Perseroan-BCONS merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi pemenuhan kewajiban transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Rencana Penggunaan Dana III

Rencana Penggunaan Dana III termasuk dalam level 4 pengunaan dana bagi Perseroan berdasarkan Pasal 9 POJK 40/2025.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana III, dana hasil PMHMETD V akan disalurkan Perseroan kepada CCT segera setelah Perseroan menerima dana hasil PMHMETD V dalam bentuk penyertaan modal selambat-lambatnya Desember 2026, yang kemudian akan segera digunakan CCT untuk kebutuhan pematangan lahan milik negara yang akan digunakan sehubungan pembangunan rest area di jalan tol Cimanggis-Cibitung dengan luas lahan sekitar 12 Hektar sebesar Rp40 miliar yang merupakan bagian dari persiapan infrastruktur dasar dengan total kebutuhan Rp109 miliar yang merupakan kewajiban CCT berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.04 tertanggal 7 Juli 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IX Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.6 tertanggal 11 Mei 2021 dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Sehubungan dengan proses pematangan lahan, saat ini CCT sedang dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama dengan PT DMS Laguna. Adapun untuk sisa kebutuhan persiapan infrastruktur dasar, CCT akan melakukan pendanaan dari pihak eksternal seperti perbankan.

Sedangkan untuk pengembangan area komersial sehubungan pembangunan rest area di jalan tol Cimanggis-Cibitung, akan dilakukan melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company /* "**JVC**") bersama Partner usaha CCT yaitu PT DMS Laguna dimana CCT akan melakukan penyertaan modal pada JVC berdasarkan MoU tertanggal 24 Juni 2026. Pembentukan JVC tersebut saat ini sedang dalam proses penyusunan kesepakatan dengan rangkaian administrasi pembentukan JVC setelahnya. PT DMS Laguna tidak terafiliasi dengan CCT.

Lokasi Pembangunan Rest Area berada pada Jalan Tol Cimanggis Cibitung di Area KM 63, dengan perkiraan membutuhkan beberapa perizinan antara lain : BPJT dan JBH (untuk desain), ke Kementerian PU (untuk perizinan kesesuaian Tata Ruang), persetujuan ke pemerintah daerah (untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang), untuk ijin lingkungan ke DLH (Amdal, SPPL, UKL dan UPL), ke Dinas Tata Ruang (untuk mendapatkan PBG), Dinas Pemadam kebakaran (untuk sistem dan pencegahan kebakaran). Pembangunan Rest Area Jalan Tol Cimanggis Cibitung direncanakan selesai pada September 2028. Estimasi biaya konstruksi kebutuhan berdasarkan skematik desain dengan jumlah sampai dengan Rp300 Miliar sudah termasuk kebutuhan untuk persiapan infrastruktur dasar (Nilai tersebut dimungkinkan disesuaikan kembali setelah desain secara definitif disetujui oleh Regulator (BPJT dan JBH)).

Pengurusan perizinan sehubungan dengan rest area akan dimulai pada bulan Agustus, termasuk pengurusan NIB, persetujuan tata ruang, persetujuan lingkungan hidup, andalalin, pengurusan PBG dan persetujuan BPJT dimana seluruh proses ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember 2026.

Setoran Modal Perseroan – CCT merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan karena tidak terdapat dampak yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Namun demikian, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) POJK 42/2020 mengingat Setoran Modal Perseroan – CCT merupakan transaksi antara perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) dengan perusahaan terkendali (dalam hal ini CCT) yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99%. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) POJK 42/2020, sehubungan dengan Setoran Modal Perseroan – CCT, Perseroan hanya wajib untuk melaporkan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi Setoran Modal Perseroan – CCT.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana III yang akan diberikan melalui Setoran Modal Perseroan – CCT merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi pemenuhan kewajiban transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Rencana Penggunaan Dana IV

Rencana Penggunaan Dana IV termasuk dalam level 1 pengunaan dana bagi Perseroan berdasarkan Pasal 9 POJK 40/2025.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana IV, apabila merupakan suatu transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

Realisasi rencana penggunaan dana akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia dan Perseroan bertanggungjawab atas realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD V ini. Sesuai dengan POJK 40/2025 dan Peraturan BEI No. I-E, Perseroan wajib (a) membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ("**LRPD**") hasil PMHMETD V ini kepada OJK dan BEI secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan dengan mana LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan PMHMETD V; dan (b) mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD V dalam setiap RUPS tahunan, sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD V telah direalisasikan ("**Kewajiban Realisasi Penggunaan Dana**").

Apabila terdapat dana hasil PMHMETD V yang belum direalisasikan dan akan direalisasikan oleh Perseroan setelah berlakunya POJK 40/2025 (yakni tanggal 21 Juni 2026), maka Perseroan wajib melakukan Kewajiban Realisasi Penggunaan Dana, termasuk penyampaian LRPD kepada masyarakat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan dengan mana LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan PMHMETD V, dengan bentuk dan isi LRPD sesuai ketentuan POJK 40/2025.

Apabila setelah Pernyataan Pendaftaran efektif, dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah Rencana Penggunaan Dana dan perubahan tersebut dilakukan setelah berlakunya POJK 40/2025 (yakni tanggal 21 Juni 2026), maka Perseroan wajib:

(a) memperoleh persetujuan RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal (i) perubahan salah satu unsur Rencana Penggunaan Dana paling sedikit 20% atau lebih dari total dana hasil PMHMETD V; (ii) perubahan lokasi yang menyebkan perubahan Rencana Penggunaan Dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; dan (iii) perubahan Rencana Penggunaan Dana yang berbeda dengan Rencana Penggunaan Dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai di atas 10% dari total dana hasil PMHMETD V; atau

(b) melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi (i) perubahan salah satu unsur Rencana Penggunaan Dana kurang dari 20% dari total dana hasil PMHMETD V; (ii) perubahan lokasi menyebkan perubahan Rencana Penggunaan Dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; atau (iii) perubahan Rencana Penggunaan Dana yang berbeda dengan Rencana Penggunaan Dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS dengan nilai paling banyak 10% dari total dana hasil PMHMETD V.

Selain itu, Perseroan juga akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perubahan Rencana Penggunaan Dana, termasuk, apabila berlaku, ketentuan mengenai transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK 42/2020.

Apabila terdapat dana hasil PMHMETD V yang belum direalisasikan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil PMHMETD V atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga.

Berdasarkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2008, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk melaksanakan PMHMETD IV. Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Perseroan No.0211/BB/CS-Bapepam/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV PT Bakrie & Brothers Tbk Periode 30 September 2008, seluruh dana hasil PMHMETD IV Perseroan telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Pembelian Saham :
   - Saham BUMI dengan nilai pembelian sebesar Rp32.100.823.736.072;
   - Saham ENRG dengan nilai pembelian sebesar Rp1.249.000.000.000; dan
   - Saham ELTY dengan nilai pembelian sebesar Rp3.695.487.360.000.
2. Digunakan untuk pembayaran :
   - Pelunasan atas pinjaman yang telah diperoleh Perseroan dari Odickson Finance dengan jumlah sebesar Rp926.629.136.285. Pinjaman Odickson tersebut telah digunakan untuk membiayai pelaksanaan hak Perseroan dalam mengambil bagian saham-saham baru yang dikeluarkan oleh BSP dalam rangka HMETD II; dan
   - Pelunasan atas pinjaman yang telah diperoleh Perseroan dari Odickson Finance sebesar Rp1.606.866.262.424. Pinjaman Odickson tersebut telah digunakan untuk membiayai pelaksanaan hak Perseroan dalam mengambil bagian saham-saham baru yang dikeluarkan oleh BTEL dalam rangka HMETD I.
3. Sebesar Rp331.006.237.222 telah digunakan untuk pembayaran sebagian Hutang Perseroan.
4. Sebesar Rp208.476.387.997 telah digunakan untuk pembayaran biaya Penawaran Umum.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil PMHMETD V, Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,211% dari nilai PMHMETD V, yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,051%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,019%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,021% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,012%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,003%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya jasa penasihat keuangan sebesar 1,110%; (adapun PT Danatama Makmur Sekuritas sebagai penasihat keuangan Perseroan tidak terafiliasi dengan Perseroan)
- Biaya lain-lain 0,047%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar (jika diperlukan), biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Grup Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025, yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan dan Entitas Anak Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali No. 00115/2.0902/AU.1/10/1792-4/1/VI/2026 pada tanggal 26 Juni 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp18.895.899 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.596.001 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp15.299.898 juta dengan rincian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman jangka pendek	1.836.563
Utang usaha	
Pihak ketiga	888.582
Pihak berelasi	18.403
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	45.926
Pihak berelasi	29.933
Beban akrual	280.284
Uang muka pelanggan	92.951
Utang pajak	50.395
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	345.747
Liabilitas sewa	7.217
Total Liabilitas Jangka Pendek	**3.596.001**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain jangka panjang	275.069
Provisi pelapisan jalan tol	30.908
Liabilitas pajak tangguhan - neto	102.949
Liabilitas imbalan pascakerja	244.425
Utang pihak berelasi	87.740
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	14.557.479
Liabilitas sewa	1.328
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.299.898
TOTAL LIABILITAS	**18.895.899**

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Nationalnobu Tbk	700.259
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	550.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	170.238
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000
PT Mandala Raya Yuwana	95.760
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	88.179
PT Bank Central Asia Tbk	63.452
PT Bank Jakarta	49.950
PT Bank Ina Perdana Tbk	15.652
Lain-lain (dibawah Rp10 miliar)	3.073
Total	**1.836.563**

Utang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Pihak Ketiga	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	279.604
PT Waskita Beton Precast Tbk	184.100
PT Krakatau Posco	73.059
PT Yahukimo Bersatu Indonesia	43.254
PT Indal Steel Pipe	40.703
Cumic Steel Limited	27.090
PT Jasa Marga Tollroad Operator	17.912
PT Inti Sumber Baja Sakti	16.030
PT Solusi Prima Raya	11.534
PT Krakatau Steel	11.035
PT KHI Pipe Industries	3.945
Lain-lain (dibawah Rp10 miliar)	180.136
Total pihak ketiga	888.582
Pihak Berelasi	
Lain-lain (dibawah Rp10 miliar)	18.403
Total	**906.985**

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Sampai dengan 1 bulan	549.483
1 bulan – 3 bulan	69.299
3 bulan – 6 bulan	67.375
6 bulan – 1 tahun	8.946
Lebih dari 1 tahun	211.882
Total	**906.985**

Utang usaha yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	93.204
PT Waskita Beton Precast Tbk	67.300
PT Solusi Prima Raya	11.534
Koperasi Setia Kawan	6.642
PT Graha Sarana Metal	5.234
PT Amin Golden Marine	4.771
PT Baralogam Multijaya	3.599
PT Sentra Karya Mandiri	3.203
PT Pindad Enjiniring Indonesia	2.016
PT Solusi Metalindo Jaya	1.532
PT Media Framing Indonesia	1.430
PT Tyotech Mandiri Raya	1.405
PT Dharma Metal Indonesia	1.366
PT Sarana Wira Reksa	1.276
PT Tanjung Sari Prima Sentosa	1.245
Lainnya (dibawah Rp1 miliar)	6.125
Total	**211.882**

Utang usaha yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi sebagian besar merupakan utang kepada pemasok yang terkait dengan proyek kepada pelanggan. Perseroan belum melunasi kewajiban utang usaha yang telah jatuh tempo dikarenakan Perseroan masih dalam proses penagihan kepada pelanggan sebagai sumber utama pembayaran utang. Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo ini menggunakan arus kas hasil usaha selambat-lambatnya pada akhir tahun 2026. Perseroan masih menjaga hubungan yang baik dengan para pemasok tersebut dan mereka memahami kondisi Perseroan untuk bersama-sama menjaga kelangsungan proyek jangka panjang. Tidak ada denda atau bunga keterlambatan atau kesepakatan perpanjangan terkait utang usaha tersebut.

Utang Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Pihak ketiga	
PT Yahukimo Bersatu Indonesia	15.739
Lain-lain (dibawah Rp10 miliar)	30.187
Sub-total	45.926
Pihak berelasi	
PT Provices Indonesia	18.893
Dana Pensiun Bakrie (dalam likuidasi)	7.508
Lain-lain (dibawah Rp10 miliar)	3.532
Sub-total	29.933
Total	**75.859**

Beban Akrual

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Proyek	140.140
Bunga	66.665
Gaji, upah dan tunjangan	19.572
Pesangon	7.182
Pengangkutan	6.597
Listrik, air dan telepon	2.912
Jasa profesional	2.666
Lain-lain (dibawah Rp1 miliar)	34.550
Total	**280.284**

Uang Muka Pelanggan

Uang muka pelanggan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 92.951 juta yang berasal dari pihak ketiga.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
PT Catur Prima Perkasa	21.065
Konsorsium Petro-BPI-CPM	27.474
PT Tridaya Esa Pakarty	8.614
KSO PT Timas Suplindo-PT Rekayasa Industri	6.420
PT Adara Investago Corpora	5.246
PT Sentul City Tbk	4.800
PT Benteng Anugerah Sejahtera	4.797
KSO Adhi Hutama Nindya Abipraya	3.713
PT Kencana Graha Pertiwi	3.304
PT Bertie Sukses Makmur	2.757
PT Intisubmber Bajasakti	2.583
Lain-lain (dibawah Rp1 miliar)	2.178
Total	**92.951**

Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	3
Pasal 21	13.062
Pasal 23 dan 26	440
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	1.144
Pasal 15	12
Pasal 21	14.075
Pasal 23/26	6.209
Pasal 25	989
Pasal 29	9.364
Pajak pertambahan nilai	5.097
Total	**50.395**

Utang Lain-lain Jangka Panjang

Utang lain-lain jangka panjang merupakan utang CCT, Entitas Anak, kepada PT Waskita Toll Road, per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp275.069 juta.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Provisi pelapisan jalan tol merupakan cadangan atas beban pelapisan aspal, perkerasan beton, penggantian marka dan pengecatan di masa mendatang, dengan saldo per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.908 juta.

Liabilitas Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Liabilitas imbalan pascakerja	15.218
Penyisihan penurunan nilai persediaan	1.449
Penyisihan penurunan nilai piutang	1.370
Aset tetap	(120.986)
Neto	**(102.949)**

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal tahun	231.458
Beban (penghasilan) diakui pada laporan konsolidasian:	
Laba rugi	39.911
Penghasilan komprehensif lain	(981)
Akuisisi entitas anak	316
Pembayaran manfaat	(25.753)
Kontribusi grup	(526)
Saldo akhir tahun	**244.425**

Utang Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
KSO Bakrie Construction –	
PT Suluh Ardhi Engineering	57.803
Lain-lain (dibawah Rp10 miliar)	29.937
Total	**87.740**

Pinjaman Jangka Panjang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	
Pinjaman sindikasi	9.715.210
Hartman International Ltd.	3.662.418
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	543.266
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	321.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	277.571
PT Bank Nationalnobu Tbk	190.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.627
PT Bank Ina Perdana Tbk	24.186
PT Rekapital Aset Indonesia	13.580
Lain-lain (dibawah Rp10 miliar)	10.610
Subtotal	14.788.468
Mata uang asing (USD)	
Indies Special Opportunities III Ltd	114.758
Total	14.903.226
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(345.747)
Total Bagian Jangka Panjang	**14.557.479**

Pada 31 Desember 2025, saldo fasilitas pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.606.457
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.003.587
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.003.587
PT Bank Syariah Indonesia	1.302.332
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	601.076
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	150.269
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	150.269
Total	9.817.577
Dikurangi biaya transaksi belum diamortisasi	(102.367)
Neto	**9.715.210**

Seluruh pinjaman jangka panjang diperoleh dari pihak ketiga.

Liabilitas Sewa

Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas sewa kepada:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
PT Orix Indonesia Finance	4.197
PT BOT Finance Indonesia	1.461
PT Toyota Astra Finance	1.021
PT Maybank Indonesia Finance	753
PT Dipo Star Finance	609
Lain-lain (dibawah Rp1 miliar)	504
Total	8.545
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(7.217)
Bagian Jangka Panjang	**1.328**

Berikut ini merupakan rincian pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang di Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
Pinjaman Jangka Pendek				
1	BTI - PT Bank Nationalnobu Tbk.	700.000	Akta Facility Agreement No. 21 tertanggal 19 November 2025 Tujuan – Pembiayaan akuisisi saham CCT Tingkat Bunga – 7% Jaminan: 1. 2 miliar saham BNBR, • 2.100 saham BIIN, • 49,35 juta saham BRMS, • 85,77 juta saham ENRG, • 1,02 miliar saham VKTR; • Tanah di Jl. Terusan Hang Lekir IV, Kebayoran Lama.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga BTI telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
2	BPI - PT Bank Nationalnobu Tbk.	259	Akta Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) tertanggal 25 Juni 2025 Tingkat Bunga – 9,80% Jaminan:	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehinnga BPI telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
			• Tanah, bangunan, dermaga & pabrik a.n. BCons di Serang, Banten; • Mesin pabrik BCons; • Mesin Spiral & Gantry Crane SEAPI; • Unit kantor Bakrie Tower Lt 36; • Corporate Guarantee Perseroan & BCons*).	
3	Perseroan - PT Bank Mayapada International Tbk	550.000	Fasilitas Pinjaman Tetap tertanggal 19 November 2025 Tujuan – Pembiayaan akuisisi saham dan pengalihan atas seluruh piutang berdasarkan *Shareholder Loan* CCT Tingkat Bunga – 12% Jaminan: • SHGB No. 08663 & 08661 a.n. PT Pilar Agra Unggul (PAU) seluas 31.062 m² dan 21.816 m² di Kalideres, Jakarta Barat; • 1,2 miliar lembar saham VKTR milik Perseroan.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehinnga Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
4	MKN - PT Bank MNC International Tbk.	68.958	Fasilitas Kredit tertanggal 13 November 2025 Tujuan – Pembiayaan proyek MKN Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Deposito sebesar Rp5 miliar; • Ruang kantor Lt. 34 SHMSRS No. 5142/XXXV di Bakrie Tower, • Fidusia mesin NOC sebesar Rp20 miliar; • Fidusia piutang sebesar Rp20 miliar; • Tanah & Bangunan SHGB No. 2 a.n. SEAPI di Lampung Selatan; • *Corporate & Payment Guarantee* a.n. BMI*); • *Corporate & Payment Guarantee* a.n. BPI*).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio ≤3x • Loan to Ebitda Ratio ≤3,5x • DSCR ≥1,5 • Interest Coverage Ratio ≥1,5 x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan MKN, hasilnya adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio adalah ≤ 3 x • Loan to EBITDA 2,4x • Interest Coverage Ratio 4,6x. Rasio keuangan DSCR MKN adalah sebesar 0,4x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, MKN selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari MKN di Bank adalah Lancar.
5	BMI - PT Bank MNC International Tbk.	55.237	Fasilitas Kredit tertanggal 30 September 2025 dan Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Tanah & bangunan SHGB No. 2 a.n. SEAPI di Lampung Selatan; • Fidusia mesin & peralatan a.n. SEAPI; • *Corporate Guarantee* a.n. BMI, BPI, dan MKN*).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio ≤3x • Loan to Ebitda Ratio ≤3,5x • DSCR ≥1,5 • Interest Coverage Ratio ≥1,5x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan BMI, hasilnya adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio adalah 0,7x • Loan to EBITDA 1,0x

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
				• Interest Coverage Ratio 1,5x. Rasio keuangan DSCR BMI adalah sebesar 0,4x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, BMI selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari BMI di Bank adalah Lancar.
6	BCONS - PT Bank MNC International Tbk.	33.884	Fasilitas Kredit tertanggal 13 November 2025 Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Tanah & bangunan SHGB No. 2 a.n. SEAPI di Lampung Selatan; • Mesin & peralatan a.n. SEAPI; • Tanah dan bangunan SHGB No. 2687 a.n. BMI di Bekasi Utara • *Corporate Guarantee* a.n. BMI, BPI, dan MKN*).	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga BCons telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
7	VKTR - PT Bank MNC International Tbk.	9.400	Perjanjian Pinjaman untuk fasilitas kredit modal kerja operasional Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Ruang kantor Lt 35 a.n. Perseroan & Lt 37 a.n. BUMM di Bakrie Tower; • *Corporate Guarantee & Payment Guarantee* a.n. BA*).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio ≤3x • Loan to Ebitda Ratio ≤5x • DSCR ≥ 1,5 • Interest Coverage Ratio ≥ 1,5x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan VKTR, hasilnya adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio adalah 0,4x • Loan to EBITDA 1,4x • Interest Coverage Ratio 1,2x. Rasio keuangan DSCR dan ICR VKTR adalah sebesar 0,6x dan 1,2x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, VKTR selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari VKTR di Bank adalah Lancar.
8	BPI - PT Bank MNC International Tbk.	2.760	Fasilitas Kredit tertanggal 1 Oktober 2025 Tujuan – Kegiatan operasional BPI Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Tanah & Bangunan SHGB No. 2 a.n. SEAPI di Lampung Selatan; • Fidusia mesin, peralatan, dan alat angkut a.n. SEAPI; • *Corporate Guarantee* a.n. BMI dan MKN*).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio ≤3x • Loan to Ebitda Ratio ≤3,5x • DSCR ≥ 1,5 • Interest Coverage Ratio ≥ 1,5x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan BPI, hasilnya adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio adalah 0,6x • Loan to EBITDA 0,5x • DSCR 1,51x

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
				• Interest Coverage Ratio 2,9x. Sehingga, BPI telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.
9	BCONS - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	100.000	Fasilitas *Cash Collateral Credit* Tujuan – Penambahan modal kerja **Tingkat Bunga –** 1% Jaminan: • Rekening taplus bisnis sebesar Rp100,0 miliar.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga BCons telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
10	Perseroan - PT Mandala Raya Yuwana	95.760	Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 Februari 2025 (Amandemen 1 pada 17 Februari 2026) Tujuan – modal kerja Perseroan. Tingkat Bunga – 2,50%	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
11	BPI dan SEAPI - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	88.179	Perjanjian Kredit (Kredit Modal Kerja W/A; Import Line;- Bank Garansi; - Fasilitas Forex Line;- Fasilitas Term Loan; - Fasilitas *Cash Collateral*)tertanggal September 2025 Tujuan – Kegiatan operasional dan proyek BPI dan SEAPI Tingkat Bunga – 9,0% Jaminan: • Piutang usaha, persediaan (HRC/pipa), dan mesin produksi (fidusia); • SHMSRS 2 unit kantor di Bakrie Tower; • Tanah & bangunan (HGB) di Pejuang, 1Bekasi; • Mesin utilitas, alat berat, & kendaraan (fidusia).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Current Ratio min 1:1 • Debt to Equity Ratio (DER) 2:1 • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 1:1 • Rasio Modal Kerja Bersih min 1.4 kali Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan BPI dan SEAPI, hasilnya adalah sebagai berikut: • Current Ratio 3,7:1 • Debt to Equity Ratio (DER) 0,7:1 • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,51:1 • Rasio Modal Kerja Bersih 5,5 kali Sehingga, BPI dan SEAPI telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.
12	VKTR - PT Bank Central Asia Tbk	63.452	Rekening Koran (R/K) & Fasilitas Kredit Multi Tingkat Bunga – 9,0% Jaminan: • SHGB No. 31 atas nama PT Bakrie Autoparts (BA) di Bekasi; • Mesin-mesin produksi BA • Persediaan milik VKTR. • *Corporate guarantee* dari Perseroan*)	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Current Ratio min 1x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan VKTR, hasilnya adalah sebagai berikut: • Current Ratio 2,32x Sehingga, VKTR telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.
13	SAE - PT Bank Jakarta	11.000	Fasilitas kredit Cash Collateral **Tingkat Bunga** – 1.75% Jaminan: • Rekening giro sebesar Rp11,0 miliar.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga SAE telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
14	BCONS - PT Bank Jakarta	10.450	Fasilitas Kredit Berjaminan Tunai (Giro) **Tingkat Bunga** – 2,25%	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
			Jaminan: • Rekening giro sebesar Rp11,0 miliar.	BCons telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
15	BA - PT Bank Ina Perdana Tbk.	9.887	Pinjaman Rekening Koran (PRK) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Fasilitas Kredit Investasi (KI) Demand Loan (DL) Tingkat Bunga – 9,75% Jaminan: • Tanah & bangunan SHGB No. 5340 & 291 a.n. BUMM di Tangerang; • Mesin dan peralatan BUMM.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga BA telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
16	VKTR - PT Bank Ina Perdana Tbk.	5.765	Fasilitas KMK dan Fasilitas Bank Garansi Tingkat Bunga – 9.25% Jaminan: • Tanah & bangunan SHGB No. 40 a.n. Perseroan di Palembang; • Piutang Usaha 175% plafon KMK; • Bus/Truk CBU/CKD senilai Rp62,5 miliar; • *Letter of Comfort* Perseroan.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga VKTR telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
Pinjaman Jangka Panjang				
1	CCT - Sindikasi Bank (BNI, Mandiri, BRI, BPD Papua, BPD Kalteng, BPD Maluku & Maluku Utara)	9.715.210	Akta Perjanjian Pembiayaan Sindikasi No. 5 tertanggal 20 November 2025 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Musyarakah Mutanaqishah No. 6 tanggal 20 November 2025 Jangka Waktu – sampai dengan 20 November 2040 Tingkat Bunga – ditetapkan pada tanggal penetapan tingkat suku bunga, yaitu 2 hari kerja sebelum, periode perhitungan bunga, kecuali untuk pertama kalinya adalah pada 2 hari kerja sebelum pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan pertama kali. Jaminan: • Seluruh hak konsesi pengusahaan jalan tol, tagihan dan pendapatan operasional jalan tol; • escrow account, klaim asuransi & bank garansi; • gadai saham • serta corporate guarantee dari pemegang saham.	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Ekuitas selalu positif • Debt to Equity Ratio (DER) maks 6,25x • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 100% Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan CCT, hasilnya adalah sebagai berikut: • Ekuitas positif • Debt to Equity Ratio (DER) adalah 4,2x • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah 150% Sehingga, CCT telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.
2	BTI - Hartman International Pte. Ltd.	3.662.418	Fasilitas Pinjaman Jangka Waktu – 3 tahun Tingkat Bunga – 17 % Jaminan:	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga BTI

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
			• 6.625 saham BTI yang dimiliki oleh PT Bakrie Indo Infrastructure.	telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
3	Perseroan - PT Bank Mayapada International Tbk	543.266	Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran tertanggal 19 November 2025 Jangka Waktu – 5 tahun Tujuan – Pembiayaan akuisisi saham dan pengalihan atas seluruh piutang berdasarkan *Shareholder Loan CCT* Tingkat Bunga – 12% Jaminan: • SHGB No. 08663 & 08661 a.n. PT Pilar Agra Unggul (PAU) seluas 31.062 m² dan 21.816 m² di Kalideres, Jakarta Barat; • 1,2 miliar lembar saham VKTR milik Perseroan.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
4	BPI dan SEAPI - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	321.000	Fasilitas kredit Term Loan (Pseudo R/C – CO menurun) dengan maksimum plafon Rp330,0 miliar Jangka Waktu – 36 bulan Tingkat Bunga – 9,0% Jaminan: • Piutang usaha, persediaan dan mesin produksi (fidusia); • SHMSRS 2 unit kantor di Bakrie Tower Lt 7; • Tanah & bangunan di Pejuang, Bekasi; • Mesin utilitas, alat berat, & kendaraan (fidusia).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Current Ratio min 1:1 • Debt to Equity Ratio (DER) 2:1 • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 1:1 • Rasio Modal Kerja Bersih min 1.4 kali Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan BPI dan SEAPI, hasilnya adalah sebagai berikut: • Current Ratio 3,7:1 • Debt to Equity Ratio (DER) 0,7:1 • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 1,51:1 • Rasio Modal Kerja Bersih 5,5 kali Sehingga, BPI dan SEAPI telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.
5	MKN - PT Bank MNC International Tbk.	151.614	Fasilitas Pinjaman Investasi tertanggal 1 November 2024 Jangka Waktu – sampai dengan 2 Oktober 2032 Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Tanah kosong a.n. PAU di Jakarta Barat • *Corporate & Payment Guarantee* a.n. BMI*).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio ≤3x • Loan to Ebitda Ratio ≤3,5x • DSCR ≥1,5 • Interest Coverage Ratio ≥1,5 x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan MKN, hasilnya adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio adalah ≤3x • Loan to EBITDA 2,4x • Interest Coverage Ratio 4,6x. Rasio keuangan DSCR MKN adalah sebesar 0,4x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, MKN selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
				disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari MKN di Bank adalah Lancar.
6	VKTR - PT Bank MNC International Tbk.	69.197	Perjanjian Pinjaman untuk fasilitas kredit modal kerja *refinancing asset* Jangka Waktu – 96 bulan Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Ruang kantor Lt 35 a.n. Perseroan & Lt 37 a.n. BUMM di Bakrie Tower; • Corporate Guarantee & Payment Guarantee a.n. BA*).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio ≤3x • Loan to Ebitda Ratio ≤5x • DSCR ≥ 1,5 • Interest Coverage Ratio ≥ 1,5x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan VKTR, hasilnya adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio adalah 0,4x • Loan to EBITDA 1,4x • Interest Coverage Ratio 1,2x. Rasio keuangan DSCR dan ICR VKTR adalah sebesar 0,6x dan 1,2x. Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, VKTR selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari VKTR di Bank adalah Lancar.
7	BPI - PT Bank MNC International Tbk.	56.760	Fasilitas Pinjaman Investasi tertanggal 20 Desember 2023 Jangka Waktu – 72 bulan Tingkat Bunga – 10,75% Tujuan – Pembuatan dermaga atau jetty SEAPI Tingkat Bunga – 10,75% Jaminan: • Tanah & Bangunan SHGB No. 2 a.n. SEAPI di Lampung Selatan; • Fidusia mesin, peralatan, dan alat angkut a.n. SEAPI; • Corporate Guarantee a.n. BMI dan MKN*).	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Current Ratio min 1:1 • Debt to Equity Ratio (DER) 2:1 • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 1:1 • Rasio Modal Kerja Bersih min 1.4 kali Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan BPI dan SEAPI, hasilnya adalah sebagai berikut: • Current Ratio 3,7:1 • Debt to Equity Ratio (DER) 0,7:1 • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,51:1 • Rasio Modal Kerja Bersih 5,5 kali Sehingga, BPI telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.
8	BPI - PT Bank Nationalnobu Tbk.	190.000	Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan maksimum plafond Rp50,0 miliar. Fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) I dengan maksimum plafond Rp200,0 miliar. Jangka Waktu – 36 bulan Tingkat Bunga – 9,8% untuk masing-masing fasilitas PRK dan PTA Jaminan:	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Current Ratio min 100% • Debt to Equity Ratio maks 4x • DSCR 1.1x Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan BPI, hasilnya adalah sebagai berikut: • Current Ratio 373% • Debt to Equity Ratio 0,6x • DSCR 1,51x

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
			• Tanah, bangunan, dermaga & pabrik a.n. BCons di Serang, Banten; • Mesin pabrik BCons; • Mesin Spiral & Gantry Crane SEAPI; • Unit kantor Bakrie Tower Lt 36; • Corporate Guarantee Perseroan & BCons*).	Sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus, BPI selalu memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian sehingga sampai dengan saat ini status kolektibilitas dari BPI di Bank adalah Lancar.
9	BMC - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.627	Perjanjian Kredit tertanggal 8 November 2024 Jangka Waktu - 60 bulan **Tingkat Bunga** –9,0**%** Jaminan: • Tanah, bangunan SHBG No. 6031 a.n. BMC di Bekasi, Jawa Barat; • Mesin dan tagihan piutang usaha BMC	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Current Ratio min 1,0x • Debt to Equity Ratio maks 2,1x • DSCR min 100% Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan BMC, hasilnya adalah sebagai berikut: • Current Ratio 2,1x • Debt to Equity Ratio 0,5x • DSCR 462% Sehingga, BMC telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.
10	BA - PT Bank Ina Perdana Tbk.	24.186	Fasilitas Kredit Investasi (KI) Jangka Waktu – 36 bulan **Tingkat Bunga** –9,75**%** Jaminan: • Tanah & bangunan SHGB No. 5340 & 291 a.n. BUMM di Tangerang; • Mesin dan peralatan BUMM.	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga BA telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
11	Perseroan - PT Rekapital Aset Indonesia	13.580	Perjanjian fasilitas pinjaman tertanggal 29 Mei 2019 sebagaimana terakhir kali diubah pada 4 April 2024 Jangka Waktu – sampai dengan 25 Desember 2030 **Tingkat Bunga** –12,0**%** Jaminan – Tidak ada	Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, sehingga Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
12	Golden Sands Oasis Ltd - Indies Special Opportunities III & IV Ltd, Watiga Trust Ltd	114.758	Perjanjian fasilitas tertanggal 19 Juni 2024 Jangka Waktu – 24 bulan **Tingkat Bunga** –15**%**	Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: • Debt to Equity Ratio maks <1,00x • Net Worth or Equity, IDR 2 Tn Berdasarkan perhitungan atas laporan keuangan GSO, hasilnya adalah sebagai berikut: • BPI, BMI, VKTR telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,6x; 0,7x; dan 0,4x • Equity 4,6 Triliun

No.	Peminjam – Kreditur	Jumlah Pinjaman 31 Desember 2025 (jutaan Rupiah)	Sifat dari Pinjaman/ Tingkat Bunga/ Jenis Jaminan yang Diberikan	Pemenuhan terhadap ketentuan terkait liabilitas atas pinjaman dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas
				Sehingga, GSO telah memenuhi semua persyaratan dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian.

*) Sehubungan dengan Corporate Guarantee (Jaminan Korporasi) dan/atau Payment Guarantee dari fasilitas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak (PT BPI, PT MKN, PT BCONS, PT VKTR, dll), risiko rambatan (contagion risk) dapat memberikan dampak material terhadap Perseroan maupun Entitas Anak apabila suatu peristiwa wanprestasi terjadi yang mengakibatkan aktivasi ketentuan cross default atau eksekusi Corporate Guarantee oleh kreditur, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian, meningkatkan kewajiban keuangan, mengganggu likuiditas, meningkatkan risiko pelanggaran covenant, serta memengaruhi kemampuan Perseroan maupun Entitas Anak dalam memperoleh pendanaan baru. Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan adalah dengan melakukan due diligence atau reviu secara berkala perihal penggunaan fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan melihat faktor-faktor sebagai berikut:

- Profil dan kondisi keuangan pemilik proyek/pelanggan/Customer yang akan dikerjakan.
- Track record pembayaran pemilik proyek/pelanggan/Customer.
- Memastikan Entitas Anak memiliki aset yang mencukupi atas fasilitas pinjaman yang didapat.
- Memonitor secara reguler pelaksanaan dan penyelesaian proyek serta pemenuhan kewajiban atas pinjaman oleh Entitas Anak.
- Menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang terintegrasi antara Perseroan dan Entitas Anak.

Berikut ini merupakan rincian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan setelah tanggal Prospektus.

(dalam jutaan Rupiah)

Rincian Kewajiban	Jumlah Kewajiban
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman jangka pendek	129.081
Utang usaha	
Pihak ketiga	353.481
Pihak berelasi	24.138
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	21.291
Pihak berelasi	927
Beban akrual	80.079
Uang muka pelanggan	120.181
Utang pajak	9.210
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka Panjang	221.223
Liabilitas sewa	2.376
Total Liabilitas Jangka Pendek	**961.988**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	68.534
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	3.970
Total Liabilitas Jangka Panjang	**72.504**
TOTAL LIABILITAS	**1.034.492**

Seluruh kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan setelah tanggal Prospektus merupakan kewajiban untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak yang pembayarannya akan bersumber dari hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan meyakini seluruh kewajiban dapat terpenuhi dari sumber kas internal operasional Perseroan dan Entitas Anak.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kontinjensi yang signifikan, selain yang telah diungkapkan dalam bagian "Perjanjian Penting" dalam Prospektus ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN AUDITOR INDEPENDEN PER TANGGAL 26 JUNI 2026

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Pemegang saham dan/atau calon investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Pemegang saham dan/atau calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali No. 00115/2.0902/AU.1/10/1792-4/1/VI/2026 pada tanggal 26 Juni 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	236.650	168.225
Investasi jangka pendek		
Pihak ketiga	1.321.168	845.747
Pihak berelasi	-	9.029
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai		
Pihak ketiga	636.273	755.892
Pihak berelasi	49.276	41.884
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai		
Pihak ketiga	379.561	522.716
Pihak berelasi	8.457	4.974
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang	626.371	957.931
Beban dibayar dimuka	5.676	3.058
Uang muka	307.118	172.972
Pajak dibayar dimuka	146.992	139.381
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	700.605	7.295
Total Aset Lancar	**4.418.147**	**3.629.104**
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi - setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai	31.672	16.911
Investasi pada entitas asosiasi	10.000	10.000
Investasi jangka panjang lainnya	527.524	533.867
Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penyisihan kerugian atas penurunan nilai	2.064.430	1.954.331
Hak pengusahaan jalan tol - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	14.998.392	-
Aset pajak tangguhan - neto	103.701	79.949
Biaya pengembangan proyek	66.278	66.655
Aset tak berwujud - neto	777	727
Aset tidak lancar lainnya	1.346.642	537.945
Total Aset Tidak Lancar	**19.149.416**	**3.200.385**
TOTAL ASET	**23.567.563**	**6.829.489**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman jangka pendek	1.836.563	768.683

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Utang usaha		
Pihak ketiga	888.582	739.905
Pihak berelasi	18.403	21.126
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	45.926	86.103
Pihak berelasi	29.933	28.184
Beban akrual	280.284	151.020
Uang muka pelanggan	92.951	171.183
Utang pajak	50.395	53.863
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pinjaman jangka panjang	345.747	122.250
Liabilitas sewa	7.217	8.247
Total Liabilitas Jangka Pendek	**3.596.001**	**2.150.564**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang lain-lain jangka panjang	275.069	-
Provisi pelapisan jalan tol	30.908	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	102.949	111.667
Liabilitas imbalan pascakerja	244.425	231.458
Utang pihak berelasi	87.740	90.083
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman jangka panjang	14.557.479	325.843
Liabilitas sewa	1.328	8.208
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.299.898	767.259
TOTAL LIABILITAS	**18.895.899**	**2.917.823**
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp5.687, Rp796, Rp227, Rp99 dan Rp12 untuk masing-masing saham Seri A, Seri B, Seri C, Seri D dan Seri E Modal dasar 293.715.580.156 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 173.416.832.509 saham	4.764.178	4.764.178
Tambahan modal disetor	(1.750.758)	(1.750.758)
Komponen ekuitas lainnya	18.308	(86.138)
Saldo laba	821.442	327.590
Subtotal	3.853.170	3.254.872
Kepentingan nonpengendali	818.494	656.794
Ekuitas Neto	**4.671.664**	**3.911.666**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**23.567.563**	**6.829.489**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN NETO	3.742.973	3.869.905
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2.998.589	3.000.428
LABA BRUTO	**744.384**	**869.477**
BEBAN USAHA		
Beban karyawan	245.229	250.990

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Beban umum dan administrasi	252.157	202.712
Beban Penjualan	130.135	132.903
Total Beban Usaha	627.521	586.605
LABA USAHA	**116.863**	**282.872**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Keuntungan dari pengukuran kembali atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya	422.375	-
Keuntungan dari pembelian diskon	320.127	-
Keuntungan selisih kurs - neto	14.002	21.653
Keuntungan atas penjualan aset tetap	971	46.822
Penyisihan penurunan nilai atas piutang	(89.572)	18.214
Beban bunga dan keuangan - neto	(211.555)	(95.492)
Keuntungan atas penyelesaian pinjaman melalui investasi	-	353.464
Kerugian atas dilusi investasi pada entitas anak	-	(280.354)
Lain-lain - Neto	(54.379)	42.051
Penghasilan Lain-lain - Neto	401.969	106.358
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**518.832**	**389.230**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(42.018)	(76.434)
Tangguhan	25.929	23.252
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(16.089)**	**(53.182)**
LABA NETO	**502.743**	**336.048**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	6.141	(2.569)
Perubahan neto atas nilai wajar efek ekuitas tercatat	(174)	(2.424)
Subtotal	5.967	(4.993)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program pensiun	981	14.302
Pajak penghasilan terkait	305	(2.850)
Subtotal	1.286	11.452
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -SETELAH DIKURANGI PAJAK	7.253	6.459
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	**509.996**	**342.507**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.781.880	3.775.298
Pembayaran kas untuk pemasok	(3.140.226)	(3.177.857)
Pembayaran kas untuk karyawan	(467.428)	(430.568)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	174.226	166.873
Penerimaan dari:		
Pajak	84.978	59.091
Bunga	6.918	13.815
Pembayaran untuk:		
Pajak	(197.852)	(184.077)
Bunga	(175.837)	(54.837)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(107.567)**	**865**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (kenaikan) neto piutang lain-lain	112.682	(307.982)
Penerimaan dari:		
Penjualan investasi jangka pendek	3.582	-
Penjualan aset tetap	3.127	79.032
Pembayaran untuk:		
Perolehan hak pengusahaan jalan tol	(9.280)	-
Perolehan aset tetap	(186.424)	(359.471)
Investasi jangka pendek	(404.716)	(425.954)
Uang muka investasi	(750.000)	(151.020)
Uang muka pembelian tanah	-	(152.400)
Biaya pengembangan proyek	-	(4.715)
Penurunan (kenaikan) neto piutang pihak berelasi	(822.349)	7.603
Pembayaran dividen entitas anak	(5.000)	(7.500)
Perolehan entitas anak, neto kas	(3.284.519)	-
Kas neto entitas anak didekonsolidasi	-	(946)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(5.342.897)**	**(1.323.353)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari:		
Pinjaman jangka panjang	4.865.925	422.195
Pinjaman jangka pendek	2.846.749	1.188.785
Pembayaran untuk:		
Pinjaman jangka pendek	(1.793.333)	(919.242)
Pinjaman jangka panjang	(125.200)	(89.540)
Liabilitas sewa	(8.018)	(8.423)
Utang lain-lain jangka panjang	(4.013)	-
Penurunan neto utang pihak berelasi	(2.343)	(1.618)
Penarikan (penempatan) kas di bank yang dibatasi penggunaannya	(260.969)	32.277
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**5.518.798**	**624.434**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**68.334**	**(698.054)**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING ATAS KAS DAN SETARA KAS	**91**	**815**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**168.225**	**865.464**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**236.650**	**168.225**

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Neto	(3,28)	2,94
Laba Usaha	(58,69)	(18,79)
Laba Neto	49,60	27,07
Total Aset	245,09	(3,83)
Total Liabilitas	547,60	(34,30)
Total Ekuitas	19,43	47,02
Rasio Usaha (%)		
Laba Usaha / Pendapatan Neto	3,12	7,31
Laba Neto / Pendapatan Neto	13,43	8,68
Laba Usaha / Total Ekuitas	2,50	7,23
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE)	10,76	8,59
Laba Usaha / Total Aset	0,50	4,14
Laba Neto / Total Aset (ROA)	2,13	4,92
Rasio Keuangan (x)		
Total Liabilitas / Total Aset	0,80	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas	4,05	0,75
Pendapatan Neto / Total Aset	0,16	0,57
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	1,23	1,69
EBITDA / Total Pembayaran Utang (*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR))	0,41	0,59
Laba Sebelum Bunga & Pajak / Beban Bunga (*Interest Coverage Ratio* (ICR))	2,76	7,99

Berikut merupakan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan

No	Peminjam	Kreditur	Perjanjian Pinjaman	Rasio Keuangan yang disyaratkan	Pemenuhan Perseroan dan Entitas Anak atas Rasio-rasio keuangan
1	CCT	Sindikasi Bank Konvensional (BNI, Mandiri, BRI, BPD Papua, BPD Kalteng, BPD Maluku & Maluku Utara) Bank Syariah (BSI)	Akta Perjanjian Pembiayaan Sindikasi No. 5 tertanggal 20 November 2025 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Sindikasi No. 6 tertanggal 20 November 2025	Ekuitas selalu positif Debt to Equity Ratio (DER) maks 6,25X Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 100%	CCT telah memenuhi persyaratan dengan ekuitas positif, DER 4,2x dan DSCR 150%.
2	BPI dan SEAPi	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	fasilitas kredit Term Loan (Pseudo R/C – CO menurun) dengan maksimum plafon Rp330,0 miliar	- Current Ratio min 1:1 - DER maks 2:1 - DSCR min 1:1 - Rasio Modal Kerja Bersih min 1.4 kali	BPI dan SEAPI telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 3,7:1, DER 0,7:1, DSCR 1,3:1, dan Rasio Modal Kerja Bersih 5,5 kali.
3	BPI	PT Bank MNC International Tbk.	Perjanjian Pinjaman No 168 Tanggal 12 Desember 2025	- DER ≤ 3 x	BPI telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,6x, *Loan to EBITDA* ratio 0,5x, dan Interest Coverage Ratio 2,9x

No	Peminjam	Kreditur	Perjanjian Pinjaman	Rasio Keuangan yang disyaratkan	Pemenuhan Perseroan dan Entitas Anak atas Rasio-rasio keuangan
			- Pinjaman Rekening Koran Rp 40,0 miliar - SKBDN, L/C, T/R Rp 43,0 miliar - Pinjaman Tetap Rp 75,0 miliar - Pinjaman Investasi Rp 40,4 miliar	- Loan to Ebitda Ratio ≤ 3,5 x - DSCR ≥ 1,5 x - Interest Coverage Ratio ≥ 1,5 x	
4	BPI	PT Bank Nationalnobu Tbk.	fasilitas Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) I dengan maksimum plafond Rp200,0 miliar fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan maksimum plafon Rp50,0 miliar	Menjaga *Current Ratio* minimal 100%. Menjaga *Debt Equity Ratio* maksimal 4x. Menjaga *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1.1x.	BPI telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 373%, DER 0,6x dan DSCR 1,3x.
5	VKTR	PT Bank Central Asia Tbk	Rekening Koran (R/K) & Fasilitas Kredit Multi	Current Ratio min. 1x	VKTR telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 2,32x.
6	VKTR	PT Bank MNC International Tbk.	Perjanjian Pinjaman untuk fasilitas kredit modal kerja pperasional	• Equity Ratio ≤3x • Loan to EBITDA Ratio ≤5x • DSCR ≥1,5x • Interest Coverage Ratio ≥1,5x	VKTR telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,4x, *Loan to EBITDA ratio 1,4x, Interest Coverage ratio* 1,2x
7	BMI	PT Bank MNC International Tbk.	Fasilitas Kredit dalam bentuk Pinjaman Tetap dan/atau Bank Garansi	• Debt to Equity Ratio maksimal 3x • Loan to Ebitda maksimum 3.5 x • Interest Coverage Ratio minimal 1,5x • Debt Service Coverage Ratio minimal 1,5x	BMI telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,7x, Loan to EBITDA 1,0x, *Interest Coverage Ratio* 1,5x.
8	MKN	PT Bank MNC International Tbk.	Fasilitas Pinjaman Kredit Jangka Pendek Fasilitas Pinjaman Investasi (jangka Panjang)	• Debt to Equity Ratio ≤ 3 x • Loan to Ebitda Ratio ≤ 3,5 x • DSCR ≥ 1,5 • Interest Coverage Ratio ≥ 1,5 x	MKN telah memenuhi persyaratan dengan DER 3,0x, Loan to EBITDA 2,4x, dan *Interest Coverage Ratio* 4,6x.
9	BMC	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Fasilitas Kredit Investasi (KI)	• Current Ratio minimal 1,0 kali • Debt to equity Ratio maksimal 2,1 kali dan • Debt Service coverage Ratio minimal 100%	BMC telah memenuhi persyaratan dengan *Current Ratio* 2,1x, DER 0,5x dan DSCR 462%
10	Golden Sands Oasis Ltd (Perseroan,	Indies Special Opportunities III &	Facility Agreement	DER < 1,00x Net Worth or equity, IDR 2 Tn	BPI, BMI, VKTR telah memenuhi persyaratan dengan DER 0,6x; 0,7x; dan 0,4x

No	Peminjam	Kreditur	Perjanjian Pinjaman	Rasio Keuangan yang disyaratkan	Pemenuhan Perseroan dan Entitas Anak atas Rasio-rasio keuangan
	BPI, BMI, VKTR)	IV Ltd, Watiga Trust Ltd			Perseroan telah memenuhi persyaratan dengan Equity Rp4,6 Triliun

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting, Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Analisis dan pembahasan keuangan secara umum berikut disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diterbitkan kembali yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, dengan nomor opini 00115/2.0902/AU.1/10/1792-4/1/VI/2026 pada tanggal 26 Juni 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

1. UMUM

Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan nama "N.V. Bakrie & Brothers" berdasarkan Akta No. 55, tanggal 13 Maret 1951, yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.8/81/6 tanggal 25 Agustus 1951. Dalam perkembangannya, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan ekspansi usaha untuk memperluas jangkauan kegiatan bisnisnya sekaligus melakukan pengembangan atas jaringan investasinya. Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 35-37, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.

Selaras dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Saat ini kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perusahaan holding, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis seperti pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, mengatur pembelian dan penjualan bisnis, termasuk praktik profesional dan kegiatan broker hak paten yang dilakukan pada level unit usaha Perseroan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dengan Akta No. 62/2026.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 35-37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940.

Akuisisi dan konsolidasi CCT tidak mengubah fokus usaha Perseroan. Namun bertujuan untuk meningkatkan dan menambah portofolio Perseroan, sehingga dapat meningkatkan profil aset, sumber pendapatan ,serta diversifikasi produk Perseroan sehingga memberikan dampak peningkatan nilai (*value*) Perseroan bagi *stakeholder*.

2. KONDISI PEREKONOMIAN

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. Ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,11%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,03%. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor yang tetap tumbuh positif.

Stabilitas makroekonomi nasional juga tetap terpelihara sepanjang tahun 2025. Inflasi berada pada level yang terkendali dan masih dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, mencerminkan konsistensi kebijakan moneter serta sinergi yang baik antara otoritas moneter dan fiskal.

Sebagai negara dengan basis ekspor komoditas yang dominan, perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas global sepanjang tahun 2025. Harga emas meningkat sekitar 61% dipicu kekhawatiran akan kondisi geopolitik global. Harga CPO turun sekitar 16,2% sementara harga batu bara termal turun sekitar 19,3%, searah dengan harga nikel yang melemah sekitar 9,4%. Sementara itu, harga minyak

mentah global sepanjang 2025 turun di kisaran USD 61 per barel dipengaruhi oleh dipicu oleh melimpahnya pasokan global dan stagnasi permintaan dari China.

Meskipun harga mayoritas komoditas unggulan menurun, Indonesia tetap mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar USD 41,05 miliar pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekspor non-migas (besi baja dan manufaktur) yang naik 7,66%.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh di kisaran 4,9% - 5,7%, dengan titik tengah 5,33%. Target ini didukung oleh kebijakan moneter longgar, peningkatan kredit perbankan sebesar 8-12%, serta stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.

Meski demikian, eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di awal Maret 2026 telah menjadi faktor risiko utama bagi APBN, terutama risiko naiknya defisit anggaran dan kenaikan inflasi impor (imported inflation) akibat naiknya harga minyak dunia.

Perubahan kondisi makroekonomi dapat berdampak terhadap pendapatan Perseroan, terutama melalui perubahan tingkat permintaan, aktivitas mobilitas, realisasi proyek, daya beli pelanggan, serta kebijakan pemerintah yang memengaruhi pasar dan kegiatan operasional Perseroan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas usaha dapat memberikan dampak positif terhadap volume usaha dan pendapatan. Sebaliknya, perlambatan ekonomi, tekanan inflasi, pelemahan daya beli, keterlambatan realisasi proyek, atau perubahan kebijakan dapat menimbulkan risiko terhadap pencapaian pendapatan Perseroan.

Dari sisi beban pokok dan margin, kenaikan harga bahan baku, komponen, energi, biaya logistik, biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, serta biaya operasional lainnya dapat meningkatkan struktur biaya Perseroan. Apabila peningkatan biaya tersebut tidak dapat sepenuhnya dikompensasikan melalui penyesuaian harga, tarif, efisiensi operasional, atau peningkatan volume usaha, maka kondisi tersebut dapat menekan margin dan profitabilitas Perseroan.

Dari sisi kebutuhan pendanaan, kondisi suku bunga dan pasar keuangan yang ketat dapat meningkatkan biaya pendanaan Perseroan, khususnya dalam mendukung kebutuhan modal kerja, belanja modal, pengembangan usaha, maupun ekspansi. Peningkatan biaya dana dapat berdampak terhadap beban keuangan, arus kas, profitabilitas, serta fleksibilitas keuangan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan perlu menjaga struktur pendanaan yang sehat dan memastikan ketersediaan pendanaan yang memadai untuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha.

Secara keseluruhan, Perseroan memandang bahwa kondisi perekonomian dan perubahan kebijakan pemerintah merupakan faktor risiko eksternal yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan, beban pokok, margin, kebutuhan pendanaan, dan strategi usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan secara berkala melakukan pemantauan terhadap indikator makroekonomi, perkembangan regulasi, harga bahan baku, harga energi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, kebijakan infrastruktur, kebijakan tarif, serta arah kebijakan sektoral lainnya. Perseroan juga melakukan penyesuaian strategi usaha, pengendalian biaya, pengelolaan arus kas, dan evaluasi struktur pendanaan guna menjaga kesinambungan usaha dan kinerja Perseroan.

3. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan keuangan secara umum berikut disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diterbitkan kembali yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, dengan nomor opini 00115/2.0902/AU.1/10/1792-4/1/VI/2026 pada tanggal 26 Juni 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Total Aset Lancar	4.418.147	3.629.104
Total Aset Tidak Lancar	19.149.416	3.200.385

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
TOTAL ASET	**23.567.563**	**6.829.489**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.596.001	2.150.564
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.299.898	767.259
Total Liabilitas	**18.895.899**	**2.917.823**
Total Ekuitas	**4.671.664**	**3.911.666**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**23.567.563**	**6.829.489**

PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan Jumlah Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	236.650	168.225
Investasi jangka pendek		
Pihak ketiga	1.321.168	845.747
Pihak berelasi	-	9.029
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai		
Pihak ketiga	636.273	755.892
Pihak berelasi	49.276	41.884
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai		
Pihak ketiga	379.561	522.716
Pihak berelasi	8.457	4.974
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang	626.371	957.931
Beban dibayar dimuka	5.676	3.058
Uang muka	307.118	172.972
Pajak dibayar dimuka	146.992	139.381
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	700.605	7.295
Total Aset Lancar	**4.418.147**	**3.629.104**
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi - setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai	31.672	16.911
Investasi pada entitas asosiasi	10.000	10.000
Investasi jangka panjang lainnya	527.524	533.867
Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penyisihan kerugian atas penurunan nilai	2.064.430	1.954.331
Hak pengusahaan jalan tol - setelah dikurangi akumulasi Amortisasi	14.998.392	-
Aset pajak tangguhan - neto	103.701	79.949
Biaya pengembangan proyek	66.278	66.655
Aset takberwujud – neto	777	727
Aset tidak lancar lainnya	1.346.642	537.945
Total Aset Tidak Lancar	**19.149.416**	**3.200.385**
TOTAL ASET	**23.567.563**	**6.829.489**

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Total Aset

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp23.567 miliar, meningkat sebesar Rp16.738 miliar atau 245,09% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.829 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Lancar sebesar Rp 789 miliar disertai dengan peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp15.949 miliar.

Kenaikan aset yang material disebabkan oleh pengakuan aset ”hak pengusahaan jalan tol” karena konsolidasi atas akuisisi CCT. Dasar pengukuran hak pengusahaan jalan tol pada saat pengakuan awal adalah nilai wajar (*fair value*) sesuai dengan ketentuan ISAK 112, "Perjanjian Konsesi Jasa" par 14-18, yang mengatur bahwa imbalan yang diterima atau akan diterima oleh operator atas jasa konstruksi atau peningkatan infrastruktur konsesi diakui sebesar nilai wajarnya. Dalam hal operator memperoleh hak untuk membebankan pengguna jasa publik, imbalan tersebut diakui sebagai aset takberwujud.

Dengan penambahan aset tersebut, *recurring income* Perseroan yang bersifat kas (tunai) atas pendapatan tol akan meningkat signifikan melebihi beban amortisasi aset tersebut sehingga tidak terdapat risiko mengalami kerugian atau risiko kolektibilitas.

Total Aset Lancar

Total Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.418 miliar, meningkat sebesar Rp789 miliar atau 21,74% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.629 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar Rp475 miliar dan dana dalam pembatasan Rp693 miliar.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp236,65 miliar, meningkat sebesar Rp68,43 miliar atau 40,67% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp168,22 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh proses konsolidasi kas dan setara kas dari CCT.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.321,17 miliar, meningkat sebesar Rp466,39 miliar atau 54,56% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp854,78 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan investasi di Bellridge Holdings Limited sebesar Rp255,2 miliar dan Fortesque Investment Holdings Limited sebesar Rp150 miliar.

Investasi pada Bellridge Holdings Limited (Bellridge) merupakan perjanjian penerbitan obligasi yang dapat ditukar (*Exchangeable Bonds*) dimana Bellridge bertindak sebagai *Issuer* yang akan memberikan *benefit* mendapatkan kupon dan setiap saat dimonetisasi. Tujuan penempatan investasi tersebut adalah untuk memperoleh imbal hasil yang optimal atas dana yang dimiliki Perseroan dengan tetap memperhatikan diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Untuk minimalisasi risiko, Perseroan memiliki hak untuk melakukan *redemption* atas sebagian atau seluruh investasi setiap saat melalui penyelesaian dalam bentuk kas, saham, atau bentuk penyelesaian lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Investasi pada Fortesque Investment Holdings Limited (Fortesque) merupakan perjanjian investasi dimana Fortesque bertindak sebagai pengelola investasi yang diberikan kewenangan untuk menempatkan dana pada berbagai instrumen investasi, termasuk instrumen pasar uang, instrumen pasar modal, saham, obligasi, commercial paper, dan instrumen keuangan lainnya sesuai dengan mandat investasi yang telah ditetapkan. Tujuan penempatan investasi tersebut adalah untuk memperoleh imbal hasil yang optimal atas dana yang dimiliki Perseroan dengan tetap memperhatikan diversifikasi portofolio dan manajemen risiko. Untuk minimalisasi risiko, Perseroan memiliki hak untuk melakukan *redemption* atas sebagian atau seluruh investasi setiap saat melalui penyelesaian dalam bentuk kas, saham, atau bentuk penyelesaian lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Piutang Usaha
Piutang Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp685,55 miliar, menurun sebesar Rp112,23 miliar atau -14,07% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp797,77 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penerimaan piutang periode berjalan dari pelanggan. Penurunan piutang usaha akibat realisasi penerimaan piutang memberikan dampak yang positif terhadap cash flow dan perputaran piutang. Hal ini sejalan dengan kebijakan management untuk mempercepat penerimaan atas piutang.

Piutang Lain-lain
Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp388,02 miliar, menurun sebesar Rp139,67 miliar atau -26,47% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp527,69 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penerimaan piutang dari Poseidon Corporate Services Ltd sebesar Rp87 miliar dan tambahan penurunan nilai piutang sesuai perhitungan PSAK 71. Penurunan piutang lain-lain akibat realisasi penerimaan piutang lain-lain yang memberikan dampak yang positif terhadap cash flow dan perputaran piutang. Hal ini sejalan dengan kebijakan management untuk mempercepat penerimaan atas piutang lain-lain. Tambahan penurunan piutang merupakan upaya management untuk menyajikan nilai wajar atas piutang lain-lain sesuai dengan PSAK 71.

Persediaan
Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp626,37 miliar, menurun sebesar Rp331,56 miliar atau -34,61% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp957,93 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pemakaian dan penyesuaian stok dengan kebutuhan produksi. Penurunan persedian yang diakibatkan pemakaian dan penyesuaian stok dengan kebutuhan produksi memberikan dampak positif dalam perputaran persediaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi terkait biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan. Hal ini sejalan dengan upaya management untuk lebih beroperasi secara efektif dan efisien.

Beban Dibayar Dimuka
Beban Dibayar Dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp5,68 miliar, meningkat sebesar Rp2, 6 miliar atau 85,61% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3,06 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan biaya dibayar dimuka atas proyek telekomunikasi.

Uang Muka
Uang Muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp307,12 miliar, meningkat sebesar Rp134,15 miliar atau 77,55% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp172,97 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan uang muka pembelian dan proyek di VKTR Rp116,9M untuk Proyek Bis Damri, uang muka proyek BMI group Rp10 miliar dan uang muka proyek MKN Rp10M.

Pajak Dibayar Dimuka
Pajak Dibayar Dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp146,99 miliar, meningkat sebesar Rp7,61 miliar atau 5,46% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp139,38 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan uang muka pajak badan unit usaha.

Kas Di Bank yang Dibatasi Penggunaannya
Kas Di Bank yang Dibatasi Penggunaannya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp700,61 miliar, meningkat sebesar Rp693,31 miliar atau 9.503,91% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7,30 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya di CCT.

Peningkatan signifikan kas di bank yang dibatasi penggunaannya berasal dari:

- CCT yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan memiliki saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp515,94 miliar yang ditempatkan pada rekening khusus (escrow account dan/atau debt service reserve account) pada Bank HIMBARA sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian

pinjaman, serta digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman atau bunga atas pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

- Saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada PT Bakrie Construction sebesar Rp100,00 miliar yang ditempatkan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agunan dan pengikat atas fasilitas kredit jaminan giro (pinjaman jangka pendek) yang diperoleh pada tahun 2025.
- Saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada PT Bakrie Toll Indonesia sebesar Rp48,86 miliar yang ditempatkan pada PT Bank Nationalnobu Tbk dalam bentuk borrower reserve account sesuai persyaratan dalam perjanjian pinjaman dan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman selama 12 bulan ke depan.
- Saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada PT Suluh Ardhi Engineering sebesar Rp28,50 miliar yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agunan dan pengikat atas fasilitas kredit jaminan giro (pinjaman jangka pendek) yang diperoleh pada tahun 2025.

Total Aset Tidak Lancar
Total Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp19.149 miliar, meningkat sebesar Rp15.949 miliar atau 498,35% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.200 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan hak konsesi jalan tol sebesar Rp15,02 triliun.

Piutang Pihak Berelasi
Piutang Pihak Berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp31,67 miliar, meningkat sebesar Rp14,76 miliar atau 87,29% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang kepada pihak berelasi.

Investasi Pada Entitas Asosiasi
Investasi Pada Entitas Asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp10,00 miliar.

Investasi jangka panjang lainnya
Investasi jangka panjang lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp527,52 miliar, menurun sebesar Rp6,34 miliar atau -1,19% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp533,87 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan telah terkonsolidasinya CCT pada tahun 2025. Nilai penurunan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan, serta sehubungan dengan perubahan metode pencatatan sebelumnya menggunakan metode biaya menjadi Entitas anak yang terkonsolidasi.

Aset tetap
Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.064,43 miliar, meningkat sebesar Rp110,10 miliar atau 5,63% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.954,33 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tanah untuk bangunan pabrik di entitas anak.

Hak Pengusahaan Jalan Tol
Aset Perseroan berupa Hak pengusahaan jalan tol pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp14.998,39 miliar, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 Perseroan belum memiliki aset tersebut.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp103,70 miliar, meningkat sebesar Rp23,75 miliar atau 29,71% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp79,95 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan estimasi aset pajak tangguhan di entitas anak.

Biaya Pengembangan Proyek
Biaya pengembangan proyek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp66,28 miliar, menurun sebesar Rp0,38 miliar atau -0,57% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp66,66 miliar. Nilai penurunan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,78 miliar, meningkat sebesar Rp0,05 miliar atau 6,88% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,73 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan lisensi software di entitas anak.

Aset Tidak Lancar Lainnya
Aset tidak lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.346,64 miliar, meningkat sebesar Rp808,70 miliar atau 150,33% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp537,95 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan investasi jangka Panjang Fortesque Investment Holdings Limited di BTI sebesar Rp750M berasal dari pinjaman Hartman dan dana yang dibatasi penggunaannya atas investasi proyek unit usaha di beberapa bank.

BTI menerima fasilitas kredit sebesar Rp3.662,42 miliar dari Hartman yang digunakan dalam rangka ekspansi usaha Perseroan ke dalam kegiatan usaha di bidang pengelolaan jalan tol, yang terdiri dari akuisisi CCT sebesar Rp2.912,42 miliar, dan uang muka sehubungan potensi proyek jalan tol prospektif melalui Fortesque sebesar Rp750 miliar.

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Total Liabilitas
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp18.896 miliar, meningkat sebesar Rp15.978 miliar atau 547,60% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.918 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.445 miliar disertai dengan peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp14.533 miliar.

Total Liabilitas Jangka Pendek
Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.596 miliar, meningkat sebesar Rp1.445 miliar atau 67,21% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.151 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman jangka pendek Rp1.068 miliar, kenaikan utang usaha Rp146 miliar, kenaikan beban masih harus dibayar Rp129 miliar serta kenaikan bagian hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo sebesar Rp223 miliar.

Pinjaman jangka pendek
Pinjaman jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.836,56 miliar, meningkat sebesar Rp1.067,88 miliar atau 138,92% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp768,68 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan pinjaman di Mayapada sebesar Rp550 miliar, Bank Nobu sebesar Rp700 miliar terkait pendanaan akuisisi CCT. Kenaikan tersebut berdampak penurunan rasio likuiditas. Namun demikian, management Perseroan memastikan bahwa kenaikan pinjaman jangka pendek masih sesuai dengan rencana bisnis serta telah mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan pinjaman tersebut.

Utang Usaha
Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp906,98 miliar, meningkat sebesar Rp145,95 miliar atau 19,18% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp761,03 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan hutang ke PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp279 miliar dan PT Waskita Beton Precast Tbk sebesar Rp184 miliar sebagai dampak terkonsolidasinya Laporan Keuangan CCT setelah akuisisi. Selain itu, terdapat peningkatan dari beberapa pemasok di Entitas Anak. Peningkatan ini masih sejalan dengan perkembangan bisnis serta mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan utang usaha tersebut

Utang Lain-lain
Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp75,86 miliar, menurun sebesar Rp38,43 miliar atau -33,62% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp114,29 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyelesaian sebagian hutang ke PT Yahukimo Indonesia bersatu dan hutang pendanaan proyek di unit usaha.

Beban Akrual
Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp280,29 miliar, meningkat sebesar Rp129,26 miliar atau 85,59% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp151,02 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan akrual biaya proyek di unit usaha sebesar Rp65 miliar dan akrual bunga pinjaman Rp38 miliar. Peningkatan tersebut berdampak pada penurunan rasio likuiditas. Namun peningkatan ini masih sejalan dengan perkembangan bisnis serta mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan utang usaha tersebut

Uang Muka Pelanggan
Uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp92,95 miliar, menurun sebesar Rp78,23 miliar atau -45,70% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp171,18 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pegakuan uang muka pelanggan yang telah menjadi revenue di periode berjalan.

Utang Pajak
Utang pajak pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp50,39 miliar, menurun sebesar Rp3,47 miliar atau -6,44% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp53,86 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan estimasi kewajiban pajak badan entitas anak.

Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp352,97 miliar, meningkat sebesar Rp222,47 miliar atau 170,48% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp130,50 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan kewajiban kepada Sindikasi Bank Himbara di CCT, pinjaman ke Hartman International Ltd, PT Bank Mayapada Internasional Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank National Nobu Tbk. Kenaikan tersebut berdampak penurunan rasio likuiditas. Namun demikian, management Perseroan memastikan bahwa kenaikan pinjaman jangka pendek masih sesuai dengan rencana bisnis serta telah mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan pinjaman tersebut.

Total Liabilitas Jangka Panjang
Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp15.300 miliar, meningkat sebesar Rp14.533 miliar atau 1.894,78% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp767 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman jangka panjang Perseroan.

Utang Lain-lain Jangka Panjang
Utang lain-lain jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp275,07 miliar yang berasal dari CCT, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo utang lain-lain. Kenaikan ini disebabkan karena dampak terkonsolidasinya laporan keuangan CCT. Kenaikan tersebut berdampak penurunan rasio likuiditas. Namun demikian, management Perseroan memastikan bahwa kenaikan utang lain-lain jangka panjang masih sesuai dengan rencana bisnis serta telah mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan utang lain-lain jangka panjang tersebut.

Provisi Pelapisan Jalan Tol
Provisi pelapisan jalan tol Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp30,91 miliar yang berasal dari CCT, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo provisi pelapisan jalan tol. Kenaikan ini disebabkan karena dampak terkonsolidasinya laporan keuangan CCT. Kenaikan tersebut berdampak penurunan rasio likuiditas. Namun demikian, management Perseroan memastikan bahwa kenaikan atas provisi

pelapisan jalan tol masih sesuai dengan rencana bisnis serta telah mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan provisi tersebut.

Liabilitas Pajak Tangguhan
Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp102,95 miliar, menurun sebesar Rp8,72 miliar atau -7,81% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp111,67 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya estimasi kewajiban pajak tangguhan di entitas anak.

Liabilitas Imbalan Pascakerja
Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp244,42 miliar, meningkat sebesar Rp12,96 miliar atau 5,60% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp231,46 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan estimasi kewajiban manfaat karyawan sesuai dengan Laporan Aktuaris Independen. Kenaikan ini berdampak penurunan rasio likuiditas. Namun demikian, management Perseroan memastikan bahwa kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja merupakan upaya management untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan serta PSAK terkait. Management meyakini mampu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo.

Utang pihak berelasi
Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp87,74 miliar, menurun sebesar Rp2,34 miliar atau -2,60% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp90,08 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyelesaian kewajiban kepada PT Kalimantan Prima Power sebesar Rp5,4 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangin Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp14.558,81 miliar, meningkat sebesar Rp14.224,76 miliar atau 4.258,27% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp334,05 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman jangka panjang Perseroan. Kenaikan tersebut berdampak penurunan rasio likuiditas. Namun demikian, management Perseroan memastikan bahwa kenaikan pinjaman jangka panjang masih sesuai dengan rencana bisnis serta telah mempertimbangkan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan pinjaman tersebut.

Pertumbuhan Jumlah Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada ppemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp5.687, Rp796, Rp227, Rp99 dan Rp12 untuk masing-masing saham Seri A, Seri B, Seri C, Seri D dan Seri E Modal dasar 293.715.580.156 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 173.416.832.509 saham	4.764.178	4.764.178
Tambahan modal disetor	(1.750.758)	(1.750.758)
Komponen ekuitas lainnya	18.308	(86.138)
Saldo laba	821.442	327.590
Subtotal	3.853.170	3.254.872
Kepentingan nonpengendali	818.494	656.794
Ekuitas – Neto	**4.671.664**	**3.911.666**

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.672 miliar, meningkat sebesar Rp760 miliar atau 19,43% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.912 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp503 miliar, penghasilan komprehensif lain

tahun berjalan sebesar Rp7 miliar, kenaikan selisih transaksi dengan pihak non pengendali sebesar Rp98 miliar, dan transaksi kepentingan nonpengendali sebesar Rp152 miliar.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN NETO	3.742.973	3.869.905
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2.998.589	3.000.428
LABA BRUTO	**744.384**	**869.477**
BEBAN USAHA		
Beban karyawan	245.229	250.990
Beban umum dan administrasi	252.157	202.712
Beban Penjualan	130.135	132.903
Total Beban Usaha	627.521	586.605
LABA USAHA	**116.863**	**282.872**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Keuntungan dari pengukuran kembali atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya	422.375	-
Keuntungan dari pembelian diskon	320.127	-
Keuntungan selisih kurs - neto	14.002	21.653
Keuntungan atas penjualan aset tetap	971	46.822
Penyisihan penurunan nilai atas piutang	(89.572)	18.214
Beban bunga dan keuangan - neto	(211.555)	(95.492)
Keuntungan atas penyelesaian pinjaman melalui investasi	-	353.464
Kerugian atas dilusi investasi pada entitas anak	-	(280.354)
Lain-lain – Neto	(54.379)	42.051
Penghasilan Lain-lain - Neto	401.969	106.358
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**518.832**	**389.230**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(42.018)	(76.434)
Tangguhan	25.929	23.252
Beban Pajak Penghasilan - Neto	**(16.089)**	**(53.182)**
LABA NETO	**502.743**	**336.048**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	6.141	(2.569)
Perubahan neto atas nilai wajar efek ekuitas tercatat	(174)	(2.424)
Subtotal	5.967	(4.993)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program pensiun	981	14.302
Pajak penghasilan terkait	305	(2.850)
Subtotal	1.286	11.452
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -SETELAH DIKURANGI PAJAK	7.253	6.459
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	**509.996**	**342.507**

Pendapatan Neto

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Pendapatan neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.743 miliar, menurun sebesar Rp127 miliar atau -3,28% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.870 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan di Entitas Anak BMI Group sebesar Rp344,1 miliar yang belum dapat dikompensasi oleh kenaikan revenue entitas anak lainnya di BIIN Rp136,3 miliar dan VKTR Rp85,6 miliar. Penurunan pendapatan tersebut berdampak pada rasio usaha Perseroan. Namun mangement meyakini bahwa penurunan tersebut bersifat sementara serta meyakini bahwa upaya perbaikan kinerja penjualan di Entitas Anak di periode berikutnya serta akuisisi CCT akan meningkatkan pendapatan yang signifikan terhadap Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.998 miliar, menurun sebesar Rp2 miliar atau -0,07% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.000 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh upaya efisiensi untuk penyesuaian dengan penurunan pendapatan.

Laba Bruto

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Laba bruto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp744 miliar, menurun sebesar Rp125 miliar atau -14,38% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp869 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan di entitas anak yang belum dapat terkompensasi dengan kenaikan pendapatan di entitas anak lainnya. Penurunan laba bruto menyebabkan penurunan rasio usaha Perseroan. Namun mangement meyakini bahwa penurunan laba bruto tersebut bersifat sementara serta meyakini bahwa upaya perbaikan kinerja penjualan serta efisiensi biaya produksi di Entitas Anak pada periode berikutnya dapat meningkatkan laba bruto yang signifikan terhadap Perseroan.

Beban Usaha

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp628 miliar, meningkat sebesar Rp41 miliar atau 6,98% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp587 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp49 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut menyebabkan penurunan rasio usaha Perseroan. Namun mangement meyakini bahwa peningkatan beban usaha tersebut bersifat sementara serta meyakini bahwa upaya efisiensi beban usaha di Perseroan dan Entitas Anak pada periode berikutnya dapat menurunkan beban usaha yang signifikan terhadap Perseroan.

Laba Usaha

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp117 miliar, menurun sebesar Rp166 miliar atau -58,66% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp283 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba bruto yang ditambah dengan kenaikan biaya operasional periode berjalan. Penurunan laba usaha menyebabkan penurunan rasio usaha Perseroan. Namun mangement meyakini bahwa penurunan laba usaha tersebut bersifat sementara serta meyakini bahwa upaya efisiensi biaya usaha di Perseroan dan Entitas Anak pada periode berikutnya dapat meningkatkan laba usaha yang signifikan terhadap Perseroan.

Penghasilan Lain-lain - Neto

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024

Penghasilan Lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp402 miliar, meningkat sebesar Rp296 miliar atau 279,25% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp106 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Keuntungan atas pengukuran kembali atas 10% saham BNBR dan BTI di CCT yang disesuaikan dengan nilai wajar dihasilkan oleh KJPP senilai Rp422 miliar serta keuntungan pembelian dengan diskon *(gain on bargain purchase)* atas akuisisi CCT oleh BTI sebesar Rp320 miliar.

Laba Neto

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024
Laba neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp503 miliar, meningkat sebesar Rp167 miliar atau 49,70% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp336 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penhasilan lain-lain – Neto Rp295 miliar.

Kenaikan laba neto Perseroan tidak sejalan dengan laba usahanya yang menurun dan arus kas operasi yang negatif, hal ini disebabkan karena terdapat keuntungan non-operasional yang berasal dari keuntungan pengukuran kembali atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya dan keuntungan dari pembelian diskon dari akuisisi CCT.

Namun, Perseroan meyakini di masa yang akan datang dengan adanya pendapatan Perseroan yang berasal dari jalan tol *(*peningkatan *traffic* dan penyesuaian tarif) dapat meningkatkan kontribusi pendapatan berkelanjutan (*recurring income*) yang signifikan sehingga perseroan meyakini bahwa akan menyelesaikan utangnya di masa depan.

Laba Komprehensif Neto

Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024
Laba komprehensif neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp510 miliar, meningkat sebesar Rp167 miliar atau 48,69% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp343 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan.

Rasio-rasio penting

Likuiditas dan Solvabilitas

Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dihitung dengan membagi Aset lancar dengan kewajiban lancar pada periode yang bersangkutan, sedangkan rasio utang adalah rasio yang mengukur kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban menggunakan seluruh Aset atau ekuitasnya yang dihitung dengan membandingkan total kewajiban dengan total Aset perseroan pada periode yang bersangkutan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas dari internal karena Perseroan memiliki usaha operasional. Adapun untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan, saat ini terdapat pendapatan yang berkesinambungan dan dana kas di bank yang dibatasi penggunaannya yang diperuntukan untuk membayar kewajiban serta liabilitas jangka panjang. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan, antara lain:

- Mencari pinjaman modal kerja dari pihak ketiga.
- Menerbitkan surat utang.
- Bekerjasama (beraliansi) dengan mitra strategis.

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Keuangan (x)		
EBITDA / Total Pembayaran Utang (*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR))	0,41	0,59
Laba Sebelum Bunga & Pajak / Beban Bunga (*Interest Coverage Ratio* (ICR))	2,76	7,99

Rasio cakupan pembayaran utang (DSCR) pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 0,41x, mengalami penurunan dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar 0,59x. Penurunan ini disebabkan terutama karena kenaikan total liabilitas Perseroan. Sedangkan laba neto mengalami kenaikan.

Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 2,76x, mengalami penurunan dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar 7,99x. Penurunan ini disebabkan terutama karena kenaikan beban keuangan periode berjalan. Sedangkan laba neto mengalami kenaikan.

DSCR pada 31 Desember 2025 memang rendah sebesar 0,41x, akan tetapi menurut manajemen Perseroan angka tersebut belum mencerminkan kemampuan pembayaran Utang emiten saat ini, dimana Perseroan baru mengakuisisi jalan tol yang kedepannya dapat meningkatkan kontribusi pendapatan berkelanjutan (*recurring income*) yang signifikan sehingga perseroan meyakini bahwa akan menyelesaikan utangnya di masa depan. Selain itu, melalui rencana PMHMETD V, Perseroan akan mengurangi sebagian besar Utangnya.

Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Kemampuan Perseroan yang disetahunkan dalam menghasilkan laba dari Aset dan ekuitas masing-masing dapat diukur masing-masing dengan rasio Imbal Hasil Ekuitas *(Return on Equity)* yang merupakan hasil perbandingan antara laba bersih dengan total modal sendiri Perseroan dan rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) yang merupakan hasil perbandingan antara laba bersih dengan total Aset Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 10,76% dan 8,59%.

Imbal Hasil Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 2,13% dan 4,92%.

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(107.567)	865
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(5.342.897)	(1.323.353)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	5.518.798	624.434
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**68.334**	**(698.054)**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING ATAS KAS DAN SETARA KAS	**91**	**815**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**168.225**	**865.464**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**236.650**	**168.225**

Arus Kas Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp107,57 miliar, mengalami penurunan dibandingkan dengan kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2024 sebesar Rp0,86 miliar. Penurunan ini disebabkan terutama karena tambahan

pembayaran bunga pinjaman periode berjalan dibandingkan tahun 2024. Penurunan arus kas aktivitas operasi menyebabkan dampak negatif terhadap Perseroan. Namun mangement meyakini bahwa penurunan arus kas aktivitas operasi bersifat sementara. Upaya peningkatan pendapatan, percepatan realisasi piutang, management arus kas serta efisiensi operasional di Perseroan dan Entitas Anak dapat meningkatkan arus kas aktivitas operasi yang positif dan berkelanjuitan terhadap Perseroan.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.343 miliar,mengalami peningkatan dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.323 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh proses akuisisi CCT. Peningkatan ini memberikan dampak positif yang sejalan dengan upaya management Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan, untuk memastikan perbaikan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.519 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan dengan kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp624 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pendanaan untuk proses akuisisi CCT. Peningkatan ini memberikan dampak positif yang sejalan dengan upaya management Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan, untuk memastikan perbaikan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Arus kas Perseroan (operasi, investasi dan pendanaan) diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam satu siklus operasi normal (bukan bersifat musiman), sesuai dengan karakteristik bisnis Perseroan dan Entitas Anak di bidang infrastruktur dan manufaktur, perdagangan, jasa dan investasi, serta jasa pabrikasi dan konstruksi.

Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material bagi Perseroan yang dapat berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

4. SEGMEN OPERASI

Perseroan dan Entitas Anak memiliki usaha yang terbagi dalam tiga operasi yang meliputi usaha yang berhubungan dengan infrastruktur dan manufaktur, perdagangan, jasa dan investasi serta jasa pabrikasi dan konstruksi. Informasi tentang segmen usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025			
	Infrastruktur dan Manufaktur	Perdagangan, Jasa dan Investasi	Jasa Pabrikasi dan Konstruksi	Konsolidasian
Pendapatan Neto	3.110.416	387.369	245.188	3.742.973
Beban Pokok Pendapatan	2.426.830	355.143	216.616	2.998.589
Laba Bruto	**683.586**	**32.226**	**28.572**	**744.384**
Beban Usaha	383.051	47.752	196.718	627.521
Laba (Rugi) Usaha	**300.535**	**(15.526)**	**(168.146)**	**116.863**
Kontribusi Pendapatan Neto Segmen terhadap Pendapatan Neto	**83,10%**	**10,35%**	**6,55%**	**100,00%**
Kontribusi Laba (Rugi) Usaha Segmen terhadap Laba (Rugi) Usaha	**257,17%**	**(13,29%)**	**(143,88%)**	**100,00%**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025				
	Infrastruktur dan Manufaktur	Perdagangan, Jasa dan Investasi	Jasa Pabrikasi dan Konstruksi	Eliminasi	Konsolidasian
Total Aset	**18.928.717**	**3.877.207**	**5.139.129**	**(4.377.490)**	**23.567.563**
Total Liabilitas	**16.472.432**	**639.749**	**1.803.618**	**(19.900)**	**18.895.899**

5. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tidak terdapat kebijakan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap industri Perseroan.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk modal kerja dan belanja modal. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal dengan menggunakan kas yang diperoleh secara internal dari aktivitas operasi dan secara eksternal dari kegiatan pendanaan. Sumber likuiditas yang material yang dimiliki Perseroan berasal dari eksternal yaitu *Facility Agreement* Hartman tanggal 14 November 2025, dengan Nilai Fasilitas sebesar Rp4.816.000.000.000 (empat triliun delapan ratus enam belas miliar Rupiah) dan telah dicairkan sebesar Rp3.662.417.779.559 (tiga triliun enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah), sehingga masih terdapat nilai fasilitas sebesar Rp1.153.582.220.441 (satu triliun seratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah)

Dengan memperhitungkan fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari rencana PMHMETD V, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

7. LIABILITAS

Perseroan melakukan analisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa jatuh tempo liabilitas per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

	Tidak Ditentukan	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Pinjaman jangka pendek	--	1.836.563	-	1.836.563
Utang usaha	--	906.985	-	906.985
Utang lain-lain	--	75.859	--	75.859
Beban akrual	--	280.284	--	280.284
Utang lain-lain jangka panjang	--	-	275.069	275.069
Pinjaman jangka panjang	--	345.747	14.557.479	14.903.226
Liabilitas sewa	--	7.217	1.328	8.545
Utang pihak berelasi	--	--	87.740	87.740
Total	**--**	**3.452.655**	**14.921.616**	**18.374.271**

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025:

	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Pinjaman jangka pendek			
Rupiah			
PT Bank National Nobu	700.259	-	700.259
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	550.000	-	550.000
PT MNC Internasional Tbk	170.238	-	170.238
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000	-	100.000
PT Mandala Raya Yuwana	95.760	-	95.760
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	88.179	-	88.179
PT Bank Central Asia Tbk	63.452	-	63.452
PT Bank Jakarta	49.950	-	49.950
PT Bank Ina Perdana Tbk	15.652	-	15.652
Lain-lain	3.073	-	3.073
Pinjaman jangka panjang			
Rupiah			
Pinjaman sindikasi	1.960.000	7.755.210,00	9.715.210
Hartman International Ltd	-	3.662.418,00	3.662.418
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	85.410	457.856,00	543.266
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	48.000	273.000,00	321.000
PT MNC Internasional Tbk	26.748	250.823,00	277.571
PT Bank National Nobu	40.000	150.000,00	190.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.554	20.073,00	30.627
PT Bank Ina Perdana Tbk	10.791	13.395,00	24.186
PT Rekapital Aset Indonesia	13.580	-	13.580
Lain-lain	9.972	638,00	10.610
Mata Uang Asing (USD)			
Indies Special Opportunities III Ltd	100.692	14.066,00	114.758

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan dan Entitas Anak memberikan jaminan berupa hak tanggungan sebidang tanah, mesin, persediaan, jaminan perusahaan, piutang usaha, dan lain-lain sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang. Pinjaman-pinjaman tersebut digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan modal kerja. Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

8. INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak ketiga. Selain itu, tidak terdapat investasi barang modal yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan regulasi maupun isu lingkungan hidup.

9. DAMPAK SELISIH KURS

Tidak terdapat dampak yang material atas perubahan harga, inflasi dan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

Sensitivitas laba bersih Perseroan terhadap perubahan nilai tukar IDR/USD relative kecil/tidak material. Mata uang yang digunakan Perseroan, memiliki exposure yang moderate terhadap nilai tukar IDR/USD. Transaksi bisnis dan operasional Perseroan dan Entitas Anak mayoritas dilakukan dalam mata uang IDR.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Pada tanggal 28 November 2025, PT Bakrie Toll Indonesia (BTI), Entitas Anak, mengakuisisi 72.000.000 saham PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Waskita Toll Road (WTR). Akuisisi tersebut juga mencakup pinjaman pemegang saham CCT dari SMI dan WTR yang diklasifikasikan sebagai komponen ekuitas lainnya.

Sejak periode laporan keuangan 31 Desember 2025 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan yang dicantumkan dalam Prospektus PMHMETD V ini.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Di bawah ini adalah pemaparan Perseroan mengenai risiko-risiko yang material yang diketahui Perseroan saat ini, yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba, diurut mulai dari faktor yang berisiko paling besar hingga paling kecil:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko kesulitan mencari mitra strategis dan implementasi rencana kerja sama dengan mitra tersebut dalam pengembangan bisnis.

Risiko keuangan terkait hasil kerja sama dengan mitra strategis yang tidak memberikan hasil sesuai harapan dapat terjadi ketika Perseroan menggunakan proyeksi keuangan proyek/aktivitas lain yang kurang akurat atau menetapkan ekspektasi hasil investasi yang tidak realistis; dampaknya adalah kerugian finansial serta stagnansi pengembangan bisnis, dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan *opportunity lost* karena Perseroan kehilangan momentum maupun peluang alternatif yang lebih menguntungkan.

Risiko strategis berupa tidak adanya mitra strategis yang tertarik bekerja sama dengan Perseroan dan unit bisnis dapat terjadi ketika portofolio inisiatif yang ditawarkan memiliki nilai proyek yang tidak signifikan dan/atau imbal hasil yang kurang menarik, sehingga proposisi nilai Perseroan dipandang tidak kompetitif dibanding alternatif peluang lain di pasar. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan stagnansi pengembangan bisnis karena keterbatasan akses terhadap kapabilitas, jaringan, teknologi, maupun pendanaan yang biasanya diperkuat melalui kemitraan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko penurunan jumlah pesanan dari pelanggan

Risiko penurunan jumlah pesanan dari pelanggan dapat terjadi akibat menurunnya permintaan *end-user* yang berdampak ke pelanggan unit usaha serta harga jual yang kurang kompetitif dibanding pesaing, sehingga volume order menurun; akibatnya Perseroan tidak mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Atas risiko tersebut, unit usaha perlu melakukan berbagai upaya aktif seperti menambah pelanggan-pelanggan baru.

2. Risiko persaingan usaha

Risiko persaingan usaha adalah risiko ketidakmampuan Perseroan memenangkan tender/pekerjaan karena harga yang diajukan kurang kompetitif dibanding pesaing. Penyebab utamanya adalah *cost project* yang lebih tinggi, terutama dari harga material dan biaya produksi yang membuat struktur biaya Perseroan lebih mahal. Akibatnya Perseroan berpotensi tidak mendapatkan *project*, sehingga mengurangi peluang pertumbuhan pendapatan dan utilisasi kapasitas bisnis.

1. Risiko fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku

Risiko fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku adalah risiko terjadinya perubahan harga material yang signifikan dan/atau keterbatasan ketersediaan bahan baku utama yang diperlukan untuk mendukung proses produksi dan pemenuhan pesanan. Penyebabnya antara lain volatilitas harga komoditas, gangguan pasokan dari pemasok, keterbatasan kapasitas logistik, serta faktor kebijakan/seasonality. Akibatnya Perseroan berpotensi mengalami kenaikan biaya dan penurunan margin, gangguan jadwal produksi maupun pengiriman, serta penurunan kemampuan memenuhi permintaan.

2. Risiko pelanggaran regulasi dan/atau pencemaran lingkungan hidup

Risiko pelanggaran regulasi lingkungan hidup terjadi jika pengelolaan penanganan limbah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi lingkungan hidup dan/atau risiko operasional pencemaran lingkungan yaitu terjadinya kontaminasi lingkungan akibat penanganan/penempatan limbah B3 terkontaminasi yang

tidak pada tempatnya. Hal ini dapat terjadi jika terjadi kurangnya kepedulian terhadap kebersihan serta kurangnya pemahaman pekerja atas prosedur pelaksanaan, risiko, dan konsekuensi pencemaran lingkungan. Akibatnya, terdapat potensi timbulnya pencemaran lingkungan serta menghadapi teguran dan/atau sanksi dari pihak-pihak yang terkait.

3. Risiko atas perubahan rencana penggunaan dana dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil PMHMETD V

Risiko ini dapat terjadi apabila Perseroan menghadapi perubahan kondisi usaha, kondisi pasar, ketentuan regulasi, atau pertimbangan strategis lainnya yang menyebabkan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD V berubah dan/atau tidak dapat direalisasikan seluruhnya sesuai rencana semula. Jika perubahan penggunaan tidak dilakukan dengan cermat maka dapat berdampak pada tidak optimalnya penggunaan dana, tertundanya realisasi rencana strategis Perseroan, serta tidak tercapainya hasil yang diharapkan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan hasil investasi pemegang saham. Atas risiko tersebut, Perseroan perlu melakukan evaluasi berkala atas rencana penggunaan dana dan penerapan mekanisme persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko krisis ekonomi secara global

Perubahan kondisi ekonomi regional maupun global dapat berdampak material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Pada periode 2025–awal 2026, ketidakpastian global (arah suku bunga global, volatilitas pasar, pelemahan permintaan, serta risiko geopolitik dan rantai pasok) dapat memicu tekanan pada arus modal, harga komoditas, dan sentimen investor terhadap emerging markets termasuk Indonesia.

Dampaknya dapat berupa volatilitas nilai tukar Rupiah, kenaikan biaya pendanaan, serta pengetatan likuiditas/perbankan. Jika perlambatan global berlangsung signifikan dan berlanjut, maka hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, dan prospek usaha Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal.

2. Risiko politik dan keamanan di Indonesia

Risiko politik berkaitan dengan dinamika pemerintahan dan kebijakan publik yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, kepastian usaha, serta iklim investasi. Perubahan prioritas kebijakan, meningkatnya sensitivitas sosial-ekonomi, atau eskalasi isu tertentu dapat menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada persepsi pasar dan keputusan investor.

Unjuk rasa/demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, namun jika memicu konflik sosial, gangguan keamanan, atau perusakan fasilitas publik maupun aset, maka hal tersebut dapat mengganggu kegiatan usaha, meningkatkan biaya pengamanan, serta berdampak negatif pada operasional (termasuk di wilayah sekitar kegiatan pertambangan/operasi Perseroan).

3. Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan, khususnya apabila terdapat ketidaksesuaian mata uang (mismatch) antara pendapatan, biaya, dan/atau kewajiban keuangan Perseroan. Volatilitas Rupiah dapat dipengaruhi faktor global (arus modal, suku bunga, sentimen risiko) maupun faktor domestik (inflasi, kebijakan moneter, ekspektasi pasar).

Perubahan nilai tukar dapat berdampak pada biaya operasional dan belanja modal, realisasi margin, serta nilai kewajiban tertentu. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan fluktuasi pada hasil keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

4. Risiko perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk perizinan, lingkungan, keselamatan kerja, perpajakan, serta ketentuan teknis. Perubahan kebijakan dapat terjadi relatif cepat dan dapat memerlukan penyesuaian operasional maupun investasi kepatuhan.

Pengetatan atau perubahan dapat berdampak material pada volume produksi, fleksibilitas penjualan, struktur biaya, pendapatan, jadwal operasi, dan kebutuhan modal Perseroan.

5. Risiko konflik atau ketegangan sosial

Operasi Perseroan dapat mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar sehingga berpotensi menimbulkan risiko sosial, antara lain sengketa/penguasaan lahan, gangguan aktivitas operasional, tuntutan kompensasi, atau penolakan terhadap kegiatan yang dipersepsikan berdampak pada lingkungan dan tata ruang.

Risiko tersebut dapat memicu keterlambatan, gangguan operasional, serta peningkatan biaya. Untuk mengurangi risiko, Perseroan melakukan komunikasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, memperkuat pemetaan pemangku kepentingan dan mekanisme keluhan, serta melaksanakan program CSR yang relevan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan masyarakat sekitar.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI

1. Risiko harga saham Perseroan yang mengalami fluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi tajam karena berbagai faktor, termasuk persepsi pasar atas prospek usaha, perbedaan kinerja aktual terhadap ekspektasi investor, serta perubahan kondisi ekonomi, nilai tukar, suku bunga, politik, dan sentimen pasar modal Indonesia. Selain itu, pengumuman aksi korporasi (akuisisi, kerja sama strategis, divestasi, restrukturisasi), perkembangan litigasi, maupun volatilitas pasar yang lebih luas dapat mempengaruhi permintaan-penawaran saham, sehingga harga saham Perseroan dapat bergerak di luar kendali Perseroan.

2. Risiko likuiditas saham Perseroan

Tidak terdapat jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau bahwa saham Perseroan akan selalu likuid. Likuiditas dapat dipengaruhi oleh minat investor, kondisi pasar, free float, dan dinamika perdagangan di Bursa Efek. Akibatnya, pemegang saham dapat menghadapi keterbatasan atau keterlambatan dalam menjual saham pada harga atau waktu yang diinginkan. Tidak ada jaminan bahwa pemegang saham dapat menjual sahamnya pada kondisi pasar yang lebih likuid.

3. Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen ditentukan melalui RUPS dengan mempertimbangkan saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, belanja modal, serta pembatasan dalam perjanjian pembiayaan (covenants) dan kebutuhan pendanaan ekspansi. Kerugian yang dibukukan, kebutuhan investasi, atau prioritas penguatan struktur permodalan dapat menjadi alasan Perseroan tidak membagikan dividen. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa dividen akan dibagikan atau bahwa Direksi akan mengusulkan pembagian dividen.

Seluruh risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak telah diungkapkan sebagaimana diuraikan diatas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali No. 00115/2.0902/AU.1/10/1792-4/1/VI/2026 pada tanggal 26 Juni 2026 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, dengan opini wajar tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan nama "N.V. Bakrie & Brothers" berdasarkan Akta No. 55/1951. Dalam perkembangannya, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan ekspansi usaha untuk memperluas jangkauan kegiatan bisnisnya sekaligus melakukan pengembangan atas jaringan investasinya. Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 35-37, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.

Akta Pendirian Perseroan yang berisikan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dengan Akta No. 62/2026.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD V, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPS tanggal 27 Februari 2026 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD V dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) Saham Biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 61/2026. Hasil RUPS tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web BEI pada tanggal 2 Maret 2026, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Pada tahun 2014 dan kemudian diperkuat kembali pada tahun 2019, melalui anak usaha dan perusahaan afiliasi, Perseroan telah menetapkan strategi dan fokus bisnis pada industri manufaktur, pembangunan infrastruktur dan portofolio investasi sebagai pilar utama usaha. Perseroan menjalankan usahanya dengan fokus kuat terhadap ESG (*Environment*, *Social*, *and Governance*) dan telah memulai perkembangannya menuju bisnis masa depan yang berkelanjutan di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, dan 3D-printing konstruksi. Strategi ini merupakan langkah tepat untuk memperkuat usaha serta memperoleh pendapatan secara berkesinambungan, sekaligus merespon peluang yang terbuka luas dan sejalan dengan rencana pembangunan nasional.

Kegiatan Usaha Utama

a. Aktivitas perusahaan holding;
b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
c. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

Kegiatan Usaha Penunjang

a. industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;
b. industri pengecoran besi dan baja;
c. industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi;
d. industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
e. pembangkit tenaga listrik;
f. distribusi gas alam dan buatan;
g. konstruksi bangunan sipil jalan;
h. konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass;
i. jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil;
j. perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berkaitan dengan itu;
k. perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;
l. perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
m. aktivitas jalan tol;
n. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;
o. kawasan industri;
p. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
q. pertambangan gas alam;
r. aktivitas desain alat transportasi dan permesinan;

s. industri pencetakan 3D printing; dan
t. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perusahaan holding, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis seperti pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, mengatur pembelian dan penjualan bisnis, termasuk praktik profesional dan kegiatan broker hak paten yang dilakukan pada level unit usaha Perseroan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar terkait dengan penyesuaian KBLI 2025 untuk memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan hasil risalah RUPSLB Tanggal 27 Februari 2026. Namun demikian, penyesuaian tersebut saat ini masih dalam proses karena berdasarkan informasi yang kami terima sistem Kementerian Hukum Republik Indonesia masih belum diperbarui dengan KBLI 2025.

2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan No. 62/2026 dan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang didapat dari PT EDI Indonesia selaku BAE Perseroan, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar				
Seri A (Nominal Rp5.687)	**A**	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	**B**	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	**C**	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	**D**	4.055.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	**E**	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Jumlah Modal Dasar		**663.613.701.650**	**10.646.540.152.724**	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
Saham Seri A				
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Jumlah Saham Seri A		**19.375.800**	**110.186.762.400**	
Saham Seri B				
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21
Jumlah Saham Seri B		**368.128.800**	**293.030.524.800**	
Saham Seri C				
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.383.920	3,89
Jumlah Saham Seri C		**8.984.667.760**	**2.039.519.581.520**	
Saham Seri D				
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33
Jumlah Saham Seri D		**4.056.378.449**	**401.581.466.451**	
Saham Seri E				
Port Fraser Internatioal Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17
Levoca Enterpirese Lted	E	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14
Jumlah Saham Seri E		**159.988.282.300**	**1.919.859.387.600**	
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor penuh		**173.416.832.509**	**4.764.177.722.771**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**490.196.869.141**	**5.882.362.429.953**	**-**

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-AH.01.09-0140225 tanggal 14 Juli 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133178.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20, tanggal 10 September 2025, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah

diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0339329, tanggal 18 September 2025, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0218245.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 18 September 2025 , susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Armansyah Yamin
Komisaris	: Syailendra S. Bakrie
Komisaris	: Adika Aryasthana Bakrie
Komisaris Independen	: Raniwati
Komisaris Independen	: Adrian Toho Parada Panggabean

Direksi

Direktur Utama	: Anindya Novyan Bakrie
Wakil Direktur Utama	: Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur	: Hendrajanto Marta Sakti
Direktur	: R.A. Sri Dharmayanti
Direktur	: Kartini Sally

Perseroan menyediakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk tunjangan, gaji, dan fasilitas. Sistem remunerasi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan melalui Presiden Komisaris. Dari waktu ke waktu, Komite Nominasi dan Remunerasi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan mengevaluasi kepantasan sistem remunerasi untuk Dewan.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.478 juta dan Rp36.470 juta.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS



Armansyah Yamin – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia dilahirkan di Teluk Betung, Lampung pada tahun 1953. Beliau lulus dari Akademi Penerbangan Indonesia di Jakarta pada tahun 1972. Menjalani berbagai pendidikan, seperti Instructor and Test Pilot Program British Aerospace, Manchester, Inggris (1976) dan Airline Management Course Philippine Airlines, Philippine University, Manila (1978). Beliau juga pernah mengikuti pendidikan di Institute Commodity of London, Inggris (1986-1987).

Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama pada Juli 2022, sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris pada periode 2009 - 2022. Saat ini, beliau juga memegang posisi Komisaris di PT Bakrieland Development Tbk. Beliau memulai karirnya di Grup Bakrie sebagai Special Project Manager PT Bakrie & Brothers (1985-1986), Head of Representative Mindo Commodity Europe Hamburg, Jerman (1987-1991), Managing Director Lewis & Peat International, Singapura (1991-1993), Wakil Presiden Direktur Bakrie Trading (1993- 1998), Komisaris Utama PT Asuransi Ikrar Lloyd (1998-2002), Presiden Direktur Perusda Bersujud, Kalimantan Selatan (2003-2007) dan Direktur Utama PT Arm & Ken Investment (2007-2011).

Hubungan Afiliasi: Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Syailendra S. Bakrie dan Adika Aryasthana Bakrie) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan (Anindya Novyan Bakrie, Anindra Ardiansyah Bakrie dan Hendrajanto M. Sakti) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie)



Syailendra S. Bakrie – Komisaris

Syailendra S. Bakrie, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1980 dan memperoleh gelar Sarjana dari Babson College Boston, Amerika Serikat pada tahun 2003.

Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak September 2025, Sebelum bergabung dengan Grup Bakrie, beliau menjabat sebagai Junior Analyst di Crosby Management, Singapura (2003 – 2005), dan sebagai Direktur di PT MRE Utama (2005 – 2008). Beliau kemudian bergabung dengan Perseroan sebagai Vice President untuk Special Office pada periode 2008 – 2013, dan selama periode ini beliau juga menjabat di PT Bakrie Kalila Investment sebagai Chief Investment Officer pada periode 2008 – 2010, dan kemudian sebagai Direktur Utama pada periode 2010 – 2011.

Beliau juga menjabat di PT Energi Mega Persada Tbk sebagai Direktur (2011 – 2020), Chief Financial Officer (2013), CEO dan Managing Director (2018), dan saat ini menjabat sebagai CEO dan Direktur Utama (2020 – sekarang).

Hubungan Afiliasi: Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Armasyah Yamin dan Adika Aryasthana Bakrie) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan (Anindya Novyan Bakrie, Anindra Ardiansyah Bakrie dan Hendrajanto M. Sakti) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie)



Adika Aryasthana Bakrie – Komisaris

Adika Aryasthana Bakrie, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1988. Beliau memperoleh gelar Sarjana Bisnis Kewirausahaan pada tahun 2010, dan gelar Magister Administrasi Bisnis pada tahun 2014, keduanya dari Universitas Loyola Marymount, California, Amerika Serikat.

Beliau menjabat sebagai Komisaris sejak September 2025. Sebelum bergabung dengan Grup Bakrie, beliau menjabat sebagai Assistant Investment Analyst di Alta Verde Group, Amerika Serikat (2010). Beliau kemudian bergabung dengan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagai Chief Executive Service & Support pada periode (2016 – 2020).

Beliau juga menjabat di PT Bumi Resources Minerals Tbk sebagai Direktur (2020 – sekarang), dan menjabat di salah satu anak usaha BRMS, PT Gorontalo Minerals, sebagai Direktur Utama (2024 – sekarang).

Hubungan Afiliasi: Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Armasyah Yamin dan Syailendra S. Bakrie) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan (Anindya Novyan Bakrie, Anindra Ardiansyah Bakrie dan Hendrajanto M. Sakti) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie)



Raniwati – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1958. Beliau memiliki gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1983. Saat ini beliau juga terdaftar sebagai anggota dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Advokat PERADI.

Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada Juli 2022. Saat ini, beliau juga memegang posisi Komisaris di PT Pintar Nusantara Sejahtera.

Beliau memulai karirnya di Grup Bakrie pada periode 1985 – 2002 dengan posisi terakhir sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan, sesudah itu beliau berkarier di MSA Counsellors at Law sebagai Founder / Managing Partner sejak tahun 2002 hingga sekarang.

Hubungan Afiliasi: Tidak ada



Adrian Toho Parada Panggabean – Komisaris Independen

Adrian Toho Parada Panggabean, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1966. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia pada tahun 1989, gelar Master of Science di bidang Development Finance dari University of Birmingham, Inggris, pada tahun 1992, dan gelar Doctor of Philosophy di bidang Public Finance dari University of Birmingham, Inggris, pada tahun 1997.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen sejak September 2025. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Independen, CIMB Investment Bank Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia (Agustus 2024 – sekarang) dan sebagai anggota CIMB Group Board Risk and Compliance Committee untuk CIMB Bank, CIMB Islamic, CIMB Investment Bank, Kuala Lumpur, Malaysia (Agustus 2024 – sekarang).

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang industri finansial dan pernah bekerja di delapan negara berbeda. Sebelum berkarier secara profesional di bidang finansial dan investasi, beliau merupakan dosen bidang ekonomi di Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia (1988 – 2007). Sejak beralih karier beliau telah menjalani hampir seluruh segmen di industri keuangan: merchant banking, international development banking, investment banking, fund management, dan direktorat treasury perbankan komersial.

Pada periode Mei 2021 hingga saat ini, beliau pernah menjabat sebagai technical advisor/konsultan di berbagai lembaga keuangan, di antaranya Asian Development Bank; BRI Research Institute di Jakarta, Indonesia; Climate Policy Initiative (Indonesia); KfW Bankengruppe (Bank Investasi Jerman yang berbasis di Frankfurt).

Beliau menjabat sebagai penasihat ekonomi di Departemen Perencanaan Ekonomi Kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam (2005-2010). Sebelum itu, beliau bekerja sebagai economist di Asian Development Bank di Manila, Filipina (2001-2007), Nomura Singapura (1999-2001), dan United Nations Development Programme, Jakarta (1998-1999). Di Indonesia, beliau memiliki pengalaman sebagai konsultan dalam manajemen keuangan publik dan hubungan fiskal antar pemerintah untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia (1997–1999).

Beliau juga pernah menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan manajemen investasi di Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Chief Economist sekaligus Treasury strategist dan Executive Vice President di PT Bank CIMB Niaga Tbk (Oktober 2016 – May 2021).

Hubungan Afiliasi: Tidak ada

DIREKSI



Anindya Novyan Bakrie – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1974. Anindya memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Stanford Graduate School of Business, California, USA pada tahun 2001 dan gelar Bachelor of Science (BSc) Industrial Engineering dari Northwestern University, Evanston, Illinois, USA pada tahun 1996.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama & CEO Perseroan sejak Mei 2019, di mana sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama, Deputy COO/ Managing Director pada periode 1997-1999. Saat ini, Anindya juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (September 2022 – sekarang), CEO & Direktur Utama PT Bakrie Global Ventura (Agustus 2013 – sekarang), CEO & Direktur Utama PT Visi Media Asia Tbk (Juli 2014 – sekarang), dan Komisaris PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (Juni 2012– sekarang).

Sebelumnya, Anindya juga pernah menjabat sebagai CEO & Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk (Desember 2003 - Juli 2013. Saat ini, Anindya Novyan Bakrie juga menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia, Ketua Umum perwakilan Indonesia di Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC), Pendiri dan Ketua Umum Bakrie Center Foundation, Ketua Umum Yayasan Bakrie Untuk Negeri, dan Bendahara Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia.

Hubungan Afiliasi: Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Armasyah Yamin, Syailendra S. Bakrie dan Adika Aryasthana Bakrie) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan (Anindra Ardiansyah Bakrie dan Hendrajanto M. Sakti) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie)



Anindra Ardiansyah Bakrie – Wakil Direktur Utama

Anindra Ardiansyah Bakrie, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1979. Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Bentley, McCallum Graduate School of Business, Waltham, Massachusetts, USA pada tahun 2005 dan gelar Bachelor of Science (BSc) Business Administration dari Georgetown University, McDonough School of Business, Washington, DC, USA pada tahun 2001.

Beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak Mei 2018. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama & CEO PT Bakrie Indo Infrastructure, CEO PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, dan Komisaris Utama di PT Southeast Asia Pipe Industries, PT Cimanggis Cibitung Tollways, PT Multi Kontrol Nusantara dan juga sebagai Komisaris di PT Bakrie Metal Industries dan PT Bakrie Power. Selain itu, beliau menjabat sebagai Direktur PT Bakrie Global Ventura sejak April 2012, Komisaris Utama PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) sejak Oktober 2019, Komisaris Utama PT Lativi Mediakarya (tvOne) sejak Maret 2017 dan Komisaris Utama PT Viva Media Baru (vivanews.com) sejak Maret 2017.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Viva Media Baru (November 2013 – Maret 2017), Direktur Utama dan CEO PT Lativi Mediakarya (Agustus 2011 – Maret 2017), Komisaris PT Asia Global Media (September 2009 – Mei 2012), Komisaris PT Viva Media Baru (November 2008 – Mei 2012) dan Komisaris PT Intermedia Capital Tbk (Juni 2017 – Maret 2020).

Hubungan Afiliasi: Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Armasyah Yamin, Syailendra S. Bakrie, dan Adika Aryasthana Bakrie) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan (Anindya Novyan Bakrie dan Hendrajanto M. Sakti) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansjah Bakrie)



R.A. Sri Dharmayanti – Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1962 dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2008, Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Bumi Resources Tbk ("BUMI"), Komisaris PT Arutmin Indonesia, dan Komisaris PT Kaltim Prima Coal. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Chief Legal Officer di BUMI.

Beliau juga ikut serta sebagai Badan Pengurus Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA), Dewan Penasihat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Dewan Pembina Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA), anggota Tim Pengkajian Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI).

Hubungan Afiliasi: Tidak ada



Hendrajanto M. Sakti – Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1972 dan memperoleh gelar Master dalam bidang Business Administration dari University of Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Beliau menjabat sebagai Direktur dan Chief Financial Officer sejak Juli 2022, Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur dan Chief Investment Officer pada periode Mei 2019 – Juni 2021, kemudian menjabat sebagai Direktur dan Chief Financial & Investment Officer pada periode Juni 2021 – Juli 2022.

Beliau bergabung di Perseroan pada tahun 2016 sebagai Executive Vice President dan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Madani Securities. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri keuangan dan pasar modal. Sebelum bergabung dengan BNBR, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Capitalinc Investment Tbk (2013-2015), Komisaris di PT Batasa Capital (2005- 2007), Direktur Utama di PT Batasa Capital (2001- 2005), Vice President di PT Bhakti Capital Indonesia (2000-2001), Case Manager di Jakarta Initiative Task Force (JITF)-Departemen Keuangan, dan Manager di PT Trimegah Securities Tbk (1996-1999).

Hubungan Afiliasi: Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan (Armasyah Yamin, Syailendra S. Bakrie dan Adika Aryasthana Bakrie) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Perseroan (Anindya Novyan Bakrie dan Anindra Ardiansyah Bakrie) selanjutnya memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansjah Bakrie)

Kartini Sally – Direktur



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1965. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1988, gelar Master dari PPM School of Management pada tahun 1990, dan gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998. Beliau juga menjalani berbagai program pendidikan executive leadership, dari institusi-institusi ternama di Eropa dan Amerika Serikat.

Beliau menjabat sebagai Direktur dan Chief Investment Officer sejak Juli 2022. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Risk Management PT Bank HSBC Indonesia (2021 – 2025). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kemudian menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan sekaligus bertugas sebagai Direktur Pembina yang mensupervisi PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017, serta DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Bank Mandiri hingga akhir Maret 2018. Sebelum bergabung dengan BNBR, beliau memiliki pengalaman perbankan dan investasi di berbagai institusi.

Hubungan Afiliasi: Tidak ada

4. TATA KELOLA

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah organ yang berfungsi sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan OJK, BEI, dan regulator lainnya, serta dengan masyarakat dalam rangka menegakkan prinsip transparansi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi perseroan. Karena itu Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penata-usaha aktivitas sehari-hari dari lembaga Dewan Komisaris dan Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur & CLO.

Penunjukkan Christofer A. Uktolseja sebagai Sekretaris Perusahaan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi No.003/SK-BOD-BNBR/VI/15 tanggal 5 Juni 2015, dan telah diinformasikan kepada OJK melalui surat No. 046/BNBR/CS-OJK/VI/15 tanggal 8 Juni 2015.



Christofer Alexander Uktolseja – Sekretaris Perusahaan

Christofer Alexander Uktolseja, Warga Negara Indonesia, lahir di Prabumulih pada tahun 1973 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1997. Beliau menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan sejak Juni 2015, serta menjabat sebagai Head of Corporate Legal sejak tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1999 di Departemen Corporate Legal sebagai Legal Advisor. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Beliau pernah bergabung dengan salah satu perusahaan Oil & Gas terbesar di Indonesia yaitu Total E&P Indonesie (dahulu Total Indonesie).

Komite Audit

Komite Audit merupakan suatu komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, pengendalian internal, pengelolaan risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit (Audit Charter) perusahaan dan peraturan OJK no.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Audit Charter menguraikan secara lengkap tugas, peran dan fungsi kerja Komite.

Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris dengan kualifikasi profesional untuk mendukung sikap yang objektif. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah dilakukan review secara berkala oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Komisaris No. 22/SK-DEKOM/BNBR/VI/2026, per tanggal 12 Juni 2026 susunan Komite Audit untuk periode 2026 - 2029 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Adrian T. Parada Panggabean
Anggota	:	Raniwati
Anggota	:	Arief A. Dhani

Riwayat Singkat masing-masing Komite Audit:

Adrian T. Parada Panggabean – Ketua
Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris Perseroan.

Raniwati – Anggota
Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris Perseroan.

Arief A. Dhani – Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Memulai karir sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Drs Hadi Sutanto & Rekan / PricewaterhouseCoopers. Kemudian sebagai Partner di Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia, dan kemudian Partner pada Kantor Akuntan Publik Arman Dhani & Rekan. Pernah menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini, selain sebagai Akuntan Publik, juga menjadi anggota komite audit di Perseroan. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan gelar Magister Manajemen di bidang keuangan dari Universitas Pelita Harapan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014, pengelolaan nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS untuk dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam implementasinya, selaras dengan penerapan GCG, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Komisaris No. 15/SK-DEKOM/BNBR/X/2025, per tanggal 13 Oktober 2025 dinyatakan bahwa susunan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode 2025 - 2028 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Raniwati
Anggota	:	Armansyah Yamin
Anggota	:	Okder Pendrian

Riwayat Singkat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Raniwati – Ketua
Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris Perseroan.

Armansyah Yamin – Anggota

Dapat dilihat pada Keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris Perseroan.

Okder Pendrian – Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997 dan saat ini menjabat sebagai Chief Human Capital & Office Support. Selama berkarir di Perseroan, beliau sudah ditugaskan pada beberapa unit usaha, yaitu sebagai Chief Human Resources & Organization PT Bakrie Metal Industries dan HR Advisor di PT Darma Henwa Tbk. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor dan gelar MBA di bidang General Management dari IPMI Business School, Jakarta, serta gelar Doktor di bidang Strategic Management dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Unit Audit Internal

Divisi Internal Audit Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yaitu Muhammad Agung Himawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama & CEO atas persetujuan Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama & CEO. Dasar hukum pengangkatan kepala unit audit internal berdasarkan surat keputusan Direktur Utama Perseroan Nomor 021/SK/BNBR/BOD-ANB/VI/2026 tanggal 12 Juni 2026. Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Riwayat singkat Unit Audit Internal:

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1971 dan meraih gelar Diploma IV jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1999.

Beliau bergabung dengan Unit Audit Internal Perseroan sejak Juni 2026. Sebelum bergabung dengan Unit Audit Internal, beliau memulai karir sebagai Tax & Accounting Senior Manajer pada Bakrie Indo Infrastructure (2011 – Mei 2026), Project Control Manager pada Bakrie Indo Infrastructure (2008-2011), sebagai Senior Auditor pada Perseroan (2005-2008), sebagai Senior Auditor pada KAP Amoen Jogasara (2000-2004) dan sebagai Auditor Pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1993-2000). Beliau memiliki sertifikasi Investment Analysis & Financial Modeling in Toll Road Infrastructure, Fraud Audit, Finance and Non-Finance for Manager dan Tax Audit & PSAK 46.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Tahun 2019 merupakan tahun pencapaian penting Perseroan karena proyek tambang emas di Poboya, Palu, sudah menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan bijih dan memasuki tahap produksi. Proyek lainnya di Gorontalo dan Dairi juga terus mengalami kemajuan yang berarti.

Untuk mendukung peningkatan aktivitas operasional di ketiga proyek tersebut, Perseroan membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, berintegritas, siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, dan mampu menjadi bagian dari kerja sama tim yang telah menjadi budaya kerja di Perseroan. Perseroan membutuhkan tenaga profesional terbaik di bidang pertambangan mineral, geologi, metalurgi dan safety untuk mendukung pengembangan kapasitas produksi yang akan terus ditingkatkan dalam waktu 1-2 tahun ke depan.

Dalam memenuhi kebutuhan SDM terutama untuk mengisi posisi-posisi strategis, Perseroan mengutamakan rekrutmen internal dengan melakukan promosi, mutasi dan rotasi karyawan ke Entitas Anak. Kebijakan rekrutmen internal bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperkaya pengalaman, mengembangkan kompetensi dan meningkatkan karir.

Rekrutmen eksternal hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan kualifikasi yang belum dapat dipenuhi oleh SDM internal. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan masyarakat setempat, Perseroan memiliki kebijakan untuk merekrut tenaga kerja dari masyarakat lokal, sepanjang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Perseroan menerapkan prinsip keterbukaan, kewajaran, kesetaraan dan adil tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan gender dalam seluruh proses bisnis di lingkungan Perseroan. Praktik anti-diskriminasi dalam pengelolaan SDM diterapkan sejak dari proses rekrutmen karyawan, penilaian kinerja, remunerasi, hingga pengembangan kompetensi dan jenjang karir.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Doktor (S3)	3	2	5	1	2	4
Pasca Sarjana(S2)	28	72	100	28	72	100
Sarjana (S1)	64	695	759	54	712	766
Diploma	13	186	199	15	214	229
SMA	18	1.919	1937	19	2.017	2.035
SMP	2	152	154	2	153	155
SD	-	46	46	-	46	46
Jumlah Karyawan	**128**	**3.072**	**3.200**	**119**	**3.216**	**3.335**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Manajerial	13	20	33	10	18	28
VP/Senior Manajer	17	48	65	18	46	64
Manajer	28	139	167	29	129	158
Asisten manajer	4	170	174	4	164	168
Staf	44	886	930	36	902	938
Non Staf	22	1.809	1.831	22	1.930	1.952
Management Trainee	-	-	-	-	27	27
Jumlah Karyawan	**128**	**3.072**	**3.200**	**119**	**3.216**	**3.335**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
18 – 30 Tahun	19	959	978	20	984	1.004
31 – 45 Tahun	51	1251	1302	46	1.475	1.521
46 – 55 Tahun	33	717	750	30	687	717
> 55 Tahun	25	145	170	23	70	93
Jumlah Karyawan	**128**	**3.072**	**3.200**	**119**	**3.216**	**3.335**

Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Status	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Tetap	84	1.515	1.599	83	1.566	1.649
Kontrak	27	1.028	1.055	20	1.287	1.307
Alih daya dan koperasi (*Outsourcing*)	17	529	546	16	363	379
Jumlah Karyawan	**128**	**3.072**	**3.200**	**119**	**3.216**	**3.335**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Holding	128	-	128	119	-	119
Unit usaha	-	3.072	3.072	-	3.216	3.216
Jumlah Karyawan	**128**	**3.072**	**3.200**	**119**	**3.216**	**3.335**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Jakarta	128	188	316	119	160	279
Bekasi,Tangerang, Magelang, Kalimantan	-	2.884	2.884	-	3.056	3.056
Jumlah Karyawan	**128**	**3.072**	**3.200**	**119**	**3.216**	**3.335**

Pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya

NAMA	JABATAN	USIA	MASA KERJA	SERTIFIKASI PROFESIONAL
Mochamad Setyo Budi	Manager Audit	41	2 tahun	QRMA
Raffly Fauzan Hartadi	Staff Audit	25	1 tahun	QIA
Betrika Oktaresa	Risk Management Manager	39	3 tahun	CCSA, CRMP
Silvy Aulya	AM Risk Management	35	13 Tahun	ERMAP
Manar Barmawi	Corporate Finance Manager	49	4 Tahun	CA, CPA (Aust.), ASEAN CPA, CFP, QWP, CRP, GRCE, Lisensi OJK WPPE, Lisensi OJK WPEE, Certified Assesor Competency (Pasar Modal), Certified Instructor

Seluruh pegawai Perseroan yang memiliki keahlian khusus merupakan karyawan tetap Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Sarana pendirikan dan pelatihan

Perseroan bekerjasama dengan Universitas Bakrie untuk mengadakan program pelatihan *soft skill* ataupun *hard skill* untuk karyawan.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

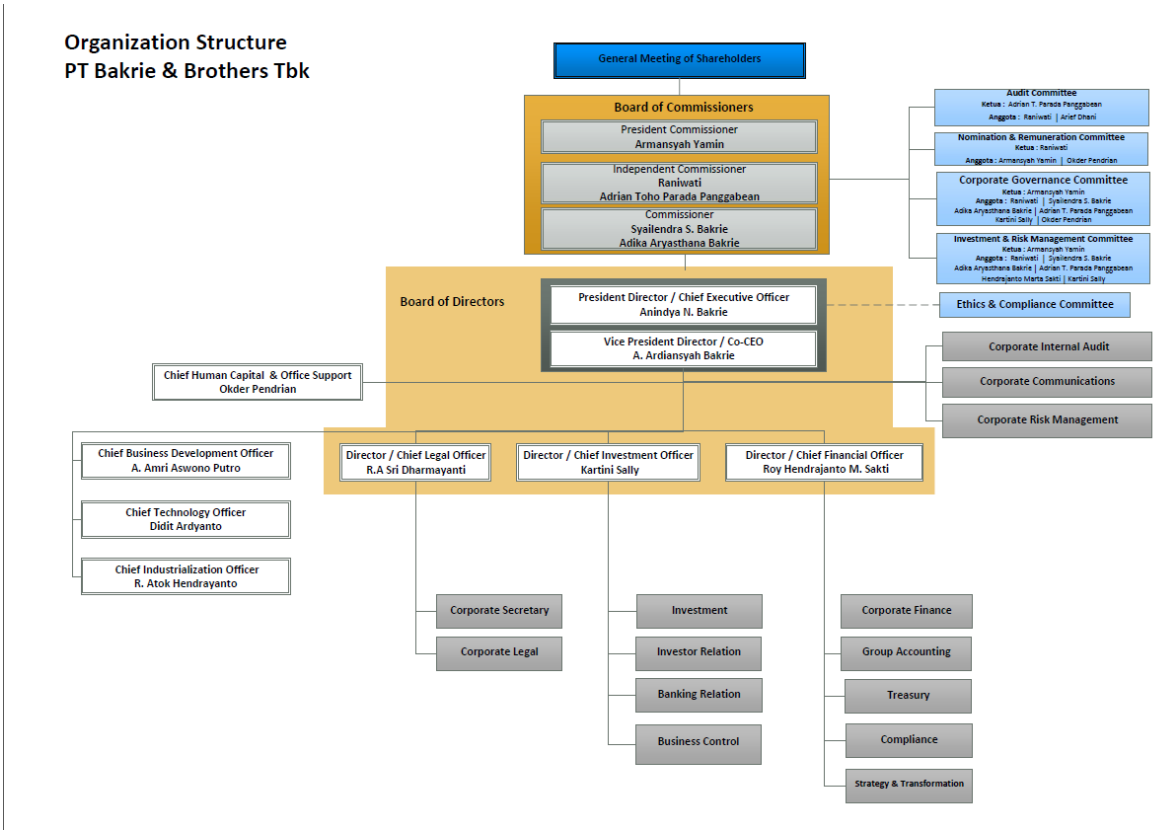

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

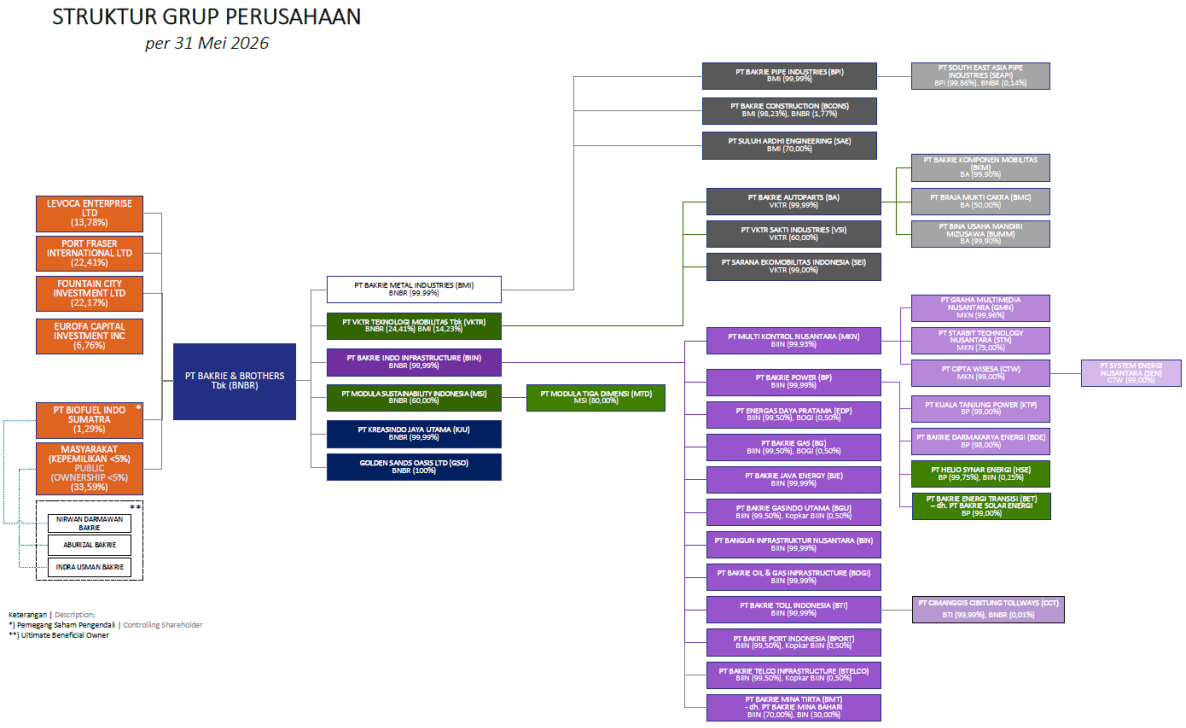

Pengendali Perseroan adalah kelompok terorganisasi (terdiri dari Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 POJK 9/2018. Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie memiliki hubungan keluarga satu sama lain dan karenanya merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM. Dengan demikian, Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie sebagai kelompok terorganisasi yang memiliki hubungan afiliasi satu sama lain dapat bekerja sama untuk membuat rencana, kesepakatan, dan keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu pada Perseroan melalui kepemilikan secara langsung Aburizal Bakrie dan Indra Usmansjah Bakrie pada Perseroan dan kepemilikan secara tidak langsung Nirwan Dermawan Bakrie (melalui kepemilikan sahamnya pada sejumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pada PT Biofuel Indo Sumatra), dimana pihak-pihak tersebutlah yang mengendalikan Perseroan

Pemilik manfaat akhir Perseroan adalah Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
1.	BMI	Pabrikasi baja bergelombang dan "multiplate " (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 5,77% dari total pendapatan Perseroan)	99,99		1981	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 8120006942156 b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.000.581.7-431.000 c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 20122310213275261 d. Izin Usaha Industri No. 81200069421560050

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
2.	BPI	Pabrikasi pipa baja (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 47,28% dari total pendapatan Perseroan)		BMI 99,99	1979	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 5812000386 1355 b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.002.927.0-062.000 c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 21042410213275186 d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 21042410213275185 e. Sertifikat Standar No. 81200038613550017
3.	SEAPI	Pabrikasi pipa baja (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 5,2% dari total pendapatan Perseroan)		BPI 99,99	1995	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 8120300820528 b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 03072310511800001 c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. 03072310511800001 d. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan No. 031/Pertek/PAL/SEAPI/V.10/2023 e. Izin Pembangunan Terminal Khusus Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi No. A.700/AL.308/DJPL/E f. Sertifikat Standar No. 812030082052800030004 g. Sertifikat Pembangunan dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Lokasi Terminal Khusus No. NV.006/2/15/DJPL-24
4.	Bcons	Konstruksi baja (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 4,58% dari total pendapatan Perseroan)		BMI 98,23	1985	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 8120216052342. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.064.300.5-059.000. c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 11022210213604023. d. Izin Usaha Industri No. 23/36/IU/PMDN/2017. e. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. 812021605234200200010. f. Sertifikat Standar No. 81202160523420010. g. Sertifikat Standar No. 81202160523420011.
5.	SAE	Konstruksi bangunan sipil (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,19% dari total		BMI 70,00	2023	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 9120009280515. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.796.305.7-062.000. c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 30112210113174670.

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
		pendapatan Perseroan)					d. Sertifikat Standar No. 91200092805150004. e. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. 1653/SKUP-J/DMB/2026.
6.	BPIL	Konstruksi pipe (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)		BMI 60,00	2024	Tidak Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 2011240032098. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 12.533.817.8-011.000.
7.	BIIN	Pembangunan dan jasa (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 12,4% dari total pendapatan Perseroan)	99,99		2008	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 0709240001224. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.672.385.8-011.000. c. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 07092410113174717.
8.	BG	Perdagangan minyak dan gas bumi		BIIN 99,50	2006	Tidak Aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.545.994.2-011.000.
9.	BGU	Perdagangan minyak dan gas bumi		BIIN 99,50	2006	Tidak Aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.545.700.3-011.000.
10.	BJE	Perdagangan minyak dan gas bumi		BIIN 99,99	2006	Tidak Aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.545.701.1-011.000.
11.	EDP	Perdagangan minyak dan gas bumi		BIIN 99,50	2006	Tidak Aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.545.699.7-011.000.
12.	BP	Pembangkit tenaga listrik (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0% dari total pendapatan Perseroan)		BIIN 99,99	1994	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 9120208931986. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 0016576423011000. c. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 91202089319860013. d. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 91202089319860014.
13.	BDE	Pembangkit tenaga Listrik (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0% dari total pendapatan Perseroan)		BP 98,00	2011	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 8120117090559. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.114.168.2-011.000. c. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi No. 188/63/KPTS/119.3/2011. d. Izin Panas Bumi No. 2682 K/30/MEM/2015.
14.	KTP	Pembangkit tenaga listrik		BP 99,00 BIIN 1,00	2011	Tidak aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	a. Nomor Induk Berusaha No. 9120112010078. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.205.433.0-018.000.
15.	HSE	Pembangkit tenaga Listrik (memberikan kontribusi		BP 99,75 BIIN	2021	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 0230000931204.

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
		pendapatan sebesar 0,43% dari total pendapatan Perseroan)		0,75			b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 95.801.038.1-011.000. c. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 02032310113174017. d. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 02032310213275136. e. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 02032310213275137. f. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 02032310113174079. g. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 02032310113174084. h. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 02032310113174086. i. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 02300009312040003. j. Sertifikat Standar No. 02300009312040004. k. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik No. 02300009312040012.
16.	BET	Pembangkit tenaga Listrik	BP 99,00 BIIN 1,00		2016	Tidak aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	a. Nomor Induk Berusaha No. 9120000560018. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 81.541.626.8-011.000.
17.	BIN	Pembangunan dan jasa	BIIN 99,99		2008	Tidak aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.672.557.2-011.000.
18.	BMT	Perdagangan umum	BIIN 70,00 BIN 30,00		2017	Tidak aktif (tidak beroperasi karena sudah tidak ada kegiatan usaha terkait bisnis sebelumnya)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 83.547.698.7-011.000 .
19.	BOGI	Pembangunan dan jasa	BIIN 99,99		2008	Tidak aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.672.600.0-011.000.
20.	BTelco	Pembangunan dan jasa	BIIN 99,50		2008	Tidak aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.877.539.3-011.000
21.	BTI	Pembangunan dan jasa (memberikan kontribusi	BIIN 99,99		2023	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 0709240001472. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.672.599.4-011.000.

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
		pendapatan sebesar 0% dari total pendapatan Perseroan)					c. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 07092410113174722.
22.	BPort	Pembangunan dan jasa		BIIN 99,50	2008	Tidak aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.877.538.5-011.000.
23.	MKN	Jasa informasi teknologi, telekomunikasi, sistem integrasi, multimedia, dan jaringan (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 8,06% dari total pendapatan Perseroan)		BIIN 99,93	1984	Aktif	a. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 0013 7190 5906 2000. b. Nomor Induk Berusaha No. 9120100251593. c. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 18082510113174079. d. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 18082510113174078. e. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 18082510113174075. f. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 18082510113174076. g. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 18082510113174077. h. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310213174367. i. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174410. j. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174411. k. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310213174364. l. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174375. m. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 18042210213174483. n. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 11022610213174331. o. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174405.

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
							p. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174409. q. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310213174352. r. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310213174357. s. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174370. t. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174371. u. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174373. v. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174407. w. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174408. x. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 11022610113174334. y. Sertifikat Standar No. 91201002515930030. z. Sertifikat Standar No. 91201002515930029. aa. Izin Penyeleggara Jaringan Tetap Tertutup Melalui Media Fiber Optik Sistem Komunikasi Kabel Laut No. 91201002515930021. bb. Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data No. 91201002515930022 .
24.	GMN	Jasa internet dan TV kabel (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,69% dari total pendapatan Perseroan)	MKN 99,96		2007	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 9120204540239. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.672.264.5-011.000. c. Surat Keterangan Laik Operasi No. 529/TEL.04.02/2021. d. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 67/TEL.01.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 1573 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet.

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama	
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -				
							f.	Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika No. 123 Tahun 2016 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Akses Internet.
25.	CTW	Perdagangan		MKN 99,00	2013	Tidak Aktif (tidak beroperasi karena sudah tidak ada kegiatan usaha terkait bisnis sebelumnya)	a. b.	Nomor Induk Berusaha No. 9120210210566. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.287.166.7-018.000.
26.	SEN	Perdagangan umum (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,57% dari total pendapatan Perseroan)		CTW 99,00	2013	Aktif	a. b. c. d. e. f. g. h.	Nomor Induk Berusaha No. 9120004621171. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.877.450.3-011.000. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310113174307. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12012310213174243. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untukg Kegiatan Berusaha No. 27062410113174387. Sertifikat Standar No. 91200046211710020. Sertifikat Standar No. 91200046211710023. Sertifikat Standar No. 91200046211710001.
27.	STN	Informasi teknologi, infrastruktur dan jasa (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,27% dari total pendapatan Perseroan)		MKN 75,00	2010	Aktif	a. b. c. d.	Nomor Induk Berusaha No. 9120407842582. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.672.102.7-011.000. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 15032310113174107. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 306/TEL.02.02/2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi PT Starbit Technology Nusantara.
28.	VKTR	Kendaraan listrik dan usaha lainnya terkait kendaraan Listrik (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 6,55% dari total pendapatan Perseroan)	24,41	BMI 14,23	2007	Aktif	a. b. c. d. e.	Nomor Induk Berusaha No. 9120507793713. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.672.214.0-006.000. Sertifikat Standar No. 91205077937130010. Sertifikat Standar No. 91205077937130005. Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 7107/SJ-IND.8/E-TKDN/8/2024.
29.	BA	Pabrikasi besi cor dan komponen otomotif		VKTR 99,99	1974	Aktif	a. b.	Nomor Induk Berusaha No. 8120315101853. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.001.778.8-431.000.

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama	
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -				
		(memberikan kontribusi pendapatan sebesar 12,81% dari total pendapatan Perseroan)					c. d. e.	Izin Usaha No. 81203151018530004. Sertifikat Laik Fungsi No. 601/015/SLF/Distaru.Faru. Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat) PB-UMKU No. 812031510185300040001.
30.	BMC	Industri suku cadang kendaraan bermotor (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 13,55% dari total pendapatan Perseroan)		BA 50,00	1986	Aktif	a. b. c. d. e. f. g. h.	Nomor Induk Berusaha No. 8120109961626. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.437.811.1-431.000. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 13042310113171200. Sertifikat Standar No. 81201099616260002. Izin Pengusahaan Air Tanah PB-UMKU No. 812010996162600020003. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PB-UMKU No. 812010996162600020004. Izin Pengusahaan Air Tanah PB-UMKU No. 812010996162600020003. Sertifikat Laik Fungsi Gedung No. SK-SLF-327503-08052023-001.
31.	BUMM	Industri suku cadang kendaraan bermotor (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 3,61% dari total pendapatan Perseroan)		BA 99,00	2010	Aktif	a. b. c. d. e. f. g.	Nomor Induk Berusaha No. 8120013210417. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.060.298.5-055.000. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 06092310213671117. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 06092310213671117. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PB-UMKU No. 812001321041700030002. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PB-UMKU No. 812001321041700020002. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PB-UMKU No. 812001321041700020001.
32.	BKM	Industri suku cadang kendaraan bermotor (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0% dari total pendapatan Perseroan)		BA 99,90	2024	Aktif	a. b.	Nomor Induk Berusaha No. 0504240030667. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 20.775.058.9-427.000
33.	VSI	Industri karoseri kendaraan bermotor		VKTR 60,00	2023	Aktif	a. b.	Nomor Induk Berusaha No. 2405230069675. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 40.992.699.5-524.000.

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
		(memberikan kontribusi pendapatan sebesar 5,32% dari total pendapatan Perseroan)					c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 24042410213308005. d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 24042410213308006. e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 24042410213308007. f. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 14052410313308006.
34.	SEI	Perdagangan besar suku cadang kendaraan bermotor		VKTR 99,00	2023	Tidak Aktif (tidak beroperasi karena masih dalam pengembangan bisnis)	a. Nomor Induk Berusaha No. 1010230183429. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 50.633.002.6-011.000.
35.	MSI	Jasa konstruksi	60,00		2022	Tidak aktif (tidak beroperasi karena belum ada proyek terkait)	a. Nomor Induk Berusaha No. 1409220127672. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 65.847.098.4-011.000.
36.	MTD	Jasa konstruksi (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0% dari total pendapatan Perseroan)		MSI 80,00	2022	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 1312220054276. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 62.066.249.4-011.000.
37.	CCT	Aktivitas jalan tol (memberikan kontribusi pendapatan sebesar 2,38% dari total pendapatan Perseroan)	0,00000004	BTI 99,999999 96	2025	Aktif	a. Nomor Induk Berusaha No. 8120217290272. b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.718.315.1-011.000. c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 21082410113275224. d. Sertifikat Standar No. 81202172902720005.
38.	GSO	Investasi	100		2024	-	-
39.	KJU	Perdagangan	99,99	BIIN 0,01	2010	Tidak aktif (tidak beroperasi karena sudah tidak ada kegiatan usaha terkait bisnis sebelumnya)	a. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00091/WPJ.04/LP.01.03/2011 b. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.078.682.6-011.000

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak Perseroan.

Pengurus	ANB	AAB	RH	YS	KS	AY	RM	AP	SSB	AYB	RAH	NSG	RBT	AAP	IDA	TEN	MF	VBK	SW	AA	DAR	TO	RNS	AKW	GWS	WDD	YI	TK	ANA	LAAS	DPD	DB	ASF	RUD	YWS	DA	HA	HLN	ABT	MDI	SRKB	RRIS	BSR
Jabatan dalam Perseroan	DU	WDU	D	D	D	KU	KI	KI	KI	K																																	
Pemegang Saham																																											
LE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengurus		ANB	AAB	RH	YS	KS	AY	RM	AP	SSB	AYB	RAH	NSG	RBT	AAP	IDA	TEN	MF	VBK	SW	AA	DAR	TO	RNS	AKW	GWS	WDD	YI	TK	ANA	LAAS	DPD	DB	ASF	RUD	YWS	DA	HA	HLN	ABT	MDI	SRKB	RRIS	BSR
PFI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Anak																																										
1.	BMI	KU	K	K	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	BIIN	-	DU	D	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	VKTR	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	D	-	-	-	DU	-	-	-	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MSI	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	BPI	KU	-	K	-	-	-	-	-	-	-	DU	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BCons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	D	-	-	-	-	-	-
8.	BPIL	-	KU	K	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	BG	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	BGU	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	BJE	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	EDP	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	BP	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	BIN	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	BOGI	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	BTelco	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	BTI	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	BPort	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	BMT	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D										
20.	MKN	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	D	-	-	-	-	-
21.	BA	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	D	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	VSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	KU	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	SEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	SEAPI	-	KU	K	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	BMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	D	KU	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	BUMM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	K	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	BKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	BDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	DU	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	KTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	HSE	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	BET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	GMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
33.	CTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
34.	STN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	D	-	-	-	-	-
35.	SEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	K
36.	MTD	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	DU	D	D	-	-
37.	CCT	-	KU	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	DU	-	-	-	-	-	-	-
38.	GSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	KJU	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	D

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

WDU : Wakil Direktur Utama

D : Direktur

WDU : Wakil Direktur Utama

KI : Komisaris Independen

LE : Levoca Enterprise Lted

FCI : Fountain City Investment Ltd

BIS : PT Biofuel Indo Sumatra

ANB : Anindya Novyan Bakrie

AAB : Anindra Ardiansyah Bakrie

HMS : Hendrajanto Marta Sakti

AAP : Ir. Achmad Amri Aswono Putro

MF : Mahzil Febri

AA : Ahmad Abadi

TO : Takuya Ogawa

AKW : Andi Kurniawan Widodo

NSG : Nrs Sitimila Garmilah

YS : Raden Ajeng Sri Dharmayanti

KS : Kartina Sally Hb Joenoes

AY : Armansyah Yamin

DB : Deffry Berliansyah

RM : Raniwati Malik

ATP : Adrian Toho Parada

SSB : Syailendra S. Bakrie

PFI : Port Fraser International Ltd

ECI : Eurofa Capital Investment Ltd

BSR : Budi S. Reksoprodjo

AAYB : Adika Aryasthana Bakrie

RAH : Raden Atok Hendrayanto

RBT : Rachmat Budiarto

TEN : Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

VBK : V. Bimo Kurniatmoko

DAR : Dino Ahmad Ryandi

RNS : Ronald Nehemia Marulitua Sinaga

GWS : Gilarsi Wahju Setijono

IDA : Ir. Iskandar Ihsan Daulay

ANA	:	Ananda Arthanelly	ASF	:	Ir. Achmad Sulaiman F
WDD	:	Widodo	YI	:	Yudhi Irwanto
TK	:	Totok Kusdianto	SW	:	Sutono Widarta
LAAS	:	Loard Aamer Ahmad Sarfraz	DPD	:	Dino Patti Djalal
MA	:	Muhammad Agung Himawan	RUD	:	Ruddyar
YWS	:	Y. Widi Suharyanto	DA	:	Didit Ardyanto
HA	:	Handra Azwar	HLN	:	Hendrik Lund-Nielsen
ABT	:	Adi Bagus Tirto	MDI	:	Mohamad Debiyarto Imran
SRKB	:	Simon Rolf Klint Bergh	RRIS	:	Raden Roro Irma Setyowati
DTW	:	Dody Taufiq Wijaya	ING	:	Indra Novan Ginting

10. HARTA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas merek-merek yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

No.	Hak Kekayaan Intelektual	Deskripsi	Nomor Regitrasi	Tanggal Pendaftaran
4.	Hak Cipta	Seni Lukis Logo "BAKRIE"	004545	24 Juni 1991
5.	Hak Cipta	Seni Lukis Logo "BAKRIE"	004547	24 Juni 1991

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan pihak ketiga

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak-pihak ketiga berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup	Pembatasan terhadap Transaksi
1.	Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 Februari 2025 oleh dan antara Perseroan dan PT Mandala Raya Yuwana sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen 1 Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 Februari 2026	• PT Mandala Raya Yuwana sebagai pihak pertama; dan • Perseroan sebagai pihak kedua.	Masa berlaku perjanjian ini sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 17 Februari 2027	Pemberian pinjaman oleh PT Mandala Raya Yuwana kepada Perseroan sebesar Rp81.687.500.000 dengan beban bunga sebesar 2,50% per tahun dan akan dibayarkan pada saat pinjaman jatuh tempo dimana pinjaman ini ditujukan untuk modal kerja Perseroan, dengan jumlah outstanding sebesar Rp95.759.615.828 per tanggal 31 Desember 2025.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V. Selain itu, perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar perjanjian kredit lainnya yang mengikat Perseroan.
2.	Perjanjian Penyelesaian 007/RAI-BNBR/PP/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 oleh dan antara Perseroan dan PT Rekapital Aset Indonesia sebagaimana telah direstrukturisasi dan terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Penyelesaian No. 189/RAI/DIR/IV/2024 tanggal 4 April 2024.	• PT Rekapital Aset Indonesia sebagai pihak pertama; dan • Perseroan sebagai pihak kedua.	Sejak tanggal perjanjian ini yaitu 29 Mei 2019 sampai dengan 25 Desember 2030.	Penjualan saham milik Perseroan dalam PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebanyak 122.727.273 saham kepada PT Rekapital Aset Indonesia melalui mekanisme crossing pada tanggal 3 Maret 2015 dengan nilai transaksi sebesar Rp27.000.000.000 dengan beban bunga sebesar 12% per tahun. Per tanggal 31 Desember 2025, saldo outstanding terkait transaksi tersebut adalah sebesar Rp13.580.113.549.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

3.	Perjanjian Utang Piutang tertanggal 23 September 2022 oleh dan antara Perseroan dan PT Surya Ganesa Amani sebagaimana terakhir Kali diubah dengan Amandemen 2 Perjanjian Hutang Piutang tanggal 23 September 2025	• Perseroan sebagai pihak pertama; dan • PT Surya Ganesa Amani sebagai pihak kedua.	Masa berlaku perjanjian ini sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 22 September 2026.	Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada PT Surya Ganesa Amani sebesar Rp5.300.000.000 dengan beban bunga sebesar 3% per bulan yang akan dibayar pada saat pinjaman jatuh tempo. Berdasarkan *assessment* yang telah dilakukan Perseroan dengan mempertimbangkan tingkat rata-rata suku bunga deposito perbankan yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, yang pada saat itu berada pada kisaran di bawah 3% per tahun, Perseroan menilai bahwa tingkat bunga pinjaman sebesar 3% per tahun yang dikenakan kepada PT Surya Ganesa Amani telah mencerminkan tingkat bunga yang sesuai dengan kondisi pasar pada saat pemberian pinjaman. Pinjaman ini diberikan untuk kebutuhan operasional PT Surya Ganesa Amani. Saat ini jumlah *outstanding* perjanjian pinjaman sebesar Rp5.300.000.000 per tanggal 31 Desember 2025. Perseroan telah memperoleh persetujuan dewan komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bakrie & Brothers Tbk tanggal 23 September 2022 atas pemberian pinjaman kepada PT Surya Ganesa Amani.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V. Selain itu, perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar perjanjian kredit lainnya yang mengikat Perseroan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tidak terdapat pembatasan yang membatasi atau melarang Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Dengan demikian, transaksi pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada PT Surya Ganesa Amani tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4.	Surat Hutang Nomor 33 tanggal 19 November 2025 yang dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("Perjanjian Hutang Bank Mayapada").	• Perseroan sebagai penerima pinjaman; dan • PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebagai pemberi pinjaman.	Masa berlaku untuk: a. Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan 24 November 2030; dan b. Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 25 November 2026	Pemberian pinjaman oleh PT Bank Mayapada Internasional Tbk kepada Peseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.100.000.000.000 dalam bentuk: a. Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp550.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun; dan b. Pinjaman Tetap On Demand sebesar Rp550.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Adapun jumlah outstanding dari kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 1.093.265.554.149 per tanggal 31 Desember 2025 Pinjaman diberikan oleh PT Bank Mayapada Internasional Tbk kepada Perseroan untuk tujuan akuisisi saham dan pengalihan atas seluruh piutang CCT, dengan rincian sebagai berikut: a. sebanyak 28.000.000 saham CCT yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road ("WTR") atau setara dengan 35% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT; dan b. sebanyak 44.000.000 saham CCT yang dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") atau setara dengan 55% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT.	Berdasarkan Pasal 10 ayat 2.b Romawi VI Surat Hutang No. 33/2025, tanpa persetujuan dari pemberi pinjaman, penerima pinjaman dilarang untuk (i) melakukan perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham dan (ii) pembagian keuntungan/dividen. Sehubungan dengan ketentuan di atas dan dalam kaitannya dengan PMHMETD V, Perseroan telah memperoleh persetujuan dan pencabutan berdasarkan Surat Bank Mayapada No. 083/EXT/CB-BMI/II/26 tanggal 26 Februari 2026 perihal Surat Menyetujui Permohonan Persetujuan dan Pencabutan Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Hutang Bank Mayapada

5.	Akta Perjanjian Pembiayaan Sindikasi No. 5 tanggal 20 November 2025 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.	• CCT sebagai penerima pinjaman; • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebagai pemberi pinjaman; • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen penampungan; • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan; dan • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agen fasilitas selanjutnya disebut ("Para Pemberi Pinjaman").	20 November 2025 sampai dengan 20 November 2040.	Pemberian fasilitas pembiayaan sindikasi oleh pemberi pinjaman kepada CCT sebesar Rp8.500.000.000.00, yang terdiri atas: a. Tranche 1 (kredit investasi pokok konvensional) sebesar Rp6.185.051.000.000,-, digunakan untuk pelunasan Shareholder Loan (SHL) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai outstanding sebesar Rp7.130.643.450.000 per 31 Desember 2025; dan b. Tranche 2 (kredit investasi pokok konvensional) sebesar Rp2.314.949.000.000,-, digunakan untuk pelunasan Shareholder Loan (SHL) kepada BTI dengan nilai outstanding sebesar 2.668.866.550.000 per 31 Desember 2025. dengan tingkat bunga yang ditetapkan pada tanggal penetapan tingkat suku bunga, yaitu 2 hari kerja sebelum, periode perhitungan bunga, kecuali untuk pertama kalinya adalah pada 2 hari kerja sebelum pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan pertama kali. Fasilitas Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali proyek jalan tol cimanggis–cibitung, pelunasan kewajiban CCT kepada pemegang saham dan pihak terkait.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V

6.	Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Musyarakah Mutanaqishah No. 6 tanggal 20 November 2025.	• CCT sebagai penerima pinjaman; • PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai agen syariah; • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen penampungan; • PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai agen fasilitas; • PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebagai agen jaminan; • PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebagai pemberi pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ("Para Pemberi Pinjaman").	20 November 2025 sampai dengan 20 November 2040.	Pemberian pembiayaan sindikasi oleh pemberi pinjaman kepada CCT sebesar Rp1.300.000.000, yang terdiri atas: a. Fasilitas Tranche 1 (pembiayaan investasi pokok syariah) sebesar Rp945.949.000.000 yang digunakan untuk pelunasan Shareholder Loan (SHL) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ; dan b. Fasilitas Tranche 2 (pembiayaan investasi pokok syariah) sebesar Rp354.051.000.000 digunakan untuk pelunasan Shareholder Loan (SHL) kepada BTI. Pemberian pembiayaan sindikasi oleh pemberi pinjaman kepada CCT tidak dikenakan bunga. Per 31 Maret 2026, saldo pokok outstanding atas pembiayaan sindikasi MMQ untuk tranche I dan tranche II adalah sebagai berikut: a. Tranche I sebesar Rp945.854.405.100.000; dan b. Tranche II sebesar Rp354.015.594.900.000.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

7.	Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. 06/FPPS/WTR/2016 tanggal 24 Mei 2016 No. Pihak Pertama: ADD/21.1/WTR/1225 dan No. Pihak Kedua 17.01/DU-CCT/ADD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025.	• PT Waskita Toll Road sebagai pihak pertama; dan • CCT sebagai pihak kedua.	17 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2031.	PT Waskita Toll Road telah memberikan pinjaman kepada CCT dengan nilai outstanding atas hutang pokok per tanggal 28 November 2025 sebesar Rp167.026.977.357 dengan pokok pinjaman tersebut dibebankan bunga sebesar 7.95% per tahun. Atas jumlah pinjaman tersebut terdapat outstanding pinjama sebesar Rp275.068.826.826 per 31 Desember 2025 dan nilai outstanding bunga dan provisi per tanggal 28 November 2025 dengan rincian sebagai berikut: a. bunga sebesar Rp106.420.598.246; dan b. provisi sebesar Rp404.042.127. Jumlah pinjaman tersebut digunakan oleh CCT untuk keperluan dana talangan tanah pada ruas jalan tol cimanggis – cibitung.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

8.	Perjanjian Fasilitas tanggal 14 November 2025.	• BTI sebagai penerima pinjaman; dan • Hartman International Pte. Ltd. sebagai pemberi pinjaman.	Berlaku selama tiga tahun sejak tanggal utilisasi pertama atas pinjaman ini, yakni tanggal ketika seluruh syarat pendahuluan telah dipenuhi, dikecualikan, dan/atau ditangguhkan oleh Hartman International Pte. Ltd.	Pemberian Fasilitas pinjaman dalam jumlah Rp4.816.000.000.000 dengan bunga sebesar 17% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan BTI untuk tujuan pembelian: a. 35% dari saham CCT yang telah ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan fully diluted basis dari PT Waskita Toll Road; dan b. 55% dari saham CCT berdasarkan fully diluted basis dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Adapun jumlah outstanding dari kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 3.662.417.779.559 per tanggal 31 Desember 2025.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

9.	Akta Facility Agreement No. 21 tanggal 19 November 2025 yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Facility Agreement No. 21").	• BTI sebagai penerima pinjaman; • PT Bank Nationalnobu Tbk sebagai agen, agen jaminan, dan pemberi pinjaman; dan • Perseroan sebagai penjamin.	Satu tahun sejak tanggal penarikan ("Tanggal Jatuh Tempo Awal") atau dua tahun sejak tanggal penarikan apabila BTI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada agen yang disampaikan paling lambat 30 hari sebelum Tanggal Jatuh Tempo Awal ("Pemberitahuan Perpanjangan") dengan tunduk pada: a. BTI telah membayar biaya perpanjangan perjanjian fasilitas; b. BTI telah menyerahkan valuasi tanah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05100 yang berlokasi di Jalan Terusan Hang Lekir IV No 31-33, Grogol Selatan, Kebayoran Lama; dan c. pengisian kembali rekening cadangan BTI oleh BTI hingga paling sedikit sebesar saldo minimum rekening cadangan BTI, yaitu dana yang setara dengan jumlah pembayaran bunga yang dijadwalkan berikutnya	Pemberian fasilitas pinjaman oleh PT Bank Nationalnobu Tbk sebesar Rp700.000.000.000 dengan beban bunga sebesar 7% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk: a. pembayaran sebagian dari harga pembelian atas saham akuisisi berdasarkan dokumen akuisisi serta pelunasan pinjaman pemegang saham yang masih terutang oleh CCT kepada PT Waskita Toll Road dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan/atau b. pembayaran biaya, ongkos, dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen pembiayaan, termasuk pendanaan rekening cadangan BTI guna memenuhi saldo minimum rekening cadangan BTI yang mencakup pembayaran bunga sejak	Berdasarkan Pasal 18.26 Akta Facility Agreement No. 21 tanpa persetujuan tertulis dari agen, penerima pinjaman (dan harus memastikan bahwa tidak ada pemberi jaminan (selain pihak transaksi individual mana pun) dilarang untuk mengubah, memvariasikan, atau menambah dalam hal apa pun, atau melepaskan hak-hak material dan/atau upaya pemulihan materialnya berdasarkan, atau mengakhiri, mencabut, menggantikan, atau membatalkan, dokumen konstitusional orang tersebut, kecuali untuk setiap perubahan terhadap dokumen konstitusional yang secara wajar tidak dapat diharapkan akan merugikan secara material kepentingan salah satu atau seluruh pihak pembiayaan berdasarkan salah satu atau seluruh dokumen pembiayaan.

			untuk periode 12 bulan sehubungan dengan pinjaman ini ("Saldo Minimum Rekening Cadangan BTI"), selambat-lambatnya pada tanggal Pemberitahuan Perpanjangan.	tanggal penarikan sampai dengan tanggal pembayaran bunga yang jatuh 12 bulan setelah tanggal pendanaan penarikan. Adapun jumlah outstanding dari kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 700.000.000.000 per tanggal 31 Desember 2025.	Berdasarkan Akta Facility Agreement No. 21, Perseroan merupakan termasuk pemberi jaminan. Sehubungan dengan ketentuan di atas dan dalam kaitannya dengan PMHMETD V Perseroan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Nobu No. 0153/EXT/CL/KP-JLN/III/2026 tanggal 5 Maret 2026 perihal Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan Selaku Corporate Guarantor atas Fasilitas Kredit PT Bakrie Toll Indonesia.
10.	Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cimanggis – Cibitung No. 4 tanggal 7 Juli 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Amandemen IX Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis – Cibitung No. 6 tanggal 11 Mei 2021.	• CCT; dan • Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT").	10 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2061.	CCT menerima hak pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh BPJT dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

11.	Kontrak Pengadaan Meterial Precast dan Beton Ready Mix Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2: STA 26+950 – STA 50+373 No. 02/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana terakhir Kali diubah dengan Addendum XXI Kontrak Pengadaan Material Precast dan Beton Ready Mix Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2: STA.27+070 – STA.50+084 No. 07.01/DT1-CCT/ADD/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.671.345.563.083.	• CCT; dan • PT Waskita Beton Precast Tbk ("WSBP").	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selambat-lambatnya 2.893 hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak atau sampai dengan 31 Mei 2024. Pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan, namun saat ini masih dalam masa pemeliharaan sehingga belum dilakukan serah terima.	CCT menunjuk dan memberi tugas kepada WSBP untuk melaksanakan pekerjaan yang mencakup pengadaan beton, precast, baja, dan besi beton sesuai spesifikasi.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

12.	Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 STA 27+070 s/d STA 50+373 No. 01/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana terakhir Kali diubah dengan Addendum XXV Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 STA.27+070 – STA.50+084 No. 07.04/DT1-CCT/ADD/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.247.939.502.135.	• CCT; dan • PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT").	Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan adalah selama 3.059 hari kalender terhitung sejak (i) penandatanganan perjanjian; (ii) penandatanganan berita acara serah terima lahan; dan (iii) penerbitan surat perintah mulai kerja, terpenuhi secara kumulatif atau sampai dengan 12 Desember 2024. Pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan, namun saat ini masih dalam masa pemeliharaan sehingga belum dilakukan serah terima.	CCT menunjuk dan memberi tugas kepada WSKT untuk melaksanakan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol cimanggis cibitung seksi 2 STA 27+070 s/d STA 50+373 No. 01/SPPJK/CCT/2016.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.
13.	Perjanjian Kredit Nomor 027/JPM/PK-CCC/2025 tanggal 17 September 2025	• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak pertama; dan • BCONS sebagai pihak kedua.	17 September 2025 – 17 September 2026.	Pemberian pinjaman oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada BCONS maksimum sebesar Rp100.000.000.000 dengan bunga sebesar 1% per tahun di atas tarif bunga simpanan yang dijaminkan, dalam bentuk *cash collateral credit* untuk tambahan modal kerja kontraktor EPC.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

Perjanjian dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi, sebagai berikut:

	Nama Perjanjian	Pihak	Hubungan afiliasi dengan Perseroan	Jangka Waktu	Ruang Lingkup	Pembatasan terhadap Transaksi
1.	Perjanjian Pinjaman Wajib Konversi oleh dan antara Perseroan dan BTI tanggal 21 November 2025.	• Perseroan sebagai pihak pertama; dan • BTI sebagai pihak kedua.	BTI adalah perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya secara langsung dan/atau tidak langsung dimiliki paling sedikit 99% dari setoran modal Perseroan. Dana pinjaman BTI atas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan digunakan untuk modal kerja pihak kedua atau afiliasinya, dan/atau untuk tujuan lain sebagaimana disepakati para pihak.	21 November 2025 – 21 November 2030.	Pemberian fasilitas pinjaman wajib konversi (mandatory convertible loan) kepada BTI sebesar Rp928.000.000.000, dengan ketentuan pinjaman yang masih outstanding secara otomatis akan dikonversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh BTI.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PMHMETD V.

Perjanjian sehubungan dengan PMHMETD V

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, Perseroan dan BTI telah menandatangani perjanjian sebagai berikut:

	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Ruang Lingkup	Pembatasan terhadap Transaksi
1.	Perjanjian Hutang Piutang	a. Perseroan sebagai pihak pertama; dan b. BTI sebagai pihak kedua.	8 April 2026 – 8 April 2027	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada BTI dalam jumlah Rp4.343.750.000.000 yang akan digunakan untuk modal kerja BTI atau afiliasinya dengan beban bunga sebesar 2.50% per tahun.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan PUT V.

12. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 23 Februari 2026, Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak terlibat dalam perselisihan dan perkara apa pun di luar pengadilan dan/atau perkara baik pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, perkara perburuhan di pengadilan hubungan industrial, maupun kepailitan atau mengajukan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi di hadapan pengadilan yang kompeten di Indonesia yang dapat mempengaruhi kedudukan, peranan, dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak serta rencana PMHMETD dan rencana penggunaan dananya.

13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Selaras dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perusahaan holding, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis seperti pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, mengatur pembelian dan penjualan bisnis, termasuk praktik profesional dan kegiatan broker hak paten yang dilakukan pada level unit usaha Perseroan.

Produk dan jasa utama Perseroan

Segmen Manufaktur:
- Fabrikasi konstruksi struktur baja
- Produksi pipa baja
- Produksi komponen otomotif
- Produksi produk foundry non-otomotif
- Produksi kendaraan listrik komersial
- Konstruksi bangunan dengan teknologi 3-D printing (dalam tahap R&D)

Segmen Infrastruktur:
- Pembangunan dan/atau pengelolaan jalur pipa gas
- Pembangunan dan/atau pengelolaan jalan tol
- Pembangunan dan/atau pengelolaan pembangkit listrik
- Pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur pendukung teknologi informatika
- Instalasi dan/atau pengelolaan fasilitas SPLU

Segmen Perdagangan:
- Perdagangan kendaraan listrik komersial
- Perdagangan komponen otomotif dan logam

Penjualan Bersih per Segmen Manufaktur, Jasa Fabrikasi dan Konstruksi Metal, dan Infrastruktur

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Infrastruktur dan Manufaktur	3.110.416	3.479.967	3.468.840
Perdagangan, Jasa dan Investasi	245.188	136.461	120.079
Jasa Pabrikasi dan Konstruksi	387.369	253.477	170.565
Total	**3.742.973**	**3.869.905**	**3.759.484**

Kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan telah diidentifikasi sebagai risiko dan diantaranya adalah

- fluktuasi harga bahan baku / raw material dan material pendukung lainnya

- perubahan kurs
- ketersediaan manpower dengan kualifikasi sesuai kebutuhan

Kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang telah diidentifikasi sebagai risiko dan diupayakan mitigasinya dengan:

- proses market research yang menyeluruh
- perencanaan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang secara maksimal mempertimbangkan seluruh aspek
- pemahaman komprehensif tentang spesifikasi desain dan teknis proyek dan produk yang diminta konsumen

Perseroan telah mengidentifikasi ketergantungan terhadap pemasok, pelanggan, dan/atau kontrak tertentu, termasuk kontrak dengan pemerintah, dengan probabilitas terjadinya risiko jika tidak dilakukan mitigasi dengan baik berada pada kisaran 50% sampai dengan 75% (level sedang). Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan telah menerapkan strategi diversifikasi pemasok, perluasan basis pelanggan, serta pengelolaan portofolio kontrak agar tidak bergantung secara signifikan pada satu pihak tertentu.

Dari sisi pemasok, unit-unit usaha Perseroan telah memiliki beberapa alternatif pemasok untuk kebutuhan bahan baku, komponen, maupun material pendukung operasional. Beberapa material yang digunakan juga memiliki spesifikasi umum dan tersedia di pasar, sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas untuk mengganti pemasok apabila diperlukan. Dalam praktiknya, sejumlah unit usaha Perseroan memiliki minimal tiga opsi vendor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendukung kesinambungan pasokan.

Dari sisi pelanggan, Perseroan terus berupaya mengurangi ketergantungan melalui pengembangan produk dan jasa sesuai kebutuhan pasar, perluasan segmen pelanggan, serta penguatan hubungan komersial dengan berbagai pihak. Perseroan juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap konsentrasi pendapatan dan portofolio kontrak untuk memastikan bahwa eksposur terhadap pelanggan atau kontrak tertentu tetap berada pada tingkat yang dapat dikelola.

Dengan langkah-langkah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat ketergantungan terhadap pemasok, pelanggan, dan/atau kontrak tertentu telah dimitigasi secara memadai dan akan terus dikelola secara berkelanjutan.

14. PEMASARAN

Unit-unit operasional Perseroan secara aktif melakukan pemasaran produk dan jasanya guna meningkatkan pencapaian penjualan. Secara garis besar aktivitas pemasaran dilakukan dengan dua metode: Business-to-Business (B2B) dan Business-to-Consumer (B2C).

Pemasaran secara B2B dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan, VKTR untuk produk-produk kendaraan listrik, BA untuk produk-produknya yang disalurkan kepada Agen Pemegang Merk (APM) dan oleh BMI untuk jasa penanganan proyek-proyek konstruksi dan produk-produk di bidang migas seperti pipa baja diameter besar. BA dan BMI secara rutin membina hubungan baik dengan rekan-rekan bisnis mereka dan aktif memperluas jejaring guna memperoleh kerja sama di masa mendatang. BPI, anak usaha BMI, juga menawarkan produk pipa baja, khususnya untuk segmen migas, dan jasa pelapisan pipa baja yang usaha pemasarannya juga dilakukan secara B2B.

Pemasaran secara B2C dilakukan oleh BPI untuk produk di bidang non-migas seperti pipa diameter kecil. BPI juga bekerja sama dengan distributor untuk menyalurkan produk-produk pipa nonmigas kepada konsumen di seluruh Indonesia.

15. PROSPEK USAHA

Prospek ekonomi Indonesia untuk jangka menengah secara umum adalah positif, dengan prediksi Indonesia berpotensi mempertahankan pertumbuhan sekitar 5% per tahun, meskipun risiko eksternal seperti ketegangan perdagangan global dan pengetatan keuangan masih membayangi.Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap prospek Perseroan di sektor inti manufaktur dan infrastruktur. Pemerintah memprioritaskan reformasi struktural, termasuk perbaikan iklim investasi, percepatan hilirisasi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong produktivitas dan mendukung target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 (OECD, 2025; Bappenas, 2025). Indonesia juga mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan tangguh melalui peningkatan kapasitas energi terbarukan, penguatan infrastruktur digital, serta pengembangan industri berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan menciptakan sumber pertumbuhan baru sekaligus mendukung komitmen iklim dan daya saing jangka panjang (World Bank, 2025). Lingkungan pertumbuhan stabil di kisaran 5% cenderung menguntungkan perusahaan besar dan beragam seperti Perseroan dengan mendukung produksi manufaktur, aktivitas konstruksi, investasi dalam proyek infrastruktur, serta transisi bisnis menuju bisnis berkelanjutan dan hijau. Namun, terdapat risiko dan hambatan yang terkait dengan sentimen investor dan tekanan fiskal: tindakan terbaru dari lembaga pemeringkat, termasuk penurunan prospek peringkat *sovereign credit* Indonesia, menyoroti kekhawatiran terkait ketidakpastian kebijakan dan disiplin fiskal yang dapat membebani kepercayaan bisnis dan biaya pinjaman pada tahun 2026. Meskipun demikian, lingkungan makroekonomi dasar tetap menguntungkan dibandingkan dengan banyak negara tetangga di kawasan ini, dengan inflasi diperkirakan tetap moderat dan surplus perdagangan dipertahankan, yang mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Bagi Perseroan, lingkungan ini menunjukkan bahwa jika perusahaan terus mengembangkan basis manufaktur yang beragam dan portofolio infrastrukturnya—sambil mengelola risiko keuangan dan operasional—perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan aktivitas ekonomi yang stabil dan investasi infrastruktur saat Indonesia menghadapi siklus ekonomi 2026.

Prospek usaha Perseroan menunjukkan perkembangan yang solid, didukung oleh pengalaman panjang Perseroan di bidang manufaktur—khususnya produk berbasis baja melalui unit seperti Bakrie Metal Industries (BMI), Bakrie Pipe Industries (BPI), dan Bakrie Construction (BCons) —serta rekam jejak dalam proyek infrastruktur strategis. Secara khusus prospek usaha BCons yang berkonsentrasi di fabrikasi struktur baja masih sangat menjanjikan seiring dengan prospek industri minyak dan gas Indonesia pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi hulu migas melalui penawaran 13 blok migas baru pada putaran lelang pertama tahun 2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi nasional dan memperkuat ketahanan energi. SKK Migas telah menyatakan perkiraan produksi minyak dan gas akan meningkat pada tahun 2027, didukung oleh kegiatan seperti pengeboran, program intervensi sumur, dan proyek-proyek hulu. Produksi minyak diproyeksikan mencapai 602.000–615.000 barel per hari pada tahun 2027, dibandingkan dengan perkiraan sebesar 602.000–610.000 barel per hari pada tahun 2026. Produksi gas diperkirakan mencapai 934.000–977.000 barel setara minyak per hari, naik dari volume yang diperkirakan sebesar 929.000–933.000 boe/hari pada tahun ini. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk fabrikasi struktur baja, pipa baja, dan komponen pendukung proyek migas yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas produksi, jaringan pipa, terminal gas, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Di sisi portofolio, akuisisi penuh jalan tol Cimanggis–Cibitung menjadi langkah strategis untuk meningkatkan *recurring income*, dengan kontribusi pendapatan infrastruktur yang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan secara tahunan. Perseroan juga mengembangkan bisnis baru di sektor kendaraan listrik melalui VKTR, energi terbarukan, serta teknologi konstruksi 3D printing sebagai sumber pertumbuhan masa depan. Dalam konteks tersebut, rencana *fund raising* melalui rights issue menjadi katalis penting untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi, sehingga berpotensi mendorong peningkatan kinerja jangka panjang secara berkelanjutan.

16. PERSAINGAN USAHA

Kondisi Persaingan Industri Pipa Baja Indonesia

Bakrie Pipe Industries (BPI) merupakan salah satu produsen pipa baja terkemuka di Indonesia yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan para pesaingnya. Detail perbandingan kapabilitas BPI dengan kompetitor terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. *Major Competitor* BPI di Industri Pipa Baja Indonesia

No.	Perusahaan	Total Kapasitas (Ton)	Kapabilitas	HSAW (Ton)	ERW (Ton)	LSAW (Ton)
1	PT Bakrie Pipe Industries	310.000	•Outer Diameter (in) •Thickness (mm) •Spec	- - -	1/2 - 24 1,3 – 17,5 Up to API 5L Spec X70	- - -
2	PT Southeast Asia Pipe Industries (Subsidiary of Bakrie Pipe Industries)	190.000	•Outer Diameter (in) •Thickness (mm) •Spec	16 - 140 6 – 25 Up to API 5L Spec X80	- - -	24 - 48 7,9 – 34 Up to API 5L Spec X80
3	PT Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO)	700.000	•Outer Diameter (in) •Thickness (mm) •Spec	6 - 120 5 – 25,4 Up to API 5L Spec X80	1/4 – 8 2 – 8,18 Up to API 5L Spec X70	- - -
4	PT Indal Steel Pipe (ISP)	370.000	•Outer Diameter (in) •Thickness (mm) •Spec	4,5 - 80 4,0 – 25,4 Up to API 5L Spec X80	6,62 - 16 5,2 – 14,3 Up to API 5L Spec X65	- - -
5	PT Krakatau Pipe Industries (KPI)	274.000	•Outer Diameter (in) •Thickness (mm) •Spec	12 – 80 3,2 – 25,4 Up to API 5L Spec X80	4 - 20 3,2 - 16 Up to API 5L Spec X80	- - -

Source: IISIA (The Indonesian Iron and Steel Industry Association) Directory 2025 and Individual Company Profiles

Detail BPI's *competitive advantages*:

- Total kapasitas produksi pabrik Bekasi dan Lampung mencapai ± 500.000 ton per tahun.
- BPI mampu memproduksi pipa baja dengan metode pengelasan paling lengkap (Electric Resistence Welding [ERW], Helical Submerged Arc Welding [HSAW]**,** dan Longitudinal Submerged Arc Welding [LSAW]**),** serta didukung oleh fasilitas *coating,* seperti Three-Layer Polyethylene (3LPE), *galvanizing,* dan *primer coating.* Dengan begitu, BPI dikenal sebagai "*one stop solution"* yang dapat memenuhi kebutuhan pipa baja di Indonesia secara terintegrasi.
- Satu-satunya produsen pipa baja yang memiliki *range* diameter terlengkap, mulai dari **½** inci hingga 140 inci, dengan kapabilitas tebal 1,3 - 34 mm.
- Telah tersertifikasi ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 17025, SMK3, serta sertifikasi produk API 5L, API 5CT, API 2B, dan SNI 0039, 0068, dan 8052.
- *Leader* pada segmen pasar *oil & gas* dan tiang listrik.
- Berpengalaman dalam mengelola berbagai proyek, mulai dari sektor strategis seperti oil & gas, air, konstruksi, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan petrokimia, hingga sektor panas bumi.

BPI's *Market Share*

1. Pasar Pipa Baja Karbon Segmen *Oil & Gas*

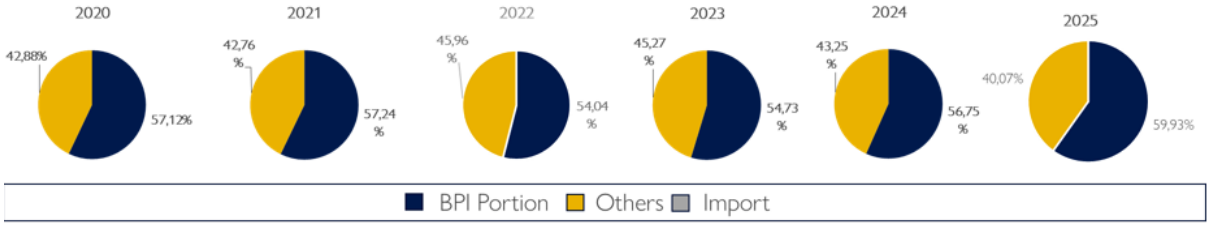

BPI berkontribusi sekitar >50% setiap tahunnya pada pasar Oil & Gas.

2. Pasar Tiang Listrik PLN

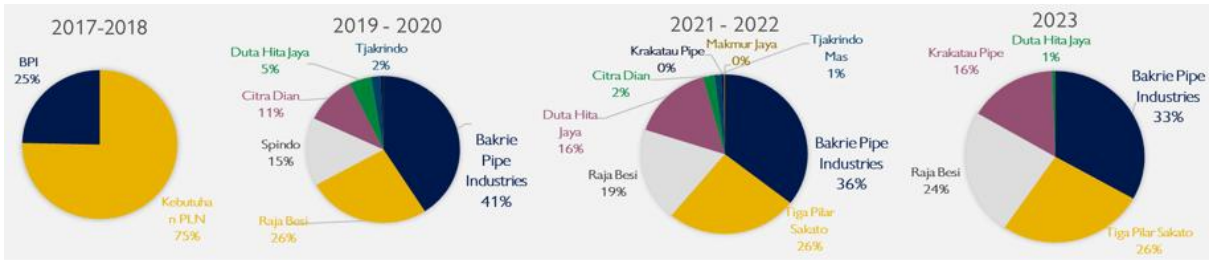

BPI menguasai sekitar 30% pasar pipa baja untuk tiang listrik, artinya satu dari tiga tiang listrik di Indonesia diproduksi oleh BPI

Kondisi Persaingan Energi

Bakrie Power (BP) merupakan utility-scale power plant developer dengan pengalaman dalam pengembangan pembangkit listrik skala besar di Indonesia, mencakup sektor konvensional maupun energi terbarukan. Salah satu pencapaian penting BP adalah proyek Selayar Hybrid PV berkapasitas 1,3 MW dengan BESS 870 kWh, yang menjadi proyek hybrid pertama PLN di Indonesia, menggabungkan pembangkit surya dengan sistem eksisting sebagai bagian dari transisi menuju energi yang lebih bersih. Selain itu, BP juga berperan sebagai Independent Power Producer (IPP) di sektor geothermal dengan kapasitas IPP ± 200 MW, serta memiliki wilayah usaha kelistrikan di kawasan industri, memperkuat posisinya dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur energi jangka panjang.

Helio Synar Energi (Helio), merupakan anak usaha dari Bakrie Power, hadir sebagai bagian dari ekosistem yang berfokus pada solusi energi bersih. Helio berperan sebagai penyedia EPC (Engineering, Procurement, and Construction) untuk Solar PV, khususnya pada segmen komersial dan industri, serta mengembangkan EV charging ecosystem secara end-to-end, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasional dan perawatan. Dengan kapabilitas eksekusi proyek yang kuat, Helio telah membangun market presence yang signifikan di segmen B2G, termasuk sebagai penyedia utama EV charger untuk Transjakarta. Implementasi ini mencakup total 46 unit EV charger berkapasitas 200 kW yang digunakan oleh operator Transjakarta, termasuk Sinar Jaya dan DAMRI, menjadikan Helio sebagai pemegang major market share untuk segmen B2G di Indonesia. Hal ini mencerminkan kolaborasi dengan berbagai institusi dalam mendukung percepatan adopsi energi bersih di Indonesia.

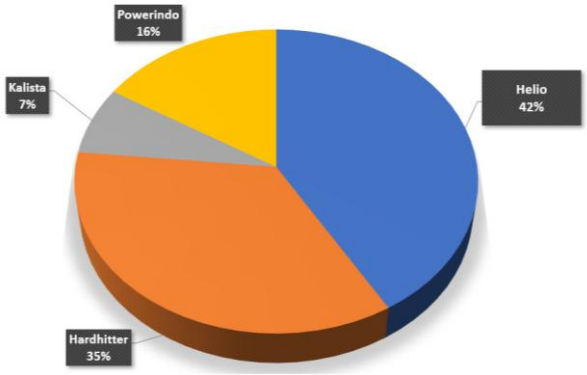

Dengan lebih dari 10 MW PLTS terpasang, ±200 MW pemegang IPP di pembangkit geothermal, pemilik wilayah usaha di kawasan industri di Indonesia dan ekspansi EV charging infrastructure ekosistem di berbagai sektor, Bakrie Power dan Helio terus berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem energi terbarukan dan ev mobility dari hulu ke hilir dan memimpin akselerasi pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.

17. STRATEGI USAHA

Visi Perseroan adalah Menjadi Perusahaan Investasi terkemuka yang merepresentasikan perekonomian Indonesia. Misi Perseroan adalah Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham melalui kegiatan investasi yang menguntungkan dan peningkatan nilai portofolio inti.

Perseroan berencana untuk mencapai visi dan misi tersebut melalui strategi usaha berikut ini:

Pengelolaan portofolio bisnis di berbagai bidang strategis

Perseroan telah mengembangkan portofolio yang beragam dan luas di bidang manufaktur dan infrastruktur, didukung oleh puluhan tahun pengalaman industri di Indonesia. Berawal dari fondasi yang kuat di industri manufaktur pipa baja, struktur baja, dan komponen otomotif, Perseroan juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi siklus bisnis dan berbagai usaha. Keahlian manufaktur yang telah teruji ini memungkinkan Perseroan untuk memperluas bisnisnya secara strategis ke sektor infrastruktur, membentuk portofolio yang signifikan dalam jalan tol dan proyek terkait energi. Arah pengembangan bisnis ini mencerminkan strategi Perseroan yang seimbang antara kemampuan industri dengan pendapatan infrastruktur yang berkelanjutan.

Bisnis yang selaras dengan arah pembangunan Indonesia

Sejak pendiriannya, Perseroan telah secara nyata konsisten berkontribusi pada pembangunan nasional. Arah strategis BNBR sangat selaras dengan rencana infrastruktur dan industrialisasi Indonesia. Perseroan secara historis telah berinvestasi dalam proyek-proyek nasional besar — mulai dari pipa gas, jembatan baja, hingga pembangkit listrik — dan baru-baru ini melakukan langkah-langkah signifikan seperti akuisisi aset infrastruktur besar seperti jalan tol Cimanggis-Cibitung untuk memperluas aliran pendapatan berulang.

Transisi ke bidang bisnis berkelanjutan dan hijau

Perseroan merupakan perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan rekam jejak yang konsisten dalam menjalankan bisnis inti di bidang manufaktur dan infrastruktur. Pengalaman tersebut menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam menjaga daya saing Perseroan di tengah dinamika pasar dan untuk kemudian secara berkelanjutan mengembangkan bisnis masa depan di sektor hijau dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pengembangan ini dilakukan secara bertahap dan terukur, tanpa mengganggu stabilitas bisnis inti, serta diharapkan dapat memperkuat daya saing Perseroan di masa mendatang. Saat ini Perseroan telah mengembangkan bisnis baru di bidang kendaraan listrik, pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan 3-d printing konstruksi.

Penguatan finansial dan optimalisasi operasional

Perseroan secara konsisten berupaya memperkuat kesehatan keuangan dan operasional internalnya untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Perseroan telah melakukan restrukturisasi utang dan perbaikan neraca secara berkelanjutan untuk membangun struktur modal yang lebih tangguh sambil memastikan opsi pembiayaan tetap tersedia untuk aset produktif dan yang menghasilkan nilai. Pada tingkat operasional, perusahaan berfokus pada peningkatan efisiensi dan daya saing di seluruh unit bisnisnya untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan jangka panjang. Secara paralel, Perseroan telah memperkuat praktik manajemen risiko dan sistem pengendalian internal sesuai dengan standar tata kelola korporat yang lebih kuat dan prioritas ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola).

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perubahan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali No. 00115/2.0902/AU.1/10/1792-4/1/VI/2026 pada tanggal 26 Juni 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Modal ditempatkan dan disetor penuh	4.764.178	4.764.178
Tambahan modal disetor	(1.750.758)	(1.750.758)
Komponen ekuitas lainnya	18.308	(86.138)
Saldo laba	821.442	327.590
Subtotal	3.853.170	3.254.872
Kepentingan nonpengendali	818.494	656.794
Ekuitas - Neto	**4.671.664**	**3.911.666**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD V sejumlah 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Baru Seri E atau sebesar 51,85% (lima puluh satu koma delapan lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD V dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) per saham. Setiap pemegang 27 (dua puluh tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 14 (empat belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp53 (lima puluh tiga Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PMHMETD V kepada masyarakat sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Biasa Seri E dengan nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut setelah diperolehnya dana hasil PMHMETD V dan dikurangi dengan biaya emisi adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025	4.764.178	(1.750.758)	18.308	821.442	818.494	**4.671.664**
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2025 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut: HMETD Sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp53 (lima puluh tiga Rupiah)	**1.079.038**	**3.686.713**	**-**	**-**	**-**	**4.765.751**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
per saham sebelum dikurangi estimasi biaya PMHMETD V						
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 setelah PMHMETD V dilaksanakan	**5.843.216**	**1.935.955**	**18.308**	**821.442**	**818.494**	**9.437.415**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Kebijakan dividen Perseroan diatur dalam Prospektus pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO), yakni pada bagian "Pembagian Dividen", yang menyatakan bahwa Perseroan akan memberikan dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan dan rencana pengembangan usaha. Adapun besaran rasio pembayaran dividen dan/atau jumlah dividen tiap tahun buku ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan hukum yang berlaku serta kebutuhan dan rencana bisnis Perseroan, Perseroan dapat membagi dividen tunai kepada seluruh pemegang saham setiap tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain. Dengan tidak mengurangi hak Perseroan untuk menentukan lain, saat ini kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Net Profit After Income Tax	Dividen Payout Ratio
Rp 0 hingga 250 miliar	5 – 10%
Di atas Rp 250 miliar	11 – 15%

Masing-masing perusahaan terbuka, entitas anak/unit usaha dan perusahaan terasosiasi menjalankan kebijakan dividen secara independen.

Merujuk kepada rencana usaha Perseroan untuk tahun buku mendatang serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT dan ketentuan di dalam Surat Edaran BAPEPAM No. S-2057/PM/2003 yang mengatur antara lain bahwa penggunaan keuntungan dalam bentuk dividen dapat dilakukan apabila Perseroan memiliki saldo laba dan total ekuitas yang positif.

Saat ini, tidak terdapat negative covenant yang membatasi Perseroan untuk membagi dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Pemegang saham baru dalam rangka PMHMETD V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, termasuk hak atas dividen.

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen dalam 3 (tiga) tahun terakhir karena belum memenuhi ketentuan UUPT, serta digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana; Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non- Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- Form-DGT 1 atau;
- Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
    - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp5.000.000 (lima juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) tidak dikenakan bea meterai. Bea meterai ini terutang pada saat dokumen dipergunakan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD V INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD V INI.

XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Siaga Penawaran Umum Terbatas V PT Bakrie & Brothers Tbk No. 70 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, MKn, Notaris di Jakarta, BCI selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham. Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) sehubungan dengan PMHMETD V ini adalah:

PT Bakrie Capital Indonesia ("BCI")

Keterangan Singkat

BCI, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan pertama kali didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 9 Januari 1997, yang dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-1909.HT.01.01.TH.97 tanggal 19 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 623/BH00.03/IV/97, di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan tanggal 1 April 1997 ("**Akta Pendirian BCI**").

Anggaran dasar BCI sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian BCI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BCI No. 3 tanggal 2 September 2022, yang dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0063346.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174802.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 September 2022, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar BCI ("**Akta BCI No. 3/2022**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta BCI No. 3/2022, kegiatan usaha BCI bergerak dalam usaha aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200), real estat yang dimiliki (KBLI 68111), aktivitas konsultasi manajemen (KBLI 70209), aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti RUPSLB No. 21 tanggal 26 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham BCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- / saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	**750.000.000**	**750.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Nirwan Dermawan Bakrie	39.373.750	39.373.750.000	20
2. Adika Nuraga Bakrie	39.373.750	39.373.750.000	20
3. Adhika Andrayudha Bakrie	39.373.750	39.373.750.000	20
4. Adika Aryasthana Bakrie	39.373.750	39.373.750.000	20
5. Ratna Indira Nirwan B	39.373.750	39.373.750.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	196.868.750	196.868.750.000	100,00
Saham Dalam Portepel	553.131.250	553.131.250.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti RUPSLB No. 17 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, BCI memiliki susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Nirwan Dermawan Bakrie
Komisaris	:	Bambang Irawan Hendradi
Komisaris	:	Omar Luthfi Anwar
Komisaris	:	Drs. Tryana Sjamun

Direksi

Direktur Utama	:	Bayu Irianto
Direktur	:	Hari Widodo
Direktur	:	Adika Nuraga Bakrie
Direktur	:	Adhika Andrayudha Bakrie

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional dengan kepemilikan sahamnya pada saat *Recording Date*.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.

Pembeli Siaga menyatakan memiliki kesediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD V, BCI akan menggunakan sumber dana berupa kas internal sebagaimana bukti kecukupan dana berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

BCI merupakah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Persyaratan penting berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Siaga, meliputi:

a. Pembeli Siaga akan mengambil sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD sebanyak-banyaknya 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu- dua ratus tiga puluh tiga) saham atau seluruhnya sebesar Rp2.641.352.956.349 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) berdasarkan Harga Pelaksanaan dari sisa saham akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga atas dasar komitmen penuh (*full commitment*).
b. Pembeli Siaga akan memperoleh sebanyak-banyaknya 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Baru dalam pelaksanaan HMETD atau seluruhnya sebesar maksimum Rp4.765.751.471.134 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat Rupiah), yang merupakan jumlah maksimum keseluruhan saham termasuk saham dari pelaksanaan HMETD yang diterima pengalihannya dari Port Fraser International Ltd. sebanyak 20.148.477.438 (dua puluh miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham dan Fountain City Investment Ltd sebanyak 19.934.513.407 (sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh) saham.

c. Pembeli Siaga akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas sisa saham yang diambil bagian oleh Pembeli Siaga ke rekening Perseroan yang harus diterima sepenuhnya dalam waktu 1 hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan.

d. Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil atau membeli sisa saham bergantung pada pemenuhan syarat, diantaranya (i) efektifnya pernyataan pendaftaran; (ii) Perseroan telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk mengeluarkan saham baru dalam PMHMETD; dan (iii) Perseroan tidak melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan Pembeli Siaga.

e. Perseroan wajib melalui Biro Administrasi Efek, memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah sisa saham yang harus dibeli berdasarkan perjanjian atau mengonfirmasi bahwa tidak terdapat sisa saham yang perlu dibeli.

BCI dalam melakukan haknya sebagai Pembeli Siaga dan telah memperoleh persetujuan korporasi berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bakrie Capital Indonesia (Perseroan) No. 009L/BCI-BI/DEKOM/IV/2026 tanggal 8 April 2026.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PMHMETD V ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK
KAP Y. Santosa dan Rekan
Jl. Sisingamangaraja No. 26
Jakarta Selatan 12110 Indonesia

Berdasarkan Surat Penunjukan Perseroan kepada Akuntan Publik No. 1296.a/FIN-ACCT/II-26/L/RH.rud tanggal 2 Februari 2026.

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD V ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan estándar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam laporan keuangan yang digunakan dalam rangka PMHMETD V ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No STTD.AP-24/PM.223/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama Julinar Natalina Rajagukguk.

KONSULTAN HUKUM
TnP Law Firm
Satrio Tower 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Jakarta 12950, Indonesia
Telp.: (+62) 21 2251 3653

Berdasarkan Surat Penunjukan Perseroan kepada Konsultan Hukum No. 018/BNBR/CL-TNP/II/26 tanggal 4 Maret 2026.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD V ini adalah melakukan uji tuntas segi hukum dan memberikan pendapat dari segi hukum mengenai berbagai aspek pelaksanaan PMHMETD V.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No STTD: STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 12 Desember 2023 atas nama Rambun Tjajo, S.H.

Humberg Lie, SH, SE, MKN
Jl. Raya Pluit Selatan 103
Jakarta 14450
Indonesia

Berdasarkan Surat Penunjukan Perseroan kepada Notaris No. 017/2/BNBR/CL-NOTHL/III/26 tanggal 3 Maret 2026.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD V ini antara lain membuatkan akta-akta dalam rangka PMHMETD V dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-149/PJ-1/PM.02/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Atas nama HUMBERG LIE.

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT EDI Indonesia
Wisma SMR, Lantai 10
Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350

Berdasarkan Surat Penunjukan Perseroan kepada BAE No : 017/1/BNBR/CS-EDII/III/26 tanggal 3 Maret 2026.

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD V ini adalah melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan *settlement agent.*

Nomor izin usaha PT EDI Indonesia: KEP-01/PM/BAE/2000 Tanggal 25 Juli 2000.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD V Perseroan telah menunjuk PT EDI Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham sesuai dengan Akta Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bakrie & Brothers Tbk No. 69 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKN, Notaris di Jakarta.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD V ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saham mempunyai 14 (empat belas) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham adalah:

a. Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
c. Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk yang akan menggunakan hanya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham, yaitu pada tanggal 9 Juli 2026.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Juli 2026 dengan membawa:

a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Proses Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

a) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST)

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan.

b) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
2. Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
5. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
    a) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
    b) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Bagi Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 27 Juli 2026.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
   - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
   - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
   - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.

b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
   - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
   - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

   - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
   - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
   - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2026 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 30 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD, termasuk pemesahan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD, termasuk pemesahan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah dari HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai

Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD V, harus dibayar penuh *(full amount)* dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor FPPS kepada rekening Perseroan pada:

PT Bakrie & Brothers Tbk
Bank BCA – Epicentrum Walk, Jakarta
No. Rekening 505-5367-997

PT Bakrie & Brothers
Bank Danamon – Menara Bank Danamon
No rekening. : 003710614466

PT Bakrie & Brothers
Bank Mandiri – KCP Jakarta Casablanca
No rekening. : 124.00248.99990

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan nomor FPPS.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk

pemesanan tidak diterima dengan baik *(not in good funds)* di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 29 Juli 2026.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 31 Juli 2026.

Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan, pada tanggal 31 Juli 2026 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja ke-4 (empat) setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer. Perseroan akan memindahkan uang tersebut kerekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

a. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Perseroan melalui BAE dan didepositkan ke dalam Rekening Efek yang telah ditentukan oleh KSEI *(Issuer Account)* selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah KSEI menyampaikan Dana kepada Perseroan dan Daftar pemegang saham yang mengajukan permohonan *exercise* kepada BAE. Selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya secara elektronik masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.

b. Untuk saham hasil Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan.

c. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening Perseroan.

11. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka terdapat pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta

delapan ratus empat puluh delapan ribu- dua ratus tiga puluh tiga) saham. dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD V Perseroan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD

Prospektus PMHMETD V akan tersedia di Website Perseroan dan HMETD untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026.

Biro Administrasi Efek

PT EDI Indonesia
Wisma SMR, Lantai 10
Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350

Perseroan

PT Bakrie & Brothers Tbk
Bakrie Tower, Lt 35 - 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 (21) 2991 2222
Website: https://bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

Apabila sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Juli 2026, belum mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.